

HANTU PKI DAN UJUNG REKONSILIASI
(Analisis Framing Pemberitaan PKI Era Presiden Abdurrahman Wahid dan
Joko Widodo pada Majalah *Tempo* dan *Gatra*)



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Komunikasi Pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Oleh

Meigitaria Sanita

14321109

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2018

SKRIPSI

SKRIPSI

HANTU PKI DAN UJUNG REKONSILIASI

**(Analisis Framing pemberitaan PKI Era Presiden Abdurrahman Wahid dan
Joko Widodo pada Majalah *Tempo* dan *Gatra*)**



Disusun oleh

Meigitaria Sanita

14321109

Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk diujikan dan dipertahankan di
hadapan tim penguji skripsi

25 MAY 2018

Tanggal:

Dosen pembimbing Skripsi,

Puji Rianto., S.IP., M.A.

NIDN: 0503057601

HANTU PKI DAN UJUNG REKONSILIASI

SKRIPSI

HANTU PKI DAN UJUNG REKONSILIASI
(Analisis Framing pemberitaan PKI Era Presiden Abdurrahman Wahid dan
Joko Widodo pada Majalah *Tempo* dan *Gatra*)

Disusun oleh

Meigitaria Sanita

14321109

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Tanggal:

Dewan Penguji:

1. Anang Hermawan, S.Sos., MA (.....)

NIDN: 0506067702

2. Puji Rianto, S.IP., M.A (.....)

NIDN: 0503057601

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Muzayin Nazaruddin, S.Sos., MA

NIDN: 0516087901

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Meigitaria Sanita

Nomor Mahasiswa : 14321109

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Melalui surat pernyataan ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama menyusun skripsi ini saya tidak melakukan tindakan pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang di tetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setuju dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 30 April 2018

Yang Menyatakan,



Meigitaria Sanita
Meigitaria Sanita

MOTTO

“Ada diajarkan oleh kaum Brahmana, orang kaya terkesan pongah di mata si miskin, orang bijaksana terkesan angkuh di mata si dungu, orang gagah berani terkesan dewa di mata si pengecut. Juga sebaliknya, Kakanda. Orang miskin tak berkesan apa-apa pada si kaya, orang dungu terkesan mengibakan pada si bijaksana, orang pengecut terkesan hina pada si gagah berani. Tetapi semua kesan itu salah. Orang harus mengenal mereka lebih dahulu.”

Pramoedya Ananta Toer, Arok Dedes

KARYA INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK :

Bapak, Iin Roni Suwardi

Ibu, Rupiah

Dan

Adikku Tercinta

Rida Bawa Carita

Ach. Rafido Setio Pambudi

KATA PENGANTAR

Tulisan ini merupakan tugas akhir yang saya kerjakan sebagai syarat kelulusan dan untuk mencapai gelar sarjana. Tugas akhir ini membahas mengenai pemberitaan PKI dan isu komunisme di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang begitu sensitif dengan PKI maupun komunisme seolah alergi dan membenci kedua hal tersebut. Bukan tanpa alasan, sejarah kelam masa lalu telah menjadi kebencian yang kekal dimasa kini. Kekejaman PKI yang dinilai sangat jauh dari nilai kemanusiaan membentuk luka lama dan dendam sejarah bagi mereka yang menjadi korban.

Sekali lagi, kemarahan yang terjadi pada masyarakat nyatanya hasil dari permainan sejarah penguasa. Orde Baru saat itu berkuasa dan selalu mempropagandakan melalui media film, pembelajaran menjadikan masyarakat sepaham dan mempercayai apa yang disampaikan Orde Baru. Kehadiran *Tempo* tahun 1971 diman Orde Baru berkuasa menimbulkan pergulatan dalam perjalanan *Tempo*. Bagaimana tidak dengan mudah media dapat dikendalikan pemerintah dengan adanya Departemen Penerangan dimana fungsi pers digunakan sebagai komunikator antara pemerintah dengan rakyat. *Tempo* yang saat itu satire dan keras mengkritik Orde Baru harus menelan pil pahit untuk dibredel hingga dua kali yakni ditahun 1984 dan 1994. Tahun 1994 menjadi wajah baru, muncul majalah *Gatra* yang digadang-gadang menjadi pengganti *Tempo*. *Gatra* adalah hasil negosiasi antara Bob Hasan dari pihak *Tempo* dengan pihak Soeharto penguasa Orde Baru. Dari situlah Gunawan Mohamad dkk mengancam bahwa *Gatra* adalah media boneka.

Penulisan berita *Tempo* dan *Gatra* mengenai PKI jelas akan berbeda karena faktor sejarah dan latar belakang. Selain itu konstruksi yang terbangun hasil dari pengetahuan wartawan dan latar belakang media yang cukup kuat. Ketika berbicara soal Orde Baru *Tempo* akan sangat memperlihatkan ketidaksepakatan dan akan berbeda dengan *Gatra*. Selain itu gaya sastra yang dikenal dalam jurnalisme *Tempo* akan nampak ketika pemilihan-pemilihan kata

dan kalimat. Gatra akan cenderung tidak memberikan penilaian salah karena latar belakang Gatra adalah bentukan dari penguasa Orde Baru.

Dari sinilah mengapa penggambaran PKI dan KOMunisme akan berbeda Tempo yang berideologi membela HAM akan cenderung memihak apalagi ketika bersangkutan dengan Orde Baru. Sedangkan Gatra akan lebih seimbang karena penguasa Orde Baru adalah pemilik modalnya. Melalui analisis dalam penulisan ini sengaja memilih tipe framing Entman agar diketahui bagaimana media memilih solusi karena dalam elemennya terdapat tawaran solusi yang disampaikan media.

Yogyakarta, 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	22
BAB II	27
GAMBARAN OBJEK.....	27
A. Majalah Tempo	27
B. Majalah Gatra	30
BAB III	34
ANALISIS DATA	34
A. Analisis Pemberitaan pada Majalah Tempo.....	34
1. Era Kepresidenan Abdurrahman Wahid	34

a. Edisi 16 April 2000.....	34
2) PKI, Hantu atau Dihantukan?	38
3) Islam, Maaf dan PKI.....	41
1. Era Kepresidenan Joko Widodo.....	45
a. Edisi 1 Oktober 2017	45
2) Perintah Panglima, Mau Apa?	50
3) Kue Pahit Untuk Jokowi	55
B. Analisis Pemberitaan pada Majalah Gatra	58
1. Era Kepresidenan Abdurrahman Wahid	58
a. Edisi 8 April 2000.....	58
1) Dagang Politik Palu Arit.....	59
2) Asap Tanpa Api	62
2. Era Kepresidenan Joko Widodo.....	66
a. Edisi 4 Oktober 2017	66
1) Ujung Jalan Rekonsiliasi Isu PKI	66
2) Peristiwa 1948: Belanda dari Depan, PKI Tusuk dari Belakang	70
b. Edisi 11 Oktober 2017	73
1) Bola Panas Isu PKI	74
BAB IV	78
PEMBAHASAN.....	78
A. Framing pada Majalah Tempo	78
1. Pelarangan Ideologi Komunisme Tidak Relevan dengan Zaman	79
2. Kemunculan Isu Komunisme Digunakan untuk Menyerang Presiden	80
3. Orde Baru dan TNI AD Aktor yang Menyebabkan Masyarakat Takut dengan Isu PKI	82
4. Pelanggaran HAM dan Perlunya Rekonsiliasi untuk Pelurusan Sejarah.....	84
B. Framing pada Majalah Gatra	85
1. Pembebasan Ideologi Komunisme Perlu Dipertimbangkan Karena Traumatik Sejarah dan Tidak Sesuai dengan Ideologi Bangsa	86
2. Isu Komunisme Sebagai Alat Untuk Melemahkan Pemerintah dan Mobilisasi Politik.....	88
3. TNI AD Sebagai Pelindung Negara dari Bahaya Komunisme	89

4. Rekonsiliasi Alami dan Pemeriksaan Ulang Sejarah.....	91
C. Perbandingan Framing Tempo dan Gatra.....	92
D. Argumen Konstruksi Realitas yang Dibangun Tempo dan Gatra.....	101
BAB V	106
PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Keterbatasan Penelitian.....	108
C. Saran	110
Daftar Pustaka.....	112
LAMPIRAN	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Dimensi Framing Robert N. Entman	25
Tabel 1. 2 Konsep Framing Robert N. Entman.....	25
Tabel 3. 1 Frame Berita Tempo (Berita Pertama).....	37
Tabel 3. 2 Frame Berita Tempo (Berita kedua)	41
Tabel 3. 3 Frame Berita Tempo (Berita Ketiga)	44
Tabel 3. 4 Frame Berita Tempo (Berita Keempat)	50
Tabel 3. 5 Frame Berita Tempo (Berita Kelima).....	54
Tabel 3. 6 Frame Berita Tempo (Berita Keenam)	58
Tabel 3. 7 Frame Berita Gatra (Berita Pertama)	62
Tabel 3. 8 Frame Berita Gatra (Berita Kedua).....	65
Tabel 3. 9 Frame Berita Gatra (Berita Ketiga)	69
Tabel 3. 10 Frame Berita Gatra (Berita Keempat).....	73
Tabel 3. 11 Frame Berita Gatra (Berita Kelima)	77
Tabel 4. 1 Perbedaan Frame Tempo dengan Gatra.....	93

ABSTRAK

Meigitaria Sanita. 14321109. HANTU PKI DAN UJUNG REKONSILIASI (Analisis Framing Pemberitaan PKI Era Presiden Abdurrahman Wahid dan Joko Widodo pada Majalah Tempo dan Gatra). Skripsi Sarjana. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. 2018

Pemberitaan isu kebangkitan PKI dan upaya rekonsiliasi selalu muncul setiap tahun dimedia massa. Pro dan kontra selalu timbul sebagai reaksi publik mengingat propaganda Orde Baru mengenai PKI adalah musuh Negara dan partai terlarang. Tulisan ini menjelaskan bagaimana konstruksi dan framing media *Tempo* dan *Gatra* dalam menanggapi isu kebangkitan PKI dan rekonsiliasi pada keluarga mantan PKI dan korban dari ketidakadilan secara HAM dan Hukum. Pemilihan objek berita difokuskan berdasarkan masa kepemimpinan presiden tertentu. Dalam hal ini era presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Joko Widodo (Jokowi). Pertimbangan pemilihan karena fenomena yang terjadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Gus Dur memiliki usulan kebijakan bersebrangan dalam memandang sejarah PKI terkait ketetapan MPRS no 25 tahun 1966 dengan alasan keadilan dan hak asasi manusia dan rekonsiliasi, sedangkan pada era Jokowi munculnya upaya rekonsiliasi forum 65 melalui diskusi pelurusan sejarah hingga muncul reaksi dari pihak TNI AD yang menayangkan ulang film Pengkhianatan G30S/PKI. Sedangkan pemilihan media berdasarkan kedekatan sejarah diantara kedua media. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing Enmant untuk mengetahui tawaran solusi dan sikap media dalam menanggapi isu PKI. Dalam tulisan ini *Tempo* cenderung berpihak kepada korban PKI dan mendukung upaya rekonsiliasi serta menganggap bahwa PKI sengaja dihantukan Orde Baru. Sedangkan *Gatra* cenderung berimbang dan memandang sejarah PKI menjadi traumatik sejarah pada masyarakat, sehingga sikap *Gatra* adalah rekonsiliasi dilakukan secara alami

Kata Kunci: PKI, Analisis Framing, Konstruksi, Rekonsiliasi

ABSTRACT

Meigitaria Sanita. 14321109. PKI GHOST AND THE END OF RECONCILIATION (Framing Analysis On The News PKI Era President Abdurrahman Wahid and Joko Widodo On Magazine Tempo and Gatra). Undergraduate Thesis. Program Study of Communication Faculty of Psychology and Social Culture, Islamic University of Indonesia. 2018

News of PKI awakening and reconciliation efforts always appear every year in the mass media. Pros and cons always arise as a public reaction, given the propaganda of the Orde Baru of the PKI is the enemy of the state and the forbidden party. This research explains how the construction and framing of media tempo and gatra in response to the issue of the revival of the PKI and reconciliation was the family of former PKI and victims of justice by human rights and law. The selection of a news object focused on a certain presidential term of leadership. In this case the era of president Gus Dur and Jokowi. Election consideration because the phenomenon that occurs is different from previous years. Gus Dur had an opposite policy proposal in view of the PKI's history of MPRS Decree No. 25 of 1966 on grounds of justice and human rights and reconciliation. while in the era of Jokowi the emergence of forum reconciliation efforts 65 through the discussion of history alignment until the reaction came from the army that repeated the film Pengkhianatan G30S / PKI. While the media selection based on historical closeness between the two media. This research uses Enmant framing analysis method to find out the solution offer and the attitude of media in responding to PKI issue. In this paper Tempo tended to side with the PKI victims and support the reconciliation efforts and assume that the PKI was deliberately conjoined the New Order. While Gatra tend to be balanced and look at the history of the PKI became traumatic history on society, so the attitude Gatra is reconciliation done naturally.

Keywords: PKI, Framing Analysis, Construction, Reconsiliation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberitaan politik pada dasarnya memiliki kerumitan yang cukup tinggi dibanding dengan pemberitaan lainnya. Hal tersebut terjadi karena dalam pemberitaan politik terdapat pembentukan opini publik sehingga berpengaruh terhadap sikap audiens karena tujuan pemberitaan politik cenderung pada pembentukan pendapat umum.¹ Di Indonesia seringkali terjadi demikian, media dengan mudah menggiring publik kearah yang diinginkan berdasarkan tujuan melalui pemberitaan-pemberitaan dengan framing yang telah dikonstruksi. Pada dasarnya, media selalu menceritakan dan mengkonstruksi atau membentuk berita yang akan disiarkan. Sensitivitas masyarakat Indonesia mengenai pemberitaan PKI terjadi karena pada masa orde baru PKI dianggap sebagai musuh negara.

Ketika Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Indonesia salah satu kebijakan yang menghebohkan beberapa kalangan adalah rencana Gus Dur (sapaan Presiden Abdurrahman Wahid) untuk mencabut TAP MPR no 25 tahun 1966 tentang PKI walaupun kebijakannya dinilai kontroversi dan terkesan membela PKI oleh berbagai pihak. Gus Dur meyakini bahwa rencananya sesuai dengan undang-undang Dasar 1945.² Alasan Gus Dur mengenai rencananya tersebut mencakup tiga aspek. Pertama, mengenai konsep marxisme sudah dipelajari secara terbuka di perguruan tinggi. Kedua, era komunis sudah berakhir, dan yang ketiga mengenai keberlangsungan masa depan bangsa bahwa dendam sejarah harus segera

¹ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, (Jakarta: Penerbit Granit, 2004) hal 2

² Tim Penulis Kick Andy, *Kumpulan Kisah Inspiratif 2*, (Yogyakarta: Bentang, 2011), hal. 162

disingkirkan.³ Selain itu, juga kebenaran sejarah mengenai keterlibatan PKI dalam pembunuhan enam perwira pada 30 september 1965 dimana pada masa kekuasaan Soeharto diklaim secara sosial diyakini menjadi sebuah kebenaran perlu diperiksa ulang.⁴

Rencana Gus Dur mendapat penolakan keras dari fraksi MPR yang kala itu Amien Rais menjadi ketuanya. Gagasan Gus Dur dianggap sebagai tindakan yang membahayakan dan mengganggu stabilitas nasional dan dinilai bertentangan dengan dasar negara yaitu Pancasila. Selain dari fraksi MPR, penolakan sikap juga dilakukan oleh pihak PBNU kala itu, Hasyim Muzadi. Walaupun demikian pihak partai PKB, golongan pemuda serta aktivis HAM dan lingkungan perguruan tinggi setuju dengan rencana pencabutan TAP MPR no 25 tahun 1966.

Selain menguat isu PKI dimasa kepemimpinan Gus Dur, PKI juga hangat dibicarakan ketika kepemimpinan Jokowi (panggilan akrab presiden Joko Widodo). Terbukti ketika Jokowi akan maju menjadi calon presiden terdapat dugaan bahwa Jokowi adalah keturunan PKI bahkan disebut-sebut akan memaafkan PKI namun kenyataannya isu tersebut masih bisa teratasi dan tidak menghalangi langkah Jokowi untuk menjadi pilihan masyarakat.

Selanjutnya, dipertengahan 2016 isu PKI kembali mencuat ketika FPI datang ke kampus ISBI (Institut Seni Budaya) Bandung. Hal tersebut dipicu karena adanya program akademik yang mendalami filsafat Karl Marx.⁵ Serta ketakutan beberapa kelompok masyarakat jika PKI akan bangkit kembali dengan alasan untuk menutupi kegagalan Jokowi memimpin pemerintahan Indonesia.

³ Pandangan Islam Tentang Marxisme-Leninisme, "http://www.nu.or.id/post/read/58136/pandangan-islam-tentang-marxisme-leninisme" diakses pada 15 Maret 2017

⁴ Budiawan, *Mematahkan Pewarisan Ingatan (Wacana Anti Komunis dan politik rekonsiliasi pasca soeharto)*, (Jakarta: Penerbit ELSAM, 2004), hal 2.

⁵ Ging Ginanjar, Mengapa ada kecurigaan dan ketakutan akan bangkitnya PKI?, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160510_indonesia_histeria_anti_komunis. (diakses pada 16 Maret 2017)

Selanjutnya, pada awal 2017 kemunculan isu PKI kembali menguat dimana buku yang ditulis oleh Bambang Tri Mulyono dengan judul “Jokowi Undercover” beredar luas dimasyarakat bahwa konten dalam buku tersebut adalah tuduhan mengenai pemalsuan identitas Jokowi dan bagaimana hubungan kekerabatan Jokowi dengan PKI. Kemunculan buku tersebut menjadi polemik nyatanya masyarakat juga masih membentuk pengelompokan antara pro dan kontra dengan apa yang ditulis dalam buku tersebut. Buku tersebut dapat menyebar secara luas karena menggunakan pemasaran berbasis media sosial. Dan pada akhirnya Bambang Tri Mulyono terbukti sebagai tersangka dan ditangkap karena telah melakukan pelanggaran UU informasi dan transaksi elektronik UU Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45 huruf a ayat 2 jo Pasal 28 UU Ayat 2 Nomor 11 Tahun 2008 berkaitan dengan menebarkan kebohongan atau rasa kebencian pada kelompok masyarakat tertentu.⁶ Dan terakhir Oktober 2017 ketika forum 65 yang berasal dari keluarga mantan PKI dan korban PKI melakukan diskusi pelurusan yang berujung demonstrasi hingga akhirnya TNI AD memberi reaksi dengan memutar kembali film *Pengkhianatan G30S PKI*.

Realitas pada sebuah berita dibentuk dan dikonstruksikan melalui pendekatan framing, mengenai aspek-aspek yang akan ditonjolkan dalam sebuah berita.⁷ Konstruksi PKI diidentikkan dengan musuh negara juga karena aspek-aspek kekejaman PKI kepada Negara Indonesia saat itu sehingga masyarakat akan selalu mengingat bahwa PKI memang musuh negara yang harus disingkirkan.

PKI, Partai Komunis Indonesia diidentikkan sebagai musuh negara kala orde baru berlangsung dengan kepemimpinan Presiden Soeharto. Masa orde baru menjadi masa dimana hal-hal yang berbau PKI begitu

⁶ Bambang Pasarkan Buku Jokowi Undercover Lewat Facebook, <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/01/03/063832213/bambang-pasarkan-buku-jokowi-undercover-lewat-akun-facebook> (diakses pada 25 April 2017)

⁷ Eryanto, *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, (Yogyakarta:Penerbit LKis, 2002), hal 66

dihindari dan dilarang. Ideologi mengenai komunis, marxisme, leninisme tidak boleh dikaji walaupun sebagai kajian akademis seperti yang telah dijelaskan pada TAP MPR RI no 25 tahun 1966. Komunis digambarkan tidak sesuai dengan Pancasila dimana Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Selain itu dijelaskan bahwa PKI atau Partai Komunis Indonesia dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

Kebebasan pers untuk menyiarkan berita sangat dibatasi. Pada masa Orde Baru mengingat saat itu pers masih dibawah Departemen Penerangan sehingga pers hanya digunakan sebagai komunikator pemerintahan kepada rakyat bukan menyuarakan aspirasi rakyat kepada pemerintah, komunikasi politik yang dibangun bersifat top – down. Saat itu, pembredelan media sangat biasa terjadi ketika lembaga pers dianggap membahayakan kekuasaan pemerintah saat itu.⁸ Berbeda dengan masa reformasi UU Pers no 40 tahun 1999 Dewan Pers adalah lembaga independen dan sebelumnya ditahun 1998 pembredelan sudah ditiadakan sesuai dengan Permenpen No 01/per/menpen/1998. Pada masa reformasi, kontrol negara terhadap politik dan pers menjadi longgar sehingga pemberitaan mengenai politik bersifat partisan.⁹

Tidak dapat dipungkiri media kala itu juga menyiarkan dan mengawal mengenai kebijakan yang dianggap kontroversial itu. Salah satunya yang cukup menarik datang dari *Tempo*, edisi 16 April 2000 dengan judul “PKI, Hantu atau dihantukan?” dalam laporan tersebut *Tempo* bersimpati kepada mantan PKI dan menegaskan bahwa keturunan mantan PKI menjadi korban diskriminasi dan penindasan pada era Orde Baru.¹⁰ Ketika media lain justru menganggap Gus Dur tidak kredibel dan hal negatif *Tempo* seolah memberi angin segar terhadap rencana Gus Dur yang kontroversi. Selain itu ada beberapa berita yang cukup menarik

⁸ Sukri Abdurachman, *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2003), hal. 388-414

⁹ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, (Jakarta: Penerbit Granit, 2004), hal. 4

¹⁰ Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, (Yogyakarta: LKis, 2001), hal. 141-142

ketika kepemimpinan Jokowi *Tempo* mengangkat judul “Atribut PKI muncul Lagi, Cuma Gaya-Gayaan?” disatu sisi terdapat pihak yang khawatir dan pihak lain merasa hal tersebut buang-buang waktu. Edisi 22 Mei 2016 *Tempo* mengangkat judul “Fobia Hantu Komunisme” yaitu ketakutan atas bangkitnya partai komunis dimana saat itu bertepatan dengan simposium nasional “Membedah Tragedi 1965”. Hal tersebut menggambarkan bagaimana TNI, Polri, Kejaksaan Agung serta badan Intelejen Negara mengamankan berbagai hal yang berbau komunis. Hal tersebut juga didukung oleh kementerian pertahanan untuk menciptakan isu tandingan untuk menenggelamkan pemberitaan yang syarat akan kepentingan.

Sementara pada majalah *Gatra* pada edisi 8 April 2000 mengangkat berita dengan judul “Dagang Palu Arit” dalam laporan yang ditulis *Gatra* mengenai penolakan keras dari beberapa kalangan mengenai rencana kebijakan Gus Dur dalam pencabutan TAP MPRS no 25 Tahun 1966. Penolakan keras dilakukan oleh demonstran dari pergerakan islam untuk tanah air dengan membakar bendera dengan symbol PKI di istana presiden. Penolakan yang dihimpun oleh *Gatra* berasal dari Kiai NU dan beberapa partai. Penulisan tersebut ditekankan bahwa ketidaktepatan kebijakan yang dilakukan oleh Gus Dur mengingat bahwa tugas pencabutan tersebut dianggap sebagai kewenangan MPR bukan presiden. Dari laporan penulisan tersebut *Gatra* cenderung menitikberatkan pada ketidaksetujuan mengenai kebijakan tersebut.

Alasan pemilihan pemberitaan PKI sebagai objek analisis karena beberapa faktor. Pertama berita PKI selalu muncul setiap tahun dan selalu menjadi kegelisahan yang sama oleh publik. Kedua, berita PKI seringkali dianggap sebagai isu perpecahan mengiringi pergantian pemimpin. Ketiga, upaya rekonsiliasi yang diajukan oleh mantan keluarga korban PKI yang menuntut keadilan namun tidak kunjung terealisasi. Pertimbangan pemilihan media majalah *Tempo* dan majalah *Gatra* Adalah, bagaimana majalah *Tempo* dan *Gatra* mempunyai kredibilitas dalam pemberitaan isu

politik. Selain itu mengenai sejarah berdirinya *Gatra* yang tak lepas dari faktor politik. *Gatra* terbit pada tahun 1994 dan terbit setiap minggu, *Gatra* berdiri karena adanya sebuah polemik yang cukup kontroversi yaitu pembredelan majalah *Tempo* oleh pemerintahan orde baru. Anggota yang kontra terhadap Orde Baru tetap bertahan di majalah *Tempo* sedangkan yang pro mendirikan majalah *Gatra*. Selain itu majalah *Tempo* dan *Gatra* dianggap cukup seimbang dari segi durasi penerbitan serta kemiripan rubrik yang sama-sama sering membahas mengenai pemberitaan politik.

Dari uraian diatas maka peneliti ingin mengetahui dan Mencari tahu bagaimana konstruksi PKI pada masa kepresidenan Gus Dur dan Jokowi serta framing pemberitaan mengenai isu PKI pada masa kepresidenan Gus Dur dan Jokowi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi media terhadap berita PKI pada kepemimpinan presiden Gus Dur dan presiden Jokowi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mencari tahu bagaimana media mengkonstruksikan PKI pada kepemimpinan presiden Gus Dur dan presiden Jokowi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Yaitu dalam bidang akademis, terutama pengetahuan masyarakat mengenai fenomena politik Indonesia, pengetahuan akan sejarah serta sebagai referensi penulisan dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Agar masyarakat lebih bijak memaknai pemberitaan khususnya dalam ranah fenomena politik serta bagaimana berfikir lebih luas dengan isu PKI yang begitu sensitif untuk masyarakat Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang akan mendeskripsikan secara singkat bagaimana penelitian terdahulu yang memiliki tipikal sama mendukung proses dari penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaan tipikal yang dianggap sama adalah berdasarkan tema ataupun objek. Selain menunjang proses penelitian juga sekaligus mengetahui bahwa judul yang diambil oleh peneliti belum pernah diteliti sebelumnya.

Penelitian lain yang memiliki kesamaan tema adalah jurnal yang ditulis oleh Dede Supriyatno dan Adolfo Eko Setyanto Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret dengan judul "*Representasi Citra militer Dalam Pemberitaan Majalah Tempo (Analisis Wacana Citra Militer Pada Pemberitaan Majalah Tempo Liputan Khusus Pengakuan Algojo 1965 Edisi 1-7 Oktober 2012)*". Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh penerbitan berita di majalah *Tempo* mengenai pengakuan algojo, dimana berita tersebut memiliki angel yang berbeda, sensitif dan tentunya saat itu belum ada pemberitaan yang mengambil angel tersebut. Fokus dalam penulisan jurnal tersebut adalah citra militer di level teks dengan menggunakan metode analisis wacana model Teun A. Van Dijk.

Hasil dari penulisan jurnal tersebut adalah citra militer saat itu sangat buruk karena militer dianggap kejam atas perannya yaitu fasilitator dan algojo pembantaian terbukti dengan tindakan yang menyebar propaganda negatif dan menciptakan mekanisme pembantaian mengenai pihak yang tertuduh menjadi anggota PKI. Penulisan berita *Tempo* juga dijadikan sebagai tindakan menolak lupa tentang sejarah serta harapan rekonsiliasi nasional dan ada pengadilan untuk menyelesaikan kasus tersebut. PKI dicitrakan sebagai kalangan yang harus disingkirkan, pandangan negatif pada masyarakat muncul karena propaganda-propaganda yang dilakukan oleh militer. Propaganda yang dilakukan militer dapat menciptakan wacana tertentu karena sifat militer yang berkuasa dan persuasif. Militer juga memiliki akses kebijakan dwifungsi

ABRI. Kebijakan tersebut digunakan untuk melanggengkan kekuasaan orde baru.¹¹

Selanjutnya Jurnal International Memory Studies dari ETD UGM. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan analisis framing pada media *Tempo* yaitu untuk mengetahui pergeseran konstruksi pada berita retropektif dan reformasi. Mengingat bahwa PKI dan komunisme memiliki stigma negatif melalui berbagai strategi politik budaya. Pada penulisan jurnal tersebut membahas mengenai hubungan konstruksi berita dengan ideologi media. Fokus pada penelitian ini adalah analisis teks berita retropektif majalah *Tempo* pada Orde Baru dan Reformasi.

Hasil dari penelitian tersebut menggambarkan konstruksi ideologi dan frame mengenai peristiwa 1965 hingga 1966 tentang hukuman tanpa pengadilan bagi kelompok yang dituduh sebagai simpatisan ataupun anggota PKI saat itu. Teori yang digunakan adalah memori kolektif, teori media dan jurnalisme, teori hegemoni ideologi dan framing media.¹²

Selanjutnya jurnal Social Science Vol , No 3 2013 yang ditulis Oleh Baabe, Aspen Raemano dkk Universitas Negeri Manado yang berjudul “*Keterlibatan Partai Komunis Indonesia (PKI) Dalam Pemerintahan Hasil Pemilu Pertama 1955-1959*” penelitian tersebut menjelaskan mengenai sistem politik yang dianut bangsa Indonesia diawal kemerdekaan, sistem dasar pembentukan partai salah satunya partai komunis di indonesiaserta bagaimana keterlibatan PKI pada penyelenggaraan pemerintahan tahun 1955. Metode yang digunakan adalah metode sejarah menurut March Bloch.

Hasil penelitian tersebut adalah sistem politik yang dianut terlihat pada kebijakan yang diterapkan presiden Soekarno yang bersifat dominan. Pemimpin besar revolusi merupakan perwujudan dari sila keempat maka

¹¹ Dede Supriyatno dan Adolfo Eko Setyanto, Jurnal Universitas Sebelas Maret. “*Representasi Citra militer Dalam Pemberitaan Majalah Tempo (Analisis Wacana Citra Militer Pada Pemberitaan Majalah Tempo Liputan Khusus Pengakuan Algojo 1965 Edisi 1-7 Oktober 2012)*” Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

¹² Jurnal International Memory studies dari ETD UGM, etd.repository.ugm.ac.id diakses pada 15 Mei 2017

muncullah masa demokrasi terpimpin. Pada saat itu PKI memiliki peran politik yaitu mengakomodasi persekutuan konsepsi yang sedang marak di Indonesia kala itu, yaitu antara ideologi nasionalisme, agama (Islam) dan komunisme yang dinamakan NASAKOM dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia tahun 1955.¹³

Terakhir adalah jurnal *Historia*, jurnal Pendidikan sejarah No.1 tahun 2000 hal 62-71 yang ditulis oleh Andi Suwirta "*Mengkritisasi Peristiwa G30S 1965: Dominasi Wacana Sejarah Orde Baru Dalam Sorotan*" tulisan tersebut membahas bagaimana penulisan sejarah di Indonesia kontemporer khususnya Orde Baru yaitu 1968 hingga 1998 cenderung didominasi penguasa Negara. Sangat sulit bagi masyarakat mendialogkan pemikiran kritis pada wacana publik sehingga materi sejarah dianggap sebagai "*sejarahnya orang yang sedang berkuasa*".¹⁴

Pada penulisan jurnal tersebut membahas mengenai peristiwa sejarah Indonesia yang kontroversi yaitu peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S 1965. Hal ini dianggap penting karena beberapa dokumen penting dan rahasia mengenai G30S 1965 belum terbuka bagi siapa saja yang memaknai dan memahami peristiwa sesuai dengan cara pandangnya.¹⁵ Pembahasan cukup panjang dalam sub judul mengenai *Versi Dominan dan versi Tandingan* pertama mengenai pemikiran yang seragam dalam pemaknaan peristiwa G30S 1965. Pernyataan tersebut dibantah dengan fakta bahwa PKI bukan satu-satunya dalang atas peristiwa tersebut. Fakta tersebut diperoleh dari beberapa sumber *pertama*, versi dari akademisi universitas Cornell Amerika Serikat yang menyatakan bahwa peristiwa G30S 1965 adalah masalah internal pada AD, khususnya kelompok militer yang berasal dari divisi Diponegoro. *Kedua*, versi

¹³ Baabe, Aspen Raemano dkk, "*Keterlibatan Partai Komunis Indonesia (PKI) Dalam Pemerintahan Hasil Pemilu Pertama 1955-1959*" Jurnal Social Science Vol , No 3 2013, Universitas Negeri Manado.

¹⁴ Andi Suwirta, *Mengkritisasi Peristiwa G30S 1965: Dominasi Wacana sejarah Orde Baru Dalam Sorotan*, Jurnal *Historia: jurnal Pendidikan Sejarah*, No.1 tahun 2000 Hal .62-71

¹⁵ Andi Suwirta, *Mengkritisasi Peristiwa G30S 1965: Dominasi Wacana sejarah Orde Baru Dalam Sorotan*, Jurnal *Historia: jurnal Pendidikan Sejarah*, No.1 tahun 2000 Hal .62-71

sejarawan barat, Antonie C.A. Dake, yang menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan dalang utama peristiwa tersebut Presiden Soekarno sendiri. *Ketiga*, versi sosiolog dan sejarawan Belanda, W.F. Wertheim, menyatakan dalang peristiwa tersebut adalah jenderal Soeharto. *Keempat*, versi mantan intelejen Amerika Serikat, Peter Dale Scott yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut pada saat menjatuhkan presiden Soekarno didalangi CIA.¹⁶

Dari kelima penelitian yang membahas mengenai PKI jika dibandingkan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ada perbedaan yang dianggap sebagai kebaruan terletak pada objek yang akan diteliti. Sebagian besar penelitian sebelumnya membahas bagaimana konstruksi buruk yang ditujukan pada PKI dan konstruksi baik pada Pemerintahan, selain itu juga selalu mengacu pada orde baru. sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan, bahwa akan membahas bagaimana PKI dikonstruksi di dua masa kepemimpinan presiden yang berbeda dan semua objek pada masa reformasi.

F. Kerangka Teori

1. Konstruksi Realitas Sosial

Peter Berger dan Luckman memperkenalkan gagasan konstruksi realitas sosial dalam bukunya yang berjudul *The Social Construction of Reality*, menyatakan bahwa pemahaman manusia terhadap sesuatu terjadi karena adanya komunikasi yang tercipta antara manusia itu sendiri dengan yang lain karena proses sosial digambarkan melalui perilaku dan tindakan serta interaksi.¹⁷ Seperti halnya yang disampaikan Littlejohn realitas sosial berasal dari konstruksi sosial yang tercipta dari komunikasi tertentu.¹⁸ Konstruksi realitas prinsipnya adalah konseptualisasi dari sebuah

¹⁶ Andi Suwarta, *Mengkritisi Peristiwa G30S 1965: Dominasi Wacana sejarah Orde Baru Dalam Sorotan*, Jurnal Historia: jurnal Pendidikan Sejarah, No.1 tahun 2000 Hal .62-71

¹⁷ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, (Kencana Prenada Media, Jakarta: 2008), hal. 13

¹⁸ Stephen W. Littlejohn, *Theories Of Human Communication*, edisi 7 (USA : Wadsworth Publishing, 2001), hal. 175-176

peristiwa ataupun keadaan yang berkaitan dengan politik. Faktanya pekerjaan media adalah menceritakan peristiwa sehingga kesibukan dari media tentu saja mengkonstruksi berbagai realitas yang diliput dan kemudian disiarkan. Realitas yang dikonstruksi disusun hingga terbentuk sebuah cerita dan wacana bermakna.¹⁹

Dasar dari pemikiran konstruksionisme sosial yang dijelaskan Berger adalah pemahaman dan perilaku seseorang untuk membedakan sebuah objek yang mengandalkan bahasa untuk memberikan sebutan-sebutan objek tertentu.²⁰

Bahasa menjadi unsur utama dalam proses konstruksi realitas karena bahasa menjadi instrument yang digunakan untuk menceritakan sebuah realitas.²¹ Bahasa tidak hanya sebagai alat untuk menggambarkan realitas namun bahasa yang menentukan makna dan citra yang akan mempengaruhi khalayak.²² Cara yang digunakan media untuk mempengaruhi bahasa dan makna adalah, pertama mengembangkan kata-kata yang baru dengan makna asosiatifnya, kedua memperluas makna dari istilah, ketiga mengganti makna yang sudah ada dengan makna baru, terakhir memantapkan makna yang ada dalam sistem bahasa.²³

Penggunaan bahasa sangat berimplikasi terhadap bentuk konstruksi realitas dan makna yang ada didalamnya. Hal tersebut terjadi karena pemilihan kata dan cara penyajian struktur konstruksi realitas.

¹⁹ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, (Jakarta: Penerbit Granit, 2004), hal 11

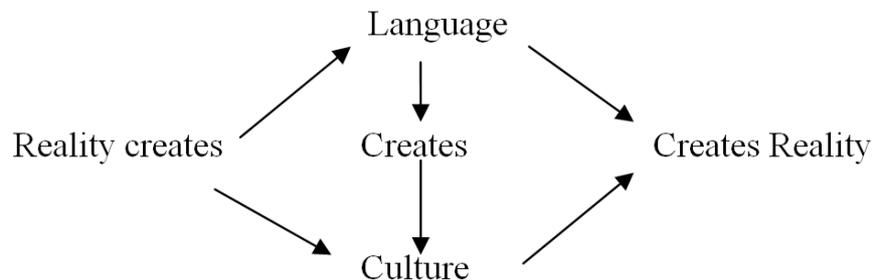
²⁰ Fathurin Zen, *NU Politik: Analisis Wacana Media* (Yogyakarta: LkiS, 2004), Hal. 52

²¹ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, (Penerbit Granit, Jakarta: 2004), hal 12

²² Ibid, 12

²³ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, (Jakarta: Penerbit Granit, 2004), hal. 12

**Berikut Hubungan Antara Bahasa, Realitas Dan Budaya
(Christian and Christian, 1996)²⁴**



Tentunya dalam mengkonstruksi media memiliki strategi tertentu, terdapat tiga tindakan utama untuk melakukan konstruksi yaitu pemilihan simbol atau fungsi bahasa, pemilihan fakta yang akan disajikan atau strategi framing dan kesediaan memberi tempat atau agenda setting.²⁵

Selanjutnya mengenai pendekatan pada konstruksi realitas yang terjadi secara simultan antara individu dan masyarakat melalui tiga proses yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Berikut penjelasannya.²⁶ *Eksternalisasi*, atau disebut sebagai penyesuaian diri merupakan aspek eksternal yang berasal dari diri seseorang, penekanan terletak pada keharusan antropologis yang berasal dari biologis seseorang. Sehingga manusia harus selalu mengeksternalisasikan dirinya dalam lingkungannya melalui aktivitas.²⁷ *Objektivasi*, tahap ini terjadi pada dunia intersubjektif masyarakat yang dilembagakan. Produk sosial dalam tahap ini berada pada institusionalisasi dan seseorang memanasifestasikan dirinya pada kegiatan yang sudah ada. Proses ini berlangsung lama hingga melampaui batas tatap muka dan dipahami secara langsung.²⁸ *Internalisasi*, secara umum tahap ini

²⁴ Ibid. 13

²⁵ Ibid, 16

²⁶ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2007), Hal. 202

²⁷ Ibid, 193

²⁸ Ibid, 194

diartikan sebagai pemahaman *sesama saya* artinya pemahaman seseorang dan orang lain serta bagaimana pemahaman mengenai dunia yang dimaknai dari kenyataan sosial.²⁹

Media mengkonstruksi realitas dalam bentuk teks. Bahasa menjadi elemen pokok untuk membentuk teks. Bahasa dapat menggambarkan segala informasi, hiburan yang akan disampaikan kepada khalayak.

Terdapat beberapa tahap dalam konstruksi sosial³⁰

a. *Tahap menyiapkan materi konstruksi*

Terdapat tiga hal penting dalam penyiapan materi konstruksi. *Pertama*, keberpihakan media terhadap kapitalisme maksudnya adalah kekuatan-kekuatan kapital memanfaatkan media untuk dijadikan untuk mendapatkan modal. *Kedua*, keberpihakan semu kepada masyarakat artinya, menampilkan sikap yang terlihat sedang bersimpati, empati, dan partisipasi kepada masyarakat. *Ketiga*, keberpihakan kepada kepentingan umum. Pada dasarnya hal tersebut merupakan visi media massa namun kenyataanya tidak menunjukkan jati dirinya tetapi masih saja visi tersebut disiarkan.³¹

b. *Tahap sebaran Konstruksi*

Percepatan penyampaian informasi kepada khalayak merupakan prinsip dari sebaran konstruksi selain cepat juga tepat dan sesuai dengan jadwal dan agenda yang ditentukan media. Sehingga informasi yang dianggap penting oleh media maka kan menjadi penting juga untuk khalayak.³²

c. *Pembentukan konstruksi realitas*

²⁹ Ibid, 197-198

³⁰ Ibid, 204-212

³¹ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2007), Hal 204-212

³² Ibid, 204-212

Dalam tahap ini terdapat dua aspek utama pertama pembentukan konstruksi realitas itu sendiri dan kedua pembentukan konstruksi citra. Pembentukan konstruksi realitas terbentuk setelah terjadinya sebaran konstruksi pada tahap tersebut informasi dan pemberitaan telah sampai pada khalayak dan terjadi pembentukan konstruksi melalui tiga tahap dan berlangsung secara generik. Pertama konstruksi realitas pembenaran, kedua kesediaan dikonstruksi oleh media massa dan ketiga sebagai pilihan konsumtif.³³

Setelah terjadi pembentukan konstruksi realitas selanjutnya adalah pembentukan konstruksi citra. Sebenarnya pembentukan konstruksi citra merupakan tujuan dari konstruksi realitas. Bagaimana citra dibangun media massa dengan dua model. Pertama model good news dan kedua model bad news.³⁴

d. Tahap konfirmasi

Ketika media dan khalayak saling memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap informasi yang telah dipilih untuk saling terlibat dalam pembentukan konstruksi. Untuk media tahapan ini digunakan memberi argumentasi terhadap alasan konstruksi sosial. Sedangkan pada pihak khalayak untuk menjelaskan alasan keterlibatan dalam proses konstruksi.³⁵

2. Ideologi Media

Secara umum ideologi diartikan sebagai pandangan mengenai dunia, kepercayaan serta nilai. Ideologi dapat diperluas lagi bahwa ideologi tidak hanya tentang kepercayaan yang berkaitan dengan apa yang ada didalam dunia namun tentang apa definisi dari dunia ideology juga sebagai pengontrol msyarakat untuk tetap berada pada keadaan kesadaran palsu tentang siapa

³³ Ibid, 204-212

³⁴ Ibid, 204-212

³⁵ Ibid, 204-212

dirinya, hubungan dengan masyarakat lain, pengertian tentang pengalaman social yang terbentuk dari lingkungan kita tinggal.³⁶

Raymond Williams (1997) memaparkan tiga penggunaan ideologi. *Pertama*, sebagai sistem karakteristik kepercayaan dari suatu kelas ataupun golongan. Tipe penggunaan pertama lebih mengacu pada konteks psikologis. Ideologi lebih mengacu pada bagaimana di organisasi pada pola koheren.³⁷ *Kedua*, ideologi sebagai sistem kepercayaan palsu ide kesadaran palsu yang dapat dikontraskan dengan kebenaran atau pengetahuan ilmiah, artinya secara alamiah ideologi merupakan kategori ilusi dan kesadaran palsu sehingga kelas penguasa dengan segala kekuasaannya melanggengkan dominasinya terhadap kelas pekerja sehingga ideologi dikembangkan dan disebarkan pada masyarakat. Media dari ideologis berada dalam beberapa sistem antara lain pendidikan, hukum, politik, media massa dan penerbitan.³⁸ *Ketiga*, ideologi sebagai proses umum produksi makna dan ide, menurut Barthes ketika berbicara tentang pelaku konotasi maka terdapat penanda dalam konotasi tersebut sehingga hal konotasi tersebut disebut sebagai "*retorika dari ideology*". Mitos dan nilai yang dikonotasikan muncul karena ideologi dapat dimanifestasikan.³⁹

Marx menjelaskan tentang ideologi sebagai konsep yang sederhana yaitu alat yang berupa pemikiran dari kelas penguasa yang digunakan untuk mempengaruhi sehingga dapat diterima secara alami dan normal. Anggota yang terdominasi adalah kelas pekerja.⁴⁰ Marx juga berargumen bahwa ideologi yang diproduksi akan menciptakan kesadaran palsu, munculnya konsep tersebut

³⁶ John Fiske, *Cultural and Communication: Sebuah Pengantar Paling Komperhensif*, (Yogyakarta: Jalasutra, 1990), hal. 239

³⁷ Ibid, 269

³⁸ Ibid, 270

³⁹ Ibid, 271

⁴⁰ Ibid, 280-281

untuk menjelaskan kenapa mayoritas yang berada di lingkungan kapitalis menerima sistem yang tidak menguntungkan.⁴¹

Teori kesadaran palsu dari Marx dikembangkan oleh Althusser. Pada konteks ini tetap mempertahankan pada pemeliharaan kekuasaan dari minoritas yang menggunakan cara tanpa kekerasan. Selanjutnya, Gramsci mengenalkan istilah hegemoni, dua hal yang ditekankan pada hegemoni adalah resistensi dan ketidakstabilan.⁴²

Hegemoni berasal dari pengalaman sosial kelompok yang telah didominasi dengan konstan. Dimana dominasi tersebut berupa ideology dan berhubungan dengan sosial mereka. Kunci dari hegemoni adalah konstruksi *akal sehat*.⁴³

Shoemaker dan Reese memandang ideologi sebagai faktor yang memberikan pengaruh pada isi media karena ideologi sebagai mekanisme simbolik yang memiliki kekuatan mengikat masyarakat. Ideologi menekankan pada siapa yang memiliki kepentingan dan bagaimana rutinitas organisasi media tersebut berjalan.⁴⁴ Dengan demikian media merupakan perpanjangan tangan dari kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan dan kekuatan di lingkungan masyarakat.⁴⁵

Jika dihubungkan dengan media massa maka mengacu pada kecenderungan media massa dalam memproduksi informasi yang akan disiarkan kepada khalayak, dalam konsep yang disampaikan Shoemaker dan Reese disebut dengan *Hierarchy of influence*

⁴¹ Ibid, 283

⁴² Ibid, 286

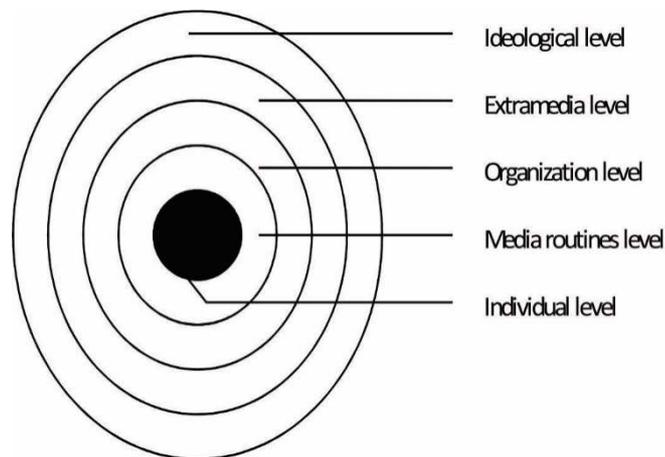
⁴³ Ibid, 287

⁴⁴ Shoemaker dan Reese, *Mediating The Message: Theories Of Influence On Mass Media Content*, (New York: Longman Publisher, 1996), hal. 223

⁴⁵ Ibid, 229

konsep tersebut menjelaskan lapisan-lapisan yang mempengaruhi isi media. Gambarnya sebagai berikut: ⁴⁶

“Hierarchy Of Influence” Shoemaker & Reese



Jika dilihat dari gambar diatas maka, ideologi memiliki pengaruh yang paling besar dan menyeluruh. Ideologi merupakan mekanisme simbolik yang memiliki kekuatan dan mampu mempersatukan masyarakat.⁴⁷

Media massa tidak akan bisa dipisahkan dengan kepentingan dengan kelompok yang berada dibelakangnya, terutama dalam hal transformasi isi informasi. Kepentingan yang menjadi acuan utama adalah ekonomi dan kekuasaan.⁴⁸ Kedua hal tersebut yang membuat media tidak bersikap netral dan terbuka.

3. Jurnalisme Sastra

Jurnalisme sastra seringkali diasumsikan sebagai penulisan dengan gaya feature yang tidak kaku dan mendalam. Teknik feature dianggap sebagai penghubung yang kuat mengapa genre

⁴⁶ Alex sobur, Analisis Teks Media: suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Analisis Framin, (Bandung: Remaja rosdakarya, 2006), Hal.138

⁴⁷ Alex sobur, Analisis Teks Media: suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Analisis Framin, (Bandung: Remaja rosdakarya, 2006), Hal 139

⁴⁸ Mahpuddin. 2009. *Ideologi Media Massa dan Pengembangan Civil*. Jurnal Academica Untad. Vol 1, No 2. <http://download.portalgaruda.org/article.php> 191

jurnalisme sastra muncul.⁴⁹ Tipe feature yang mengangkat sisi human interest dan kaya warna cerita dianggap sebagai awal dari munculnya jurnalisme sastra.⁵⁰

Namun banyak yang beranggapan bahwa jurnalisme sastra berbeda dengan feature. Laporan feature biasanya berita soft news sedangkan jurnalisme sastra adalah hasil dari laporan hard news yang dikemas dengan narasi.⁵¹ Sama halnya dengan pandangan yang disampaikan dalam buku *Jurnalisme Sastrawi* Andreas Harsono yang mengatakan bahwa feature lebih hanya sekedar satu periode dan jurnalisme sastra lebih panjang durasi dan kronologinya.

Buku *Jurnalisme Sastrawi* (Antologi Liputan Mendalam dan Memikat) yang dituliskan oleh Andreas Harsono dalam pengantarnya menjelaskan bahwa jurnalisme sastra bukan sebuah reportase yang ditulis secara puitis namun lebih menjelaskan secara mendetail fakta kedalam narasi.⁵² Dalam praktiknya bisa saja narasi dituliskan secara puitis, namun prosa yang puitis belum tentu membentuk narasi.

Selain fakta yang tetap dituliskan secara orisinal dalam jurnalisme sastrawi, kekuatan konflik akan lebih bertahan daya pikatnya.⁵³ Konflik dan sengketa akan menjadi semakin menarik ketika dikemas menjadi sebuah narasi. Ada pergolakan nurani serta interpretasi yang disampaikan penulis melalui media dan membentuk berbagai persepektif oleh pembaca dengan fakta yang sama.

⁴⁹ Septiawan Santana Kurnia, *Jurnalisme Sastra*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal.230

⁵⁰ Nurul Khomariah, Roekhan, dkk, *Penggunaan Unsur Fiksi Dalam Buku Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan mendalam dan Memikat*, jurnal-online.um.ac.id (Diakses 28 Mei 2018)

⁵¹ Shanaz Asnawi Yusuf, *Konstruksi Konflik dalam Jurnalisme Sastrawi*, portalgaruda.org (Diakses, 28 Mei 2018)

⁵² Andreas Harsono, *Jurnalisme Sastrawi* (Antologi Liputan Mendalam dan Memikat), (Jakarta: Kepustakaan Gramedia Populer, 2008), hal.xii

⁵³ *Ibid* xii

Selanjutnya karakter yang ada didalam narasi karena pada dasarnya narasi mengharuskan adanya karakter yang menarik disetiap cerita. Dimana karakter tersebut memiliki kepribadian yang menarik.⁵⁴

Untuk mendalami pemaparan karakter perlu adanya akses. Dalam hal jurnalistik yang dimaksud dengan akses adalah bagaimana bisa mendekati atau memperoleh informasi mengenai karakter tersebut dengan cara wawancara, dokumentasi, korespondensi, buku harian, kawan, bahkan musuh yang menjadi sumber.⁵⁵ Hal itu perlu dilakukan untuk membangun emosi dan pergulatan batin.

Mengenai perjalanan waktu, diasumsikan bahwa ranah waktu menjadi penting. Bagaimana membentuk sebuah kronologi, flashback serta panjang pendek suatu cerita berdasarkan kebutuhan. Diibaratkan narasi adalah film atau video dan feature adalah foto. Artinya perjalanan waktu bisa diputar namun esensi masih utuh.⁵⁶ Terakhir mengenai unsur kebaruan. Dalam hal ini jurnalisme sastra tetap mengemas narasi secara lengkap namun menambah referensi baru dari sumber yang belum pernah digali sebelumnya. Sumber bisa berasal dari saksi dalam peristiwa.⁵⁷

Mengenai perkembangannya di Indonesia, yang telah menerapkan jurnalisme sastra adalah majalah Tempo, Gatra dan Pantau yang ada dibawah ISAI.⁵⁸

4. Framing

Analisis framing secara umum digunakan dalam penelitian teks media. metode pada analisis framing adalah melihat peristiwa

⁵⁴ Ibid xiii

⁵⁵ Ibid xiii

⁵⁶ Ibid, xiv

⁵⁷ Ibid, xiv

⁵⁸ Ibid, xxi

yang diceritakan oleh media.⁵⁹ Penekanan berada pada cara media bercerita atas peristiwa dan bagaimana pbingkaiannya. Framing juga digunakan sebagai penggambaran proses seleksi untuk menonjolkan aspek dari realitas tertentu sehingga penempatan informasi mendapat alokasi yang lebih besar dibandingkan isu yang lain.⁶⁰

Baterson mengungkapkan bahwa framing adalah struktul konseptual atau kepercayaan yang berfungsi untuk mengatur pandangan politik, kebijakan, wacana dimana terdapat standart kategori untuk mengapresiasi realitas.⁶¹

Murray Edelman beranggapan bahwa framing sejajar dengan kategorisasi. Kategori atau pemakaian perspektif tertentu menandakan bagaimana fakta dan realitas dipahami. Kategori dalam konteks pandangan Edelman adalah abstraksi dan fungsi dari pikiran. Sehingga kategori yang dilakukan dapat membantu manusia untuk memahami realitas yang beragam dan tidak beraturan menjadi realitas yang bermakna.⁶²

Secara sosiologis yang disampaikan Goffman analisis framing merupakan kebiasaan mengklasifikasi, mengatur serta memaknai, mengelompokkan pengalaman-pengalaman untuk dipahami,⁶³ sedangkan dalam aspek psikologi framing dapat diketahui dari peletakan informasi yang unik sehingga elemen yang diseleksi menjadi penting dan berpengaruh pada individu untuk mengambil kesimpulan.⁶⁴

⁵⁹Eriyanto, Analisis Framing: konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, (Yogyakarta: LkiS , 2002), hal. 10

⁶⁰Surdiarsis dkk, 1999 20

⁶¹Alex Sobur, Analisa Teks Media : Suatu Pengantar untuk Analisa Wacana, Analisa Srmiotika dan Analisa Eraming, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2002), hal. 162

⁶² Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, ideology, dan Politik Media, (Yogyakarta: LkiS, 2012), hal.186-187

⁶³ Ibid, 163

⁶⁴ Ibid,163

Menurut Pan dan Kosicki, framing adalah strategi dalam mengkonstruksi berita dengan menggunakan perangkat kognisi untuk mengkode informasi, mengartikan peristiwa yang dihubungkan dengan rutinitas pembentukan berita. Hampir sama dengan Goffman, Pan dan Kosicki menyatakan terdapat dua konsep utama pada framing, yaitu konsep psikologi dan sosiologi. Konsep psikologi yang dimaksud adalah bagaimana seseorang menerima, memproses serta mengolah informasi yang ditunjukkan dalam skema tertentu, sedangkan dalam konsep sosiologi adalah bagaimana seseorang mengartikan dengan cara pandangnya, mengklasifikasikan, mengorganisasi berdasarkan pengalaman sosial untuk mengerti dirinya dan realitas yang ada diluar dirinya.⁶⁵

Framing model Robert N. Entman. Analisis framing model ini memiliki dua dimensi utama yaitu pemilihan isu secara selektif dan penekanan pada aspek isu tertentu. Hal tersebut dilakukan untuk menemukan serta menentukan fakta yang akan ditonjolkan maupun yang akan dihilangkan sehingga terlihat jelas arah dari isi informasi tersebut. Konsep analisis framing model Entman mengacu pada empat hal yaitu pemberian definisi, sumber masalah, serta evaluasi dan rekomendasi suatu wacana dan menekankan kerangka berpikir terhadap suatu peristiwa serta membuat keputusan moral.⁶⁶

Pada penelitian ini peneliti, akan menggunakan framing model Robert N. Entman. Framing model Entman menjelaskan mengenai dua dimensi besar dalam teks yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas isu. Pemilihan isu dipandang sebagai penempatan suatu informasi dalam konteks tertentu sehingga isu tersebut mendapatkan alokasi yang lebih besar dibandingkan dengan isu yang lain. Sedangkan

⁶⁵ Ibid, 252-253

⁶⁶Eriyanto, Analisis Framing: konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, (Yogyakarta, LkiS : 2002), Hal 187

penekanan atau penonjolan yang dimaksud bagaimana informasi terlihat jelas, bermakna sehingga mudah diingat publik. Penonjolan tersebut bias dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan penempatan headline, pengulangan, pemakaian grafis, pemakaian label.⁶⁷

Kedua dimensi tersebut menegaskan pemahaman bahwa framing model Entman penulisan berita didasarkan pada perspektif wartawan dalam menyeleksi isu. Dari perspektif tersebut ditentukan fakta yang dipilih dan bagian yang perlu ditonjolkan ataupun dihilangkan.⁶⁸ Dari penjelasan kedua dimensi tersebut konsep framing Entman merujuk pada empat konsep utama dalam menganalisis teks yaitu pemberian definisi, penjelasan masalah atau sumber, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana.⁶⁹

G. Metode Penelitian

1. Paradigma penelitian

Paradigma pada penelitian ini adalah paradigma konstruksionis. Paradigma konstruksionis beranggapan bahwa penulis berita yang menentukan serta mengarahkan pola pikir publik. Hal yang dicari pada paradigma konstruksionis bagaimana sebuah peristiwa dikonstruksi dan dengan cara apa konstruksi dibentuk.⁷⁰

Seperti halnya dengan konsep konstruksionis, Ideologi tidak selalu berkuat pada ide-ide besar, ideologi juga bisa bermakna politiknya dan penandaan. Ketika melihat peristiwa dengan titik tertentu maka penggambaran peristiwa juga akan dijelaskan dengan kerangka berpikir tertentu.⁷¹

⁶⁷ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta, LkiS: 2012), Hal. 219-223

⁶⁸ Ibid

⁶⁹ Ibid, Hal.222

⁷⁰ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta, LkiS: 2002), Hal 37

⁷¹ Ibid, 131

Konsep konstruksionisme menurut L. Berger realitas tidak terbentuk secara alami, melainkan sengaja dibentuk dan dikonstruksi. Pemahaman tersebut menimbulkan realitas yang bersifat ganda, sehingga setiap orang memiliki pemahaman berbeda dalam melihat suatu realitas. Perbedaan tersebut berasal dari pengaruh pengalaman yang dimiliki, pendidikan, dan lingkungan sosial.⁷²

Dari pemahaman di atas tentu saja ideologi menjadi faktor yang berpengaruh terhadap isi pemberitaan pada sebuah media.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif menjelaskan mengenai makna yang terdapat pada sebuah realita. Penelitian kualitatif memandang fenomena yang terjadi dan saling mengaitkan dengan temuan yang telah diperoleh dari objek berdasarkan data.⁷³

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami realitas pada suatu fenomena dari berbagai sudut pandang sehingga bersifat subjektif dan tidak dapat digeneralisasi. Pemaknaan yang bersifat subjektif karena data yang berbentuk kata-kata ataupun gambar.⁷⁴

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah berita yang berkaitan dengan PKI pada majalah *Tempo* dan majalah *Gatra* yang dibagi menjadi dua yaitu periode masa kepemimpinan presiden Gus Dur terhitung dari terbitan tanggal 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Data selanjutnya pada periode pemerintahan presiden Jokowi, terhitung dari terbitan tanggal 20 Oktober 2014 hingga Oktober 2017.

⁷² Ibid, 15

⁷³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT raja Grafindo: 2001), Hal 82

⁷⁴ John W Creswell, *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*, (Sage publication :1994), Hal 156

Dari banyaknya pemberitaan isu PKI pada kedua era kepresidenan tersebut dipilih isu yang dianggap mempengaruhi sistem pemerintahan saat itu yaitu pemberitaan yang terbit sepanjang bulan April tahun 2000 mengenai usulan Gus Dur untuk mencabut TAP MPRS No 25 Tahun 1966 yang menuai kontroversi di tengah-tengah masyarakat karena dalam TAP MPRS tersebut berisi mengenai pelarangan penyebaran ideologi komunisme, marxisme dan leninisme serta pembubaran partai PKI, sedangkan pada era kepresidenan Jokowi yaitu pemberitaan yang terbit pada bulan Oktober 2017, yaitu aksi pembubaran diskusi pelurusan sejarah 1965-1966 oleh forum 65 yang akhirnya muncul reaksi dari TNI AD untuk memutar ulang film Pengkhianatan G30S PKI, film yang sering disebut sebafei film pesanan orde baru.

Pemilihan objek berdasarkan pada sifat majalah *Tempo* dan *Gatra* yaitu mempunyai kredibilitas dalam pemberitaan isu politik. Selain itu mengenai sejarah berdirinya majalah *Gatra* yang tak lepas dari faktor politik. *Gatra* terbit pada tahun 1994 dan terbit setiap minggu, *Gatra* berdiri karena adanya sebuah polemik yang cukup kontroversi yaitu pembredelan majalah *Tempo* oleh pemerintahan orde baru. Anggota yang kontra terhadap orde baru tetap bertahan di majalah *Tempo* sedangkan yang pro mendirikan majalah *Gatra*. Selain itu majalah *Tempo* dan *Gatra* dianggap cukup seimbang dari segi durasi penerbitan serta kemiripan rubrik yang sama-sama sering membahas mengenai pemberitaan politik.

4. Analisis dan Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menganalisis data primer dengan analisis model framing model Robert N. Entman, dalam model ini terdapat dua dimensi penting yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek. Seleksi isu merujuk pada pemilihan informasi dan alokasi isu. Sedangkan penonjolan aspek merujuk pada bagian yang dianggap penting dari suatu isu

disbanding dengan isu yang lain. Berikut penjelasan kedua dimensi tersebut yang menjadi acuan konsep framing Entman.

Tabel 1. 1 Dimensi Framing Robert N. Entman

Seleksi Isu	Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung didalamnya ada bagian berita yang dimasukkan (include), tetapi ada juga berita yang dikeluarkan (exclude). Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu.
Penonjolan Aspek	Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari isu tertentu dari suatu peristiwa atau isu tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.

Dari kedua dimensi tersebut analisis framing model Entman mengacu pada empat hal yaitu pemberian definisi, sumber masalah, serta evaluasi dan rekomendasi suatu wacana dan menekankan kerangka berpikir terhadap suatu peristiwa serta membuat keputusan moral. Keempat konsep tersebut digunakan untuk menganalisis dan mengukur bagaimana sebuah berita ditulis oleh wartawan.

Tabel 1. 2 Konsep Framing Robert N. Entman

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendeegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi

penyelesaian)	masalah?
---------------	----------

Data primer berasal dari berita yang dimuat pada majalah *Tempo* dan majalah *Gatra* yang akan dianalisis dengan menggunakan empat komponen framing model Robert N. Entman diatas.

BAB II

GAMBARAN OBJEK

A. Majalah *Tempo*

Janet Steele menuliskan latar belakang majalah *Tempo* cukup detail dalam bukunya yang berjudul *Wars Within*. Sehingga dalam penulisan ini akan banyak mengacu dan merangkum dari buku *Wars Within* dan tambahan dari data wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pihak *Tempo*. Buku tersebut membahas bagaimana pergulatan *Tempo* sebagai majalah berita sejak zaman Orde Baru. 1971 saat *Tempo* didirikan oleh Goenawan Mohamad dan beberapa pemuda yang notabennya disebut aktivis dan mahasiswa angkatan 66 merasakan bagaimana Orde Baru penuh anti kritik yang saat itu masih belia dengan kekuasaan dibawah Soeharto.

Peringatan seringkali dilakukan oleh pemerintah kepada media sehingga wartawan harus mampu mengontrol dirinya sendiri. Media seringkali menampilkan kegiatan dan rencana pemerintah di rubrik nasional dan selalu bersifat positif. *Tempo* tetap melakukan hal tersebut namun dengan menggunakan bahasa yang syarat makna agar pembaca tetap memahami apa yang disampaikan *Tempo* caranya adalah dengan membuat kalimat-kalimat pasif agar tidak terlihat menyebut subjek. Selain itu *Tempo* juga membangun hubungan dipemerintahan dan militer. Ketika *Tempo* dibredel pada 1982, hal tersebut yang menyelamatkan *Tempo*.⁷⁵ Hubungan tersebut terkesan ambigu karena *Tempo* merupakan organisasi non pemerintah yang independen dalam arti sebenarnya.⁷⁶

Tahun 1994 *Tempo* dibredel oleh pemerintahan Orde Baru karena kritik mengenai pembelian pesawat bekas dari Jerman Timur oleh wakil presiden BJ Habibie yang dinilai terlalu keras dan membahayakan pemerintahan saat itu. Hal tersebut sama halnya dengan yang disampaikan

⁷⁵ Janet Steele, *Wars Within*, (Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 2007), hal. 49

⁷⁶ *Ibid*, hal. 50

Bagja Redaktur Pelaksana *Tempo* ditahun 2017 yang menyetujui bahwa Orde baru adalah kekuasaan yang dijalankan dengan meneror dan menindas, melanggar HAM serta demokrasi.⁷⁷ Artinya kebebasan berekspresi selalu ditekan dan diawasi secara otoriter oleh pemerintahan Orde Baru dan hal tersebut sangat tidak sesuai dengan fungsi pers. Pasca pembredelan 1994 *Tempo* sebenarnya tidak benar-benar mati, beberapa anggota tetap melakukan gerakan bawah tanah dan terlibat dalam aktivitas politik. Pembredelan tersebut dianggap sebagai kondisi yang lebih melegakan oleh Goenawan Mohamad saat itu yang lebih leluasa melakukan gerakannya dengan orang-orang yang memiliki tujuan sama. Selama empat tahun *Tempo* di bredel dari 1994 hingga 1998 merupakan masa yang sangat penting dan signifikan bagi perkembangan majalah *Tempo* yang sangat diakui Goenawan Mohamad. Goenawan Mohamad tidak pernah ingin *Tempo* terbit lagi dengan alasan yang cukup memorable. Namun kenyataanya banyak publik yang mengaharapkan *Tempo* bangkit lagi.⁷⁸

Banyak pertimbangan bagi Goenawan Mohamad untuk menerbitkan kembali majalah *Tempo* saat itu. Pertama mengenai perundang-undangan pers yang selalu membelenggu pekerja media. Orde Baru dengan menteri penerangan yang mengatur seluruh tindakan pekerja media dirasa tidak sesuai dengan fungsi pers. Kedua mengenai kepemilikan media, sebelumnya PT Grafiti Pers sebagai pemilik *Tempo*, saham yang ada pada Grafiti Pers berasal dari anggota *Tempo* itu sendiri sedangkan Goenawan Mohamad tidak ingin jika *Tempo* dimiliki oleh perorangan yang ujungnya hanya menambah konflik. Ketiga, akan memperumit kondisi majalah *Detektif Romantika* atau D&R alasannya adalah majalah tersebut dipimpin oleh Bambang Bujono, mantan redaktur pelaksana *Tempo*. Sudah menjadi rahasia umum bahwa D&R merupakan reikarnasi dari *Tempo* yang dimiliki PT Grafiti Pers namun tidak ada bukti

⁷⁷ Wawancara, Bagja, Jakarta, 22 desember 2017

⁷⁸ Janet Steele, Wars Within, (Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 2007), hal. 260

tertulis mengenai hal itu, karena jika ketahuan akan sama nasibnya yaitu dibredel. Persoalannya adalah mengenai kecemburuan sosial karena kepemilikan yang sama dan persaingan serta mengenai hak gaji pekerja secara otomatis wartawan *Tempo* akan memiliki gaji yang lebih tinggi selain itu juga tidak efektif dalam segi organisasi. Dan terakhir mengenai alasan Goenawan Mohamad yang takut mengecewakan banyak pihak, sehingga solusi yang ditawarkan kepada *Tempo* bahwa dia hanya mau menjadi pemimpin redaksi selama satu tahun saja selanjutnya mempercayakan kepada Bambang Harymurti kepala biro *Tempo* di Washington. Ketakutan Goenawan Mohamad mengenai reputasi *Tempo*, reputasi diri sendiri dan orang-orang yang bekerja kembali. Karena Goenawan Mohamad juga khawatir terhadap komunitas yang dia bangaun orang-orang dibawah tanah yang diawal disebutkan. Sebenarnya keinginan Goenawan Mohamad adalah berhenti menjadi aktivis dan ingin menjadi penulis dengan harapan menjadi lebih baik dan ada lembaga yang menguatkan demokrasi, kebebasan.

Akhirnya tahun 1998 *Tempo* kembali terbit dan tidak banyak yang berubah, dalam hal manajemen redaksi dari awal hingga kini tidak ada yang berubah dari *Tempo*, mengenai penentuan tema berita terlebih dahulu didiskusikan pada forum kecil sesuai dengan kelompok rubrik masing-masing hingga akhirnya dibawa ke forum besar untuk didiskusikan bersama dengan anggota rubrik yang lain serta redaktur pelaksana. Dalam forum tersebut dilakukan diskusi hingga mencapai kesepakatan bersama sehingga ketika reporter turun ke lapangan data yang akan dicari disesuaikan dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.⁷⁹ Setelah data dituliskan akan mulai proses editing, biasanya maksimal tiga tahap proses editing hingga layak diterbitkan.

Selanjutnya hal yang cukup penting dan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan *Tempo* mengenai pola recruitment yang cukup selektif dengan pola yang sama, menariknya *Tempo* lebih memilih anak

⁷⁹ Wawancara, Bagja, Redaktur Pelaksana, Jakarta, 22 Desember 2018

muda yang baru lulus dan belum memiliki kemampuan dibidang jurnalistik.⁸⁰ Hal tersebut dilakukan *Tempo* untuk menghindari kebiasaan buruk layaknya wartawan amplop dan yang terpenting adalah mengajarkan kultur *Tempo* atau jurnalistik yang diterapkan *Tempo*. Untuk menciptakan kultur yang kuat dilakukan pelatihan yang cukup intensif dalam beberapa waktu oleh pihak *Tempo* kepada anggota baru. Hal yang cukup menarik dari pelatihan tersebut adalah tidak ditekankan mengenai obyektivitas. Karena *Tempo* memang mengakui tidak benar-benar obyektif dan memisahkan antara fakta dan nilai. Namun wartawan tetap diwajibkan untuk *cover both side*. *Tempo* memiliki banyak sekali opini dan mempercayai kebebasan tapi tekanan merupakan soal lain lagi.⁸¹ Tekanan yang disebut-sebut oleh Goenawan Mohamad dalam sejarah *Tempo* selalu merujuk pada konteks politik Orde Baru, yaitu sistem politik yang tidak adil, pemerintahan yang bersifat otoriter sehingga suatu kewajiban bagi *Tempo* untuk melawan secara pelan-pelan tindakan tersebut. Karena menurut Goenawan Mohamad sejarah Indonesia merupakan pencarian keadilan melebihi pencarian kebebasan.⁸²

Tempo didirikan untuk membela kebebasan berekspresi. Pandangan yang digambarkan Goenawan Mohamad sebagai pendiri *Tempo* tidak akan berubah sejak 1960 ketika dirinya menandatangani Manifest kebudayaan dan memproklamkan perlunya kebebasan kreativitas.⁸³

B. Majalah Gatra

Nampaknya tulisan ini cenderung tidak akan seimbang jika dilihat dari sumber penulisan, sebagian besar yang akan peneliti tulis mengenai *Gatra* berasal dari sumber *Tempo*. Namun, ada sedikit informasi yang

⁸⁰Janet Steele, *Wars Within*, (Jakarta:Penerbit Dian Rakyat, 2007), hal. 9-10

⁸¹Ibid, hal. 17-18

⁸²Ibid, hal. 18

⁸³Ibid, hal. 260

disampaikan dari pihak *Gatra* walaupun lebih banyak pada bagian manajemen redaksional. Mungkin paragraf ini akan menjadi tulisan yang paling tidak meyakinkan, namun penulis akan mencoba menulis dengan seimbang.

Gatra berdiri pada tahun 1994, tepat setelah *Tempo* dibredel. Dan didukung oleh mantan pekerja dari *Tempo* baik jurnalis maupun non jurnalis.⁸⁴ Sejarah pendirian *Gatra* mungkin akan sering dikaitkan dengan pembredelan *Tempo*. Hal tersebut terjadi karena setelah *Tempo* ditutup, Yayasan Jaya raya menjadi investor *Gatra*. dimana *Gatra* dimiliki oleh kroni Soeharto, Bob Hasan yang juga pendiri *Tempo*. Sehingga pihak *Tempo* selalu mempercayai bahwa *Gatra* merupakan majalah “boneka” rezim Soeharto, dan menganggap wartawan *Tempo* yang bergabung pada majalah *Gatra* adalah pengkhianat.⁸⁵

Menurut Goenawan Mohamad dalam buku *Wars Within*, pendirian *Gatra* merupakan hasil negosiasi yang dilakukan antara Bob Hasan, Soeharto, Habibi, dan Ciputra alasanya untuk menyelesaikan persoalan pembredelan *Tempo*. Nama *Gatra* juga diberikan oleh Soeharto, bahkan pemerintah awalnya ingin semua orang bergabung dengan *Gatra* dan mengatakan pada publik bahwa *Tempo* sudah ditutup.⁸⁶ Pendapat Goenawan mohamad juga dibenarkan oleh Harjoko Trisandi.

Selanjutnya Juli 1994, dewan direksi membuat kesepakatan dengan Bob Hasan untuk melakukan rapat dengan anggota *Tempo*. Hasilnya hampir 70 persen anggota memilih bergabung dengan *Gatra*, artinya Goenawan Mohamad membebaskan staf nonredaksi untuk bergabung. Menurut Bambang Harymurti karena Goenawan Mohamad memikirkan masa depan mereka. Dengan begitu Goenawan Mohamad beranggapan bahwa musuh yang telah membayar hasil perjuangan mereka.⁸⁷

⁸⁴ Wawancara , Asrori S Karni, Redaktur Pelaksana *Gatra*, Jakarta, 22 Desember 2017

⁸⁵ Janet Steele, *Wars Within*, (Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 2007), hal xxvii

⁸⁶ *Ibid* 229

⁸⁷ *Ibid* 230

Sebagian beranggapan jika idealism tidak akan ada jika tidak ada ruang untuk mengekspresikan idealism itu sendiri, seperti yang disampaikan Agus Basri kepada Toriq Hadad jika dirinya akan membuktikan dengan mengikuti Bob Hasan akan tetap mendukung kejatuhan Soeharto. Walaupun yang lain mengakui alasan utama adalah finansial dan pragmatis.⁸⁸ Walaupun emosi dari pihak yang bertahan dengan Tempo selalu menuduh Gatra sebagai media yang hidup diatas bangkai orang lain, dan mereka yang menolak bergabung mengklaim bahwa mereka lebih idealis dan demokratis daripada yang lain. Namun lambat laun suasana itu mereda dan saling memaafkan.⁸⁹

Terlepas dari sejarah yang penuh polemik, nyatanya *Gatra* tumbuh menjadi media yang bersikap seimbang. Menurut Asrori, redaktur pelaksana *Gatra* menyampaikan bahwa tujuan utama pemberitaan yang diproduksi *Gatra* bisa menjadi kontrol sosial yang mengedukasi masyarakat dan menjalankan fungsi pers secara benar. hal tersebut nyatanya dibuktikan dengan pemberitaan *Gatra* yang cenderung tidak memihak.⁹⁰ Dan yang selalu ditekankan adalah menjadi media yang solutif dan tidak memperkeruh masalah.

Mengenai manajemen redaksional tidak jauh berbeda dengan *Tempo* yang menerapkan sistem demokrasi dengan melakukan diskusi mengenai pemilihan topik berita yang akan diterbitkan. Semua didiskusikan terlebih dahulu berdasarkan divisi masing-masing dan selanjutnya dibawa ke forum besar untuk dipertimbangkan bersama redaktur pelaksana. Sehingga ketika reporter terjun ke lapangan harus mencari data sesuai kesepakatan dan yang menjadi penekanan adalah *gatra* selalu mencoba menyampaikan angle yang berbeda dan bersikap *cover both side*. Mengenai proses editing juga sama dengan *Tempo*.⁹¹

⁸⁸ Ibid 230

⁸⁹ Ibid 231

⁹⁰ Wawancara, Asrosi S Karni, Redaktur Pelaksana, Jakarta, 22 desember 2017

⁹¹ Wawancara, Asrosi S Karni, Redaktur Pelaksana, Jakarta, 22 desember 2017

BAB III

ANALISIS DATA

A. Analisis Pemberitaan pada Majalah Tempo

1. Era Kepresidenan Abdurrahman Wahid

a. Edisi 16 April 2000

Majalah *Tempo* edisi 16 April 2000 mengangkat beberapa judul mengenai isu komunisme. Setidaknya terdapat empat judul dengan berbagai rubric mengingat pada bulan tersebut komunisme sedang hangat diperbincangkan mengiringi usulan Gus Dur untuk mencabut TAP MPRS no 25 Tahun 1966.

Tulisan pertama berjudul “*Melarang Marxisme-Leninisme itu Buat Apa, Bung?*” yang ditempatkan pada rubrik opini. Kedua, “*PKI, Hantu atau Dihantukan?*” pada rubrik nasional. Ketiga, “*Islam, Maaf, dan PKI*” pada rubrik kolom oleh Ahmad Sahal yang saat itu sebagai redaktur jurnal Kalam. Keempat, “*Saya Ingin Meluruskan Sejarah*” yang berisi wawancara kepada Kolonel Latief dan ditempatkan pada rubrik wawancara.

1) Melarang Marxisme-Leninisme itu Buat Apa, Bung?

Tulisan tersebut ditempatkan pada rubrik opini. Pada majalah *Tempo*, opini dituliskan oleh pihak internal *Tempo* sendiri berdasarkan pendapat yang disertai fakta oleh pihak *Tempo*. Pokok opini tersebut menjelaskan bahwa ideologi komunisme tidak akan tumbuh lagi karena komunisme di Negara-negara yang menjadi basisnya sudah lenyap sehingga akan menjadi bahan tertawaan ketika ada pelarangan ajaran marxisme-leninisme. Orde Baru seolah membuat isu komunisme menjadi semakin misterius.

Define problem. Majalah *Tempo* mengidentifikasi pelarangan penyebaran ideologi marxisme dan leninisme sebagai tindakan yang kurang relevan dengan zaman dan perlu diperdebatkan dengan fakta-fakta yang telah terjadi di Negara-negara lain. Mengingat komunisme di negara-negara yang pernah menganutnya telah bergeser dan beralih ke ideologi yang lebih tepat dan sesuai dengan keadaan di Negara tersebut. Fakta-fakta tersebut dituliskan *Tempo* pada paragraf pertama hingga ketiga.

“Orang Indonesia ini bukan komunis, tapi justru mereka yang pekan lalu mengumandangkan seruan “awas, bahaya komunis” di jalan-jalan. Mereka percaya bahwa dunia tidak pernah beranjak dari tahun 1960-an.”

Teks tersebut merupakan paragraf pembuka yang disampaikan *Tempo* mengenai keadaan masyarakat Indonesia yang bertindak dan berfikir tidak sesuai dengan zamannya. Indonesia yang jelas-jelas bukan Negara berideologi komunis malah menyuarakan bahaya komunis ini merupakan dua hal yang sebenarnya menjadi tindakan yang sia-sia. Menyuarakan sesuatu yang jelas-jelas tidak ada dan tidak mungkin terjadi. Paragraf tersebut juga dibuktikan pada paragraf selanjutnya yang memaparkan fakta dan argumentasi mengenai komunisme di Negara- Negara yang menjadi basisnya.

“Kini semua itu sirna. Kapitalisme masuk dengan deras ke seluruh Eropa Timur. Di Beijing, partai komunis masih berkuasa, tapi sudah mengadopsi jalan ekonomi pasar yang dulu diharamkan. Sudah muncul pemilik modal, baik asing maupun domestik. Di Vietnam, itu juga terjadi. Komunisme akhirnya hanya jadi ibarat petai hampa: bentuk luarnya masih, tapi isinya tak ada apa-apa.”

Berdasarkan kutipan diatas itulah yang sebenarnya dianggap tidak relevan dengan zaman. Karena faktanya, komunisme sudah tidak laku diberbagai Negara yang menganut

ideologinya apalagi Indonesia yang jelas-jelas tidak menganut ideologi tersebut.

Diagnose causes. Berita yang ditulis *Tempo*, Orde Baru dianggap sebagai penyebab ketakutan akan bangkitnya komunisme oleh masyarakat Indonesia. Sejarah yang telah terjadi di Indonesia mengenai kejadian G30S selalu dijadikan alasan mengapa ketakutan itu selalu muncul pada masyarakat Indonesia. Meskipun komunisme sudah kehilangan tuah, kenyataannya Orde Baru yang membuat hal tersebut semakin misterius. *Tempo* menegaskan dengan menulisnya tepat sebagai penjelas di bawah judul besar.

“Hanya orde baru yang membuatnya jadi sesuatu yang misterius. Melarang ajaran marxisme-leninisme sudah jadi lelucon”

Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun telah berpengaruh besar pada cara berfikir masyarakat Indonesia dalam menanggapi isu komunisme. Sehingga yang akan selalu terjadi pada masyarakat Indonesia adalah kegaduhan serta ketakutan pada ideologi komunis. Maka tidak heran jika masyarakat Indonesia bersama-sama menyerukan antikomunisme bahkan bahaya komunis di jalan-jalan.

Moral Judgement. Penilaian yang diberikan oleh *Tempo* mengenai pelarangan ideologi tersebut dianggap tidak tepat dan membatasi pengetahuan karena sudah saatnya generasi muda berfikir secara luas dengan cara tidak membatasi keingintahuan mereka. Selain itu ideologi tersebut dipandang sebagai pengetahuan dan teori-teori yang dapat digunakan sebagai bahan studi. Penjelasan tersebut dijelaskan pada paragraf keenam dan ketujuh pada teks.

“Karena ajaran itu dilarang anak muda yang hendak berpikir sendiri justru menjadi penasaran padanya.”

Tempo membangun argumentasi bahwa sebuah ideologi sudah selayaknya bebas dipelajari mengingat bahwa hal tersebut sebagian dari ilmu pengetahuan. Selain itu, melarang mempelajari ilmu pengetahuan sudah tidak selayaknya mengingat pemerintahan saat itu bukan seperti Orde Baru yang begitu otoriter dan membatasi akses informasi.

“Yang juga penting dikemukakan ialah anak muda yang tertarik kepada gerakan kiri sekalipun, misalkan bergabung dengan Partai Rakyat Demokratik menolak komunisme-leninisme. Umumnya, anak muda Indonesia yang keturunan PKI maupun bukan, sekedar mempelajari komunisme-leninisme sebagai teori di antara teori lain.”

Kutipan diatas menjelaskan bahwa saat ini komunisme-leninisme lebih terbuka sebagai teori yang dipelajari dan sebagai ilmu pengetahuan. Bukan berarti ketika mempelajari menerapkannya sebagai ideologi.

Treatment recommendation. Berdasarkan paparan berita yang ditulis *Tempo* setuju jika TAP MPRS tentang pelarangan pengajaran marxisme-leninisme dicabut. Semua sudah jelas jika komunisme sudah kehilangan tuah dan pengetahuan selalu berkembang.

“Maka, memang sebaiknya larangan MPR terhadap marxisme-leninisme dicabut.”

Kalimat tersebut dijadikan sebagai kalimat penutup atau kesimpulan dari paparan opini yang disampaikan *Tempo*. Sudah jelas bahwa mengingat komunisme yang memang sudah kehilangan tuah ilmu pengetahuan seharusnya bebas untuk dipelajari.

Tabel 3. 1 Frame Berita Tempo (Berita Pertama)

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian masalah)	Pelarangan penyebaran marxisme, leninisme sudah tidak relevan dengan jaman.
<i>Diagnose Causes</i>	Orde baru

(Memperkirakan masalah dan sumber masalah)	
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Ajaran marxisme, leninisme sebagai ilmu pengetahuan
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	TAP MPRS mengenai pelarangan penyebaran ajaran marxisme, leninisme harus dicabut

2) PKI, Hantu atau Dihantukan?

Judul tersebut diangkat setelah usul Presiden Gus Dur untuk mencabut Tap MPRS nomor 25 tahun 1966 menuai kontroversi pada masyarakat dan beberapa tokoh negeri ini. Sehingga muncul aksi demonstrasi dari pihak-pihak yang kontra terhadap usulan Gus Dur. Terbukti dari survei yang telah dilakukan *Tempo* di 23 provinsi menyatakan 79 persen masyarakat menolak dan alergi dengan PKI.

Define problem. PKI dipandang sebagai hantu yang ditakuti oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Ketakutan dan penolakan tersebut muncul dari berbagai kalangan. Majalah *Tempo* menempatkan berita tersebut pada rubrik Nasional karena isu PKI telah membawa publik larut dalam ketakutan dan selalu menjadi perbincangan yang mempengaruhi sistem pemerintahan di Indonesia. Hal tersebut tergambarkan pada paragraf pertama dan kedua teks berita.

“PARTAI Komunis Indonesia (PKI) sudah terkubur tiga dasawarsa lebih. Dan dua kiblat komunisme telah berganti wajah-Uni Soviet rontok, sementara Cina menengok kapitalisme. Namun, PKI dan komunisme belum berhenti jadi hantu, atau dihantukan.”

Paragraf pembuka tersebut menjelaskan bagaimana PKI sesungguhnya memang sebagai hantu atau sengaja dihantukan

mengingat bahwa komunisme di Negara asalnya sudah bangkrut.

“ Dalam dua pekan terakhir, demonstrasi marak sambung menyambung untuk menolak usul Presiden Abdurrahman Wahid mencabut Ketetapan MPRS Nomor 25/1966. Itulah ketetapan yang dibuat menyusul Gerakan 30 September, tragedi berdarah yang kemudian secara radikal mengubah wajah negeri ini.”

Demonstrasi yang dilakukan selama hampir dua pekan merupakan wujud dari reaksi masyarakat terhadap isu PKI yang selalu menjadi hantu. Ketakutan serta kekhawatiran yang dirasakan masyarakat seolah harus menjadi masalah yang harus diselesaikan juga oleh pemerintah.

Diagnose causes. *Tempo* mengidentifikasi bahwa Orde Baru yang sengaja menghantukan PKI sehingga menjadi hantu di masyarakat Indonesia. Hal tersebut dilakukan oleh Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaannya. Diparagraf keenam disebutkan bahwa,

“ Dalam perkembangannya, kampanye antikomunisme memang telah dipakai rezim Orde Baru untuk meneguhkan kekuasaannya yang korup, seraya melakukan depolitisasi habis-habisan dan memberangus kebebasan berekspresi”

Dari tindakan yang telah dilakukan Orde Baru maka berimplikasi pada keputusan Gus Dur yang mengusulkan pencabutan TAP MPRS 25/1966. Padahal, tujuannya untuk keadilan dan hak asasi manusia. Penolakan keras dilakukan oleh masyarakat yang sudah terlanjur takut dengan PKI dan komunisme. Akibat kampanye yang telah dilakukan Orde Baru, kini Gus Dur mendapat kecaman dari masyarakat.

Make moral judgement. Penilaian yang diberikan oleh *Tempo* terhadap permasalahan yang dihadapi Indonesia saat itu adalah menyayangkan reaksi Pramodya Ananta Toer terhadap

langkah yang diambil Gus Dur. Hal tersebut digambarkan *Tempo* mengenai penolakan Pramoedya Ananta Toer yang seolah tidak mempercayai dan mencibir tindakan yang diambil Gus Dur yang meminta maaf secara langsung.

“Goenawan Mohamad menyayangkan sikap Pramoedya. Menurut salah satu sastrawan manifest kebudayaan itu-dulu pernah menjadi sasaran pengganyangan oleh tokoh Lembaga Kebudayaan Rakyat seperti Pramoedya-Presiden Abdurrahman telah menunjukkan niat baik, bahkan meminta maaf. Tidak mudah melakukan hal itu, kata Goenawan, karena karena selama ini dianggap tabu.”

Secara moral *Tempo* menyayangkan hal tersebut karena bisa saja reaksi yang disampaikan Pram mempengaruhi tercapainya rekonsiliasi. Artinya, terwujudnya rekonsiliasi menjadi sangat kecil kemungkinannya.

Treatment recommendation. Penyelesaian yang ditawarkan oleh *Tempo* adalah mendukung keputusan Gus Dur demi keadilan dan HAM. Walaupun rekonsiliasi sulit untuk dicapai namun masa depan bangsa harus lebih baik. Terlihat di beberapa paragraph terakhir berita yang memunculkan beberapa tokoh yang sepemikiran dengan Gus Dur. Hal tersebut dilakukan *Tempo* untuk keberlangsungan bangsa Indonesia lebih baik.

“Peristiwa 30 September dan kejadian-kejadian yang menyertainya adalah tragedi besar bagi seluruh bangsa ini-tak hanya bagi para korban pembantaian dan hujatan. Cepat atau lambat, suka atau tidak, bangsa Indonesia harus menengok luka mendalam yang tak disembuhkan itu. Demi masa depan yang lebih baik.”

Paragraf penutup yang disampaikan *Tempo* menunjukkan bahwa cepat atau lambat rekonsiliasi perlu dilakukan untuk masa depan yang lebih baik untuk bangsa Indonesia.

Tabel 3. 2 Frame Berita Tempo (Berita kedua)

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian masalah)	Usulan Gus Dur mengenai pencabutan TAP MPRS no 25 1966 sulit diterima masyarakat karena isu PKI masih dianggap hantu oleh masyarakat
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah dan sumber masalah)	<ul style="list-style-type: none"> a. Orde baru, telah membuat PKI menjadi hantu untuk melanggengkan kekuasaan. b. Gus Dur, sebagai korban kemarahan masyarakat karena upayanya membela hak asasi manusia
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Menyayangkan reaksi Pramoedya Ananta Toer sebagai tokoh kebudayaan yang mencibir permintaan maaf Gus Dur
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Melanjutkan memperjuangkan pencabutan TAP MPRS no 25 1966 demi keadilan dan hak asasi manusia

3) Islam, Maaf dan PKI

Tulisan tersebut ditulis oleh Ahmad Sahal yang saat itu sebagai redaktur jurnal Kalam dan diamuat pada rubrik kolom. Artinya pihak *Tempo* yang memilih dan meminta Ahmad Sahal untuk menuliskan argumentasinya dalam menanggapi usulan Gus Dur dan penolakan yang terjadi pada masyarakat mengenai pencabutan TAP MPRS no 25 tahun 1966. Fokus argumentasi dari tulisan tersebut adalah bagaimana kalangan islam menolak usulan Gus Dur.

Define Problem. Tulisan Ahmad Sahal pada majalah *Tempo* memaparkan penolakan kalangan Islam terhadap usulan Gus Dur terkait usulan pencabutan TAP MPRS no 25/1966. Mereka menyayangkan permintaan maaf yang telah dilakukan Gus Dur kepada PKI. Bagaimana sejarah yang membawa

mereka untuk tetap menolak usulan Gus Dur. Traumatik yang terjadi pada PKI tentu saja berpengaruh pada pandangan dan kebencian umat islam terhadap PKI. Penempatan tulisan pada rubrik Kolom memberikan argumentasi mengenai dua kelompok, islam sebagai kelompok dominan yang membenci PKI sebagai kelompok minoritas yang pernah jaya dimasa lalu. Berikut paragraf yang dituliskan Ahmad Sahal pada pembuka kolom tersebut.

“MENGAPA kalangan Islam menolak usul Gus Dur untuk mencabut Ketetapan MPRS XXV/66? Mengapa mereka menyesalkan permintaan maaf Gus Dur kepada PKI? Ketika komunisme sudah bangkrut di tingkat dunia, dan di dalam negeri PKI dan yang terkait dengannya betul-betul menjadi political outcast, mengapa kaum muslim di negeri ini masih keras penentangannya terhadap komunisme?”

Paragraf tersebut dituliskan Ahmad Sahal untuk menggambarkan mengapa kalangan Islam membenci PKI. Mempertanyakan sebelum menjelaskan bagaimana dan apa yang terjadi pada kalangan Islam dan PKI.

Diagnose causes. Terdapat dua alasan mendasar tulisan Ahmad Sahal yang diterbitkan *Tempo* mengenai penyebab penolakan mengenai permintaan maaf Gus Dur yang dianggap salah. *Pertama* karena kekhawatiran umat islam terhadap PKI yang akan berkembang lagi. Jika di era demokrasi terpimpin semua persaingan dan konfrontasi partai berpusat dan bergantung pada Soekarno. Sehingga tidak adanya Soekarno ditakutkan PKI akan merayap ke seluruh negeri. *Kedua*, stereotype umat islam terhadap PKI adalah partai yang tidak bermoral dan ateis yang menghalalkan segala cara. Tentu saja tidak sesuai dengan nilai-nilai islam.

“Sesungguhnya ada faktor lain yang secara genuine melekat dalam ingatan kolektif umat yang

justru lebih berperan mengawetkan kekhawatiran dan antipati itu. Dua hal setidaknya bisa disebut di sini: kenangan traumatis terhadap situasi social dan politik era Demokrasi Terpimpin, dan pandangan stereotipikal terhadap komunisme itu sendiri.”

“Selain itu, kompetisi dan konfrontasi partai-partai tidak disalurkan lewat pemilu karena hampir semuanya bergantung dan memusat pada Sukarno. Akibatnya, ketidakpastian tentang bagaimana nanti kalau tidak ada Sukarno merayap ke seluruh negeri.”

“Apalagi, di kalangan Islam, PKI mengidap stereotip sebagai kelompok yang berpolitik tanpa moralitas karena dasarnya adalah ateisme. Politik PKI dianggap identik dengan "tujuan menghalalkan cara”

Kutipan tersebut menjelaskan sejarah mengapa kalangan Islam tidak menyetujui usulan Gus Dur mencabut TAP MPRS no 25/1966. Sejarah yang pernah mereka lalui menjadikan mereka trauma terhadap komunisme.

Make moral judgement. Frame mengenai kebencian umat islam terhadap PKI menutupi keadilan sehingga tindakan Gus Dur yang meminta maaf kepada keturunan PKI dan terduga PKI dianggap salah oleh umat islam. Kebencian yang ditimbulkan berubah menjadi kesewenang-wenangan. Seperti pada teks berikut.

“Di sinilah letak kesalahan argumen "membela diri" dan "menghabisi sampai ke akar-akarnya" yang mendasari pembunuhan besar-besaran terhadap PKI. Kegentaran telah tergelincir menjadi kesewenang-wenangan. Keadilan ditutupi oleh kebencian. Apalagi kalau diingat bahwa saat itu Soeharto dan tentara ikut mendukung dan mengambil keuntungan dari pembunuhan tersebut.”

Kondisi kebencian yang dirasakan oleh kalangan Islam dianggap sebagai kebenaran karena adanya dukungan dari Soeharto. Inilah yang dimanfaatkan rezim Soeharto untuk

mengukuhkan kampanye-kampanye antikomunis demi kepentingan dan tujuan kekuasaan.

Treatment recommendation. Ahmad Sahal dalam tulisannya yang dimuat pada majalah *Tempo* memberikan rekomendasi untuk saling mengakui kesalahan kedua belah pihak dan memaafkan. Mengingat tujuan tindakan yang dilakukan Gus Dur adalah sebagai bentuk ikhtiar agar tidak selalu terperangkap pada kekhawatiran. Selain itu juga untuk masa depan bangsa tanpa tekanan dan manipulasi. berikut teks mengenai rekomendasi yang ditawarkan oleh Ahmad Sahal.

“Kalau setiap pihak mengakui kesalahan, bukan hanya rekonsiliasi yang tercapai, melainkan juga penyembuhan luka sejarah yang tertanam di bawah sadar bangsa ini. Dan setelah itu, bab baru kehidupan bangsa ini bisa dimulai dengan sikap adil, tanpa beban trauma sejarah yang ditekan atau dimanipulasi”

Ahmad Sahal menegaskan bahwa seharusnya semua pihak mengakui kesalahan bukan hanya PKI yang selama ini selalu ditempatkan pada posisi bersalah dan kalangan Islam sebagai korban.

Tabel 3. 3 Frame Berita Tempo (Berita Ketiga)

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian masalah)	Penolakan kalangan Islam terhadap usulan Gus Dur
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah dan sumber masalah)	<ul style="list-style-type: none"> a. Era demokrasi b. dipimpin, kompetisi partai bergantung pada Soekarno. Sehingga ditakutkan setelah tidak adanya Soekarno PKI akan merayap ke seluruh negeri. c. Stereotip pada PKI adalah kelompok politik tanpa moralitas dan atheism.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Kebencian umat islam terhadap PKI menutupi keadilan sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh rezim Soeharto

<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Saling memaafkan sehingga rekonsiliasi tercapai dan penyembuhan luka sejarah.
--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

1. Era Kepresidenan Joko Widodo

a. Edisi 1 Oktober 2017

Edisi 1 Oktober 2017 *Tempo* kembali mengangkat pemberitaan mengenai isu komunisme yang tengah hangat diperbincangkan publik hal tersebut terlihat ada cover *Tempo* dengan tulisan “*SEKALI LAGI HANTU PKI*”. Pada edisi tersebut komunisme mencuat diberbagai media sosial karena forum 65 yang melakukan diskusi pelurusan sejarah 1965-1966. Sehingga hal tersebut memicu unjuk rasa yang dilakukan oleh pihak antikomunis. Atas isu yang menyebar itulah TNI Ad menurunkan instruksi disetiap daerah untuk melakukan pemutaran film Pengkhianatan G30S PKI. Pemberitaan yang diangkat *Tempo* lebih mengarah pada apa yang menjadi penyebab kemunculan isu tersebut dan siapa tokoh dibalik penyebaran isu, serta apa kepentingannya dalam penyebaran isu.

Terdapat lima berita yang ditampilkan oleh *Tempo* pada periode tersebut. Pertama, “*Hantu PKI dan Politik Elektoral 2019*” yang ditempatkan pada rubrik opini. Kedua, “*Hantu PKI di Jagat Maya*” judul tersebut lebih menampilkan hasil survei mengenai tren percakapan di media sosial mengenai isu komunisme. Selanjutnya terdapat tiga berita yang ditempatkan pada rubrik laporan utama yaitu “*Perintah Panglima, Mau Apa?*”, “*Kue Pahit Untuk Jokowi*” serta satu hasil wawancara kepada menteri penerangan 1998-1999 Muhammad Yunus Yosfiah dengan judul “*Film PKI itu Bukan Doktrin*” . Wawancara tersebut mengarah pada pandangan tokoh mengenai kemunculan isu PKI dan pemutaran film pengkhiaanatan G30S PKI.

Dari seluruh berita ada edisi 1 Oktober 2017, tidak semua berita dianalisis. Berita yang tidak dianalisis adalah “*Hantu PKI di Jagat Maya*” dan hasil wawancara “*Film PKI itu bukan Doktrin*”. Karena penyajian survei dan wawancara tidak dilakukan pengembangan oleh media melainkan menuliskan hasil.

1) **Hantu PKI dan Politik Elektoral 2019**

Tempo menerbitkan judul “*Hantu PKI dan Politik Elektoral 2019*” pada rubrik opini edisi 1 Oktober 2017. Tulisan tersebut membahas pelarangan diskusi yang dilakukan YLBHI mengenai prahara politik 1965. Lagi-lagi pelarangan dan pembubaran oleh pendemo didasari ketakutan mengenai kebangkitan PKI. Hantu PKI sengaja digunakan sebagai alat untuk kepentingan penyerangan terhadap pemerintahan Jokowi mengingat 2019 akan dilakukan pemilihan pemimpin baru. Dibalik pendemo yang tidak setuju diadakannya diskusi tersebut terdapat pihak yang sengaja memainkan emosi agar semakin mudah digiring untuk mempercayai bangkitnya komunis di Indonesia.

Define problem. Opini yang diturunkan *Tempo* merupakan gambaran mengenai pergesekan antar elite politik di Indonesia. Pelarangan diskusi prahara politik 1965 hanya sebagai alat oleh lawan politik pemerintahan Jokowi untuk menurunkan kredibilitas dimata masyarakat. Sehingga hantu PKI yang selalu membuat masyarakat dengan mudah mempengaruhi emosi bahwa di Indonesia sedang terjadi kondisi yang gawat dan tidak aman. Hal semacam itulah yang dimanfaatkan oleh pihak yang kontra terhadap pemerintahan saat ini. Seperti yang ditulis *Tempo* pada paragraf lima berikut.

“Karena itu, sulit untuk tak mempercayai bahwa penyerangan YLBHI dipicu oleh pergesekan antar-elite. Isu

bangkitnya PKI di-sebarluaskan untuk memberi kesan Negara gawat karena komunisme bangkit untuk menggantikan pancasila.”

Menyebutkan bahwa komunisme akan menggantikan ideologi pancasila tentu saja akan mempengaruhi emosional masyarakat secara luas. Akan sangat mudah dilakukan ketika masyarakat juga kurang memahami secara mendalam sejarah prahara politik 1965. Maka tidak heran jika sebagian antar elite politik memanfaatkan situasi tersebut.

Tujuan dari apa yang sedang dimainkan elite politik adalah menjatuhkan pemerintahan Jokowi. Hal tersebut dilakukan dengan menggiring masyarakat untuk membenci Jokowi dan menempatkan pada posisi bahwa Jokowi tidak dapat menangani permasalahan di Indonesia dengan baik. Berikut paragraf keenam yang ditulis *Tempo*.

“Ada kesan kuat isu bangkitnya komunisme ini dipakai untuk melorotkan pamor Presiden Joko Widodo. Pada pemilihan umum 2014, Jokowi dihantam kampanye hitam sebagai calon presiden yang prokomunis. Meski tanpa bukti, orangtua Jokowi juga disebut-sebut sebagai kader PKI. Para penentang presiden tampaknya bahwa kebohongan yang diulang-ulang akan dianggap sebagai kebenaran. Tujuan akhir serangan ini adalah mengalahkan Jokowi pada pemilu 2019, bahkan menjatuhkannya ditengah jalan.”

Tempo menegaskan pada kalimat terakhir paragraf tersebut mengenai serangan yang dilakukan kepada Jokowi untuk menjatuhkannya. Sehingga masyarakat memang sengaja diarahkan agar membenci pemerintahan Jokowi dengan memanfaatkan isu bangkitnya PKI di Indonesia, padahal komunisme sudah tidak laku lagi dinegri asalnya.

Diagnose causes. Aktor yang digambarkan *Tempo* sebagai penyebab keriuhan tersebut adalah purnawirawan jenderal. Seharusnya purnawirawan jenderal yang mengetahui

sejarah bahwa komunisme bangkrut sengaja melakukan hal tersebut demi kepentingan politik. Massa yang menyerang YLBHI sengaja digerakkan untuk menyerang diskusi tersebut. hal tersebut dilakukan oleh purnawirawan jendral agar tidak terjadi rekonsiliasi sehingga massa mengecam jika Jokowi melakukan hal yang bertolakbelakang. Berikut paragraf keempat *Tempo* yang menjelaskan keterlibatan purnawirawan jendral.

“Para penyerang YLBHI-diduga merupakan demonstran suruhan-mungkin tak paham tentang komunisme dan sejarah 1965. Mereka boleh jadi sebagai hanya korban sesat bahwa hantu PKI telah bangkit kembali. Tapi para tokoh dibelakang dmosntrasi, termasuk sejumlah purnawirawan jendral, semestinya tahu komunisme sudah bangkrut.”

Komunisme dijadikan hantu untuk menakuti masyarakat, sehingga masyarakat akan selalu menyalahkan Jokowi yang tidak bias mengatasi permasalahan tersebut. Posisi yang dibangun *Tempo*, Jokowi adalah korban dari ulah elit politik dan tokoh dibalik aksi tersebut. karena *Tempo* juga menjelaskan bahwa Jokowi pernah melakukan dan menyediakan ruang untuk membahas peristiwa 1965 diawal periode pemerintahannya. Tentu saja hal tersebut sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi dengan fenomena yang telah disetting oleh tokoh dibalik penyerang diskusi tersebut.

Make moral judgement. Pada opini *Tempo*, terdapat beberapa penilaian yang disampaikan. Pertama, pembubaran diskusi merupakan tindakan yang salah. Kedua, PKI selalu menjadi bahan kampanye hitam diantara elite politik. Isu PKI yang sensitif, kebencian masyarakat, emosi dan kemarahan masyarakat Indonesia yang mudah diprovokasi menjadi hal yang sangat mudah untuk menjadikan lawan politik terlihat

sangat buruk dan tidak pecus dalam menngurus negri. Secara tegas *Tempo* menyebutkan pada paragraf pembuka dan keenam.

“Dengan dalih apapun, pelarangan diskusi tentang prahara politik 1965 tak bisa dibenarkan.”

Sebenarnya alasan dibubarkannya diskusi tersebut karena isu-isu yang merebak mengenai kebangkitan PKI. Namun kenyataanya hal tersebut tidak terbukti. Sehingga pembubaran tersebut dinilai tidak benar.

“Ada kesan kuat isu bangkitnya komunisme ini dipakai untuk melorotkan pamor presiden Joko Widodo”

Kalimat tersebut menjelaskan bahwa komunisme yang dijadikan hantu oleh pihak yang memiliki kepentingan sengaja dibesar-besarkan untuk memperlihatkan betapa bobrohnya pemerintahan Jokowi. Sehingga masyarakat melakukan penolakan atas apa yang Jokowi lakukan.

Treatment recommendation. Tawaran penyelesaian yang dilakukan oleh *Tempo* adalah agar pemerintah tidak mengikuti arus untuk menggunakan hantu PKI sebagai politik elektoral. Mengingat bahwa sebenarnya pemerintahan Jokowi secara tidak langsung juga memanfaatkan situasi tersebut seperti yang dijelaskan *Tempo* bahwa pemerintahan Jokowi yang tidak langsung menentang penyerangan diskusi YLBHI sehingga kesan yang muncul adalah pemerintah ingin mendinginkan suasana dan melupakan peristiwa tersebut dan yang terpenting adalah pemerintah menyampaikan pesan kepada publik bahwa mereka juga anti terhadap PKI. Strategi anti PKI yang disampaikan dinilai *Tempo* sebagai cara pemerintah memainkan kartu elektoral dalam perkara 1965 yaitu untuk menyelamatkan elektabilitas pada pemilu 2019.

“Pemerintah berkewajiban mencari solusi, termasuk dengan cara tak ikut menjadikan prahara itu

sebagai permainan politik elektoral. Jokowi kini sedang diuji adakah ia sebagai negarawan atau sekedar pemain politik biasa.”

Kalimat penutup yang ditegaskan oleh *Tempo* memberikan pernyataan yang jelas bahwa seharusnya seorang pemimpin harus tepat mengambil sikap untuk menyelesaikan masalah yang selalu terjadi, bagaimana langkah yang harus dilakukan agar PKI tidak menjadi hantu dan alat politik untuk menjatuhkan lawan.

Tabel 3. 4 Frame Berita Tempo (Berita Keempat)

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian masalah)	Pergesekan antar elite politik
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah dan sumber masalah)	Purnawirawan jendral sebagai tokoh dibelakang aksi demonstrasi, Jokowi sebagai korban
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	a. Pelarangan diskusi adalah tindakan yang salah. b. Hantu PKI sebagai kampanye hitam
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Pemerintah tidak selayaknya ikut menjadikan hantu PKI sebagai permainan politik elektoral

2) Perintah Panglima, Mau Apa?

Majalah *Tempo* menempatkan judul berita “*Perintah Panglima, Mau Apa?*” pada rubrik laporan utama. Berita tersebut membahas mengenai markas besar TNI yang menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk memutar film pengkhianatan G 30 S PKI di seluruh wilayah Indonesia. Film tersebut merupakan film wajib yang diputar setiap tahun di bulan September pada era orde baru tepatnya tahun 1984. Namun, tahun 1998 film tersebut sudah tidak ditayangkan lagi karena tidak sesuai dengan semangat reformasi.

Define problem. Pemutaran film penumpasan pengkhianatan G30S PKI digambarkan oleh *Tempo* sebagai tindakan yang dilakukan oleh TNI AD untuk membuat masyarakat yakin bahwa PKI akan bangkit. Hal tersebut dijelaskan oleh *Tempo* bagaimana TNI AD beserta jajarannya mempersiapkan dengan sistematis teknis pemutaran film tersebut disetiap daerah dan beberapa upaya TNI AD melakukan tindakan untuk meyakinkan masyarakat melalui melalui tokoh masyarakat. Misalnya dengan menyediakan fasilitas seperti yang terjadi di beberapa daerah. Berikut kutipannya pada paragraf kelimabelas.

“Penggunaan fasilitas milik pemerintah milik pemerintah terlihat saat pemutaran film di Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis pekan lalu.”

Dijelaskan bahwa penggunaan fasilitas milik pemerintah menjadi cara yang sistematis dan hal tersebut menandakan bahwa kegiatan tersebut legal dimata masyarakat karena adanya support fasilitas dari pemerintah.

Tempo juga menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan TNI AD untuk meyakinkan minat masyarakat dengan cara komunikasi yang dilakukan tokoh masyarakat. Hal tersebut dijelaskan pada paragraf keempatbelas.

“Dalam surat tersebut, Markas Besar TNI memerintahkan satuan di bawahnya menggandeng tokoh masyarakat agar pemutaran film bisa ramai. Selain itu, markas pusat meminta kodam dan koramil menggandeng pemerintah daerah untuk publikasi dan tempat pemutarannya. Surat itu juga mengatur teknis jenis camilan selama nonton bareng.”

Tokoh masyarakat sengaja digandeng agar masyarakat percaya dan lebih yakin. Mengingat di daerah tokoh masyarakat merupakan orang yang dipercaya, yang memberi intruksi ketika terjadi masalah dan sifat masyarakat yang setuju

dengan apa yang diarahkan oleh tokoh masyarakat menjadi cara praktis pihak TNI AD dalam upaya mengajak masyarakat menonton film tersebut.

Diagnose causes. Yang melatarbelakangi upaya TNI AD mengajak masyarakat menonton film Pengkhianatan G30S PKI adalah diskusi pelurusan sejarah 1965-1966 yang dilakukan oleh forum 65. Diskusi yang sempat dibubarkan oleh polisi dan mendapat penolakan dari para pendemo. Hal tersebut dijelaskan *Tempo* pada paragraf kedelapan.

“Cerita turunnya perintah dari Cilangkap, Markas Besar TNI, ini bermula saat forum 65- yang berisi keluarga korban 1965-menggelar diskusi dengan tema “pelurusan Sejarah 1965-1966”. Acara yang digelar di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta di Menteng, Jakarta Pusat, sabtu dua pekan lalu, itu “mengundang” pengunjuk rasa. Massa yang berkumpul percaya bahwa acara tersebut merupakan konsolidasi kader partai komunis Indonesia. Polisi membubarkan diskusi tersebut.”

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa diskusi yang dilakukan forum 65 mengenai pelurusan sejarah 1965-1966 cukup membahayakan karena sejarah yang dibahas akan sangat berkaitan erat antara PKI dan TNI AD yang menjadi pelaku sejarah saat itu. Dengan memutar kembali film pengkhianatan G30S PKI akan mengurangi tingkat keraguan masyarakat mengenai kebenaran sejarah 65 yang selama ini di propagandakan oleh pemerintah Orde Baru.

Moral judgement. Penilaian yang diberikan *Tempo* terhadap fenomena tersebut adalah TNI AD merasa melakukan tindakan yang paling tepat dan menganggap pihaknya diposisi yang benar. hal tersebut terlihat pada statemen dari pihak TNI bahwa tidak akan menarik instruksi nonton bareng dan menganggap bahwa kegiatan tersebut sudah mendapat izin. Hal tersebut dijelaskan pada paragraf kesembilanbelas.

“Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo tak akan menarik instruksi nonton bareng film. “Kalau perintah, mau apa emang-nya?” ucap Gatot setelah berziarah dimakam presiden Soekarno, Blitar, senin pekan lalu.”

“Gatot mengatakan sudah mendapat izin dari Menteri dalam negeri TjahjoKumolo. Menurut dia film tersebut wajib ditonton generasi muda agar mereka bias memahami sejarah. Soal kritik yang dilayangkan kepada institusinya, Gatot menjawab enteng, “Emang gue pikirin”.

Berdasarkan penjelasan *Tempo* mengenai pihak TNI AD merasa bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah tepat dan harus direalisasikan karena itu adalah perintah. Selain itu TNI AD juga menganggap pemahaman sejarah yang harus dipahami oleh generasi muda harus sesuai dengan apa yang mereka propagandakan, itu artinya mereka menanggapi diskusi pelurusan sejarah 1965-1966 tidak akan menghasilkan sejarah yang benar. Selanjutnya mengenai perizinan, pihak TNI AD mengklaim bahwa kegiatan tersebut sudah mendapat izin dari menteri dalam negeri. Itu artinya apa yang dilakukan TNI AD merupakan yang diharapkan dianggap masyarakat sebagai program yang memang dari pemerintah.

Treatment recommendation. Secara kesimpulan *Tempo* memberikan tawaran penyelesaian masalah tetap dilaksanakan diskusi pelurusan sejarah 1965-1966. Ketika TNI AD mengklaim tindakan yang mereka ambil sudah mendapatkan izin, pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan kutipan yang dituliskan *Tempo* dari pihak menteri dalam negeri. Selain itu Jokowi juga memberikan tawaran yang menarik mengenai pembuatan ulang film tersebut agar dapat diterima oleh generasi milenial. Kutipan tersebut dituliskan *Tempo* pada paragraph terakhir.

“Tjahjo menolak berkomentar tentang klaim Gatot itu. Dia mengaku kementriannya tidak pada posisi

mengizinkan atau melarang pemutaran film tersebut. “Nonton silakan, tidak juga silakan”.”

“Ditengah polemik itu, presiden Joko Widodo malah mengusulkan ada film versi baru soal tragedy 1965. “Untuk anak-anak milenial, mesti dibuatkan film yang bias masuk ke mereka,” katanya. “Biar mereka paham bahaya komunisme, biar tahu juga mengenai PKI”.

Tempo menuliskan pernyataan yang diberikan oleh pihak kementrian bahwa tidak membenarkan memberi perizinan mengenai kegiatan tersebut tapi lebih kearah kebebasan kepada masyarakat. Itu artinya pihaknya juga bermaksud bahwa sejarah memang dapat dikaji ulang dan kebenaran film G30S PKI juga tak murni sebagai sejarah yang paling benar. hal tersebut didukung pernyataan Jokowi untuk membuat film baru. Secara tidak langsung dua pernyataan yang menjadi penutup pada tulisan tersebut menyiratkan bahwa sejarah memang perlu dikaji ulang.

Tabel 3. 5 Frame Berita Tempo (Berita Kelima)

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian masalah)	Pemutaran film penumpasan pengkhianatan G30S PKI sebagai tindakan TNI AD untuk membuat masyarakat yakin bahwa PKI akan bangkit
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah dan sumber masalah)	Perintah TNI AD mengenai pemutaran ulang film “Penumpasan pengkhianatan G30S PKI” dipicu oleh forum 65 yang akan melakukan pelurusan sejarah 1965-1966.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	TNI AD merasa paling benar
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Tetap dilaksanakan diskusi pelurusan sejarah 1965-1966

3) Kue Pahit Untuk Jokowi

Tempo menuliskan judul tersebut pada rubrik laporan utama. Judul tersebut menjelaskan bahwa langkah yang diambil Jokowi dalam menanggapi penyerangan diskusi pelurusan sejarah 1965-1966 akan menimbulkan penilaian yang serba salah dimata masyarakat. Mengingat tindakan yang diambil Jokowi akan dinilai tendensius disalah satu pihak dan akan menjadikan Jokowi mendapat justifikasi tertentu dari salah satu pihak.

Define problem. Teks berita tersebut digambarkan *Tempo* sebagai tindakan serba salah Jokowi dalam merespon isu kebangkitan PKI. Jokowi akan terlihat salah dimata pihak antikomunis jika membiarkan diskusi tersebut berlangsung, maka Jokowi akan dinilai pro PKI dan yang menjadi permasalahan lain adalah penyerangan mengenai kehidupan pribadi Jokowi yaitu keterkaitannya dengan PKI. Namun ketika Jokowi ikut melarang diskusi pelurusan sejarah 1965-1966 itu artinya Jokowi menoaak demokrasi dan rekonsiliasi. Karena pada dasarnya pelurusan sejarah memang perlu dilakukan. Berikut paragraf kedua yang menjelaskan sikap serba salah Jokowi.

“Sidarto menuturkan, Presiden berada pada posisi serba salah menyikapi isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Menurut dia, jika mengeluarkan larangan unjuk rasa anti-PKI, Jokowi bakal makin dicap pembela komunis. “Begitu juga sebaliknya. Ini posisi sulit,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia perjuangan itu.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bagaimanapun yang dilakukan Jokowi akan dinilai masyarakat. Mengingat ini merupakan sebuah fenomena yang bersifat pro dan kontra dimata masyarakat.

Diagnose causes. Penyebab dari permasalahan tersebut *Tempo* menegaskan berasal dari pihak yang berunjuk rasa

mengenai pelaksanaan diskusi pelurusan sejarah 1965-1966 dan pemberitaan hoaks penyebaran ideologi komunis. Permasalahan ini terjadi seperti alur sebab akibat. Jokowi yang pernah mengatakan dan memerintahkan penggebugan ketika PKI muncul menjadi acuan para pihak antikomunis. Secara tidak langsung hal tersebut dimanfaatkan oleh pihak antikomunis, sehingga kegiatan diskusi pelurusan sejarah menjadi sasaran amukan para pihak antikomunis. Dibalik amukan terdapat propaganda yang kuat dan penyebaran berita yang dianggap hoaks yaitu penyebaran ideologi komunis mengundang reaksi keras dari pihak antikomunis. Berikut pernyataan yang ditulis oleh *Tempo*.

“Massa menuding kantor LBH dijadikan tempat untuk memfasilitasi kegiatan yang berbau komunis. Polisi kemudian membubarkan acara diskusi itu.”

“Direktur LBH Jakarta Asfinawati menyebutkan yang menyebutkan ada yang menyebarkan hoaks di media sosial bahwa kegiatan di tempatnya itu untuk menyebarkan ideologi komunis.”

Berdasarkan dua pernyataan tersebut *Tempo* menjelaskan bahwa aktor dari penyebab permasalahan tersebut muncul dari pihak antikomunis. Mereka melakukan aksi unjuk rasa dan berujung pembubaran diskusi oleh polisi.

Make moral judgement. Penilaian yang disampaikan *Tempo* mengenai masalah tersebut adalah tindakan anarkisme pihak antikomunis. Tindakan yang dilakukan dianggap merugikan karena telah merusak fasilitas dan melanggar hukum. Keterangan tersebut dijelaskan pada paragraf keenam dan ketujuh pada teks berita.

“Aparat kepolisian telah menangkap 22 orang yang diduga merusak fasilitas dan kendaraan ketika unjuk rasa berlangsung. Dari yang ditangkap, polisi menetapkan tujuh tersangka. Juru bicara Kepolisian Daerah Metro Jaya,

Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono, mengatakan para tersangka dikenai pasal 216 dan 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. “Mereka tidak mengindahkan perintah polisi untuk membubarkan diri,” ujar Argo.”

“Presiden Jokowi tidak banyak bicara mengenai penyerangan terhadap LBH Jakarta. Dia hanya meminta masyarakat tidak bertindak main hakim sendiri. “Hal seperti itu serahkanlah kepada aparat,” kata Jokowi di Magelang.”

Teks diatas menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan pengunjuk rasa atau pihak antikomunis merupakan tindakan anarkisme dan pelanggaran hukum sehingga polisi melakukan penangkapan. Hal tersebut dipertegas dari pernyataan Jokowi agar tidak bertindak sewenang-wenang. Hal tersebut semakin menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak antikomunis merupakan tindakan anarkis dan tidak bermoral yang tidak sepatasnya dilakukan.

Treatment recommendation. Tawaran solusi yang diberikan *Tempo* berdasarkan keseluruhan simpulan dari teks berita tersebut adalah tetap menjaga keamanan dari provokasi yang dimanfaatkan oleh kelompok antikomunis. Hal tersebut dipertegas dengan beberapa argumen Jokowi yang dikutip *Tempo* agar masyarakat tidak terlalu larut dalam emosi. Pernyataan-pernyataan Jokowi seolah mengajak masyarakat untuk tenang dalam menghadapi situasi semacam itu, karena segala isu yang berkembang dimasyarakat pada dasarnya penuh dengan beberapa kepentingan seperti yang dialami Jokowi yaitu isu bahwa Jokowi berasal dari keluarga PKI saat pemilihan Gubernur DKI 2012. Beberapa argumen Jokowi yang mendukung solusi yang ditawarkan *Tempo* adalah sebagai berikut.

“Hal seperti itu serahkanlah kepada aparat,” kata Jokowi di Magelang.”

“Jokowi juga meminta tidak ada ketakutan terhadap kebangkitan PKI. Sebab, kata dia, sudah ada ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa masyarakat seharusnya tidak mudah terprovokasi. Karena pada dasarnya semua ketakutan belum terbukti, selain itu juga aturan di Indonesia sudah jelas.

Tabel 3. 6 Frame Berita Tempo (Berita Keenam)

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian masalah)	Tindakan serba salah Jokowi dalam merespon isu kebangkitan PKI
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah dan sumber masalah)	Kelompok yang berunjuk rasa mengenai pelaksanaan diskusi pelurusan sejarah 1965-1966 dan tuduhan adanya pemberitaan hoaks penyebaran ideologi komunis
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Tindakan anarkis pihak antikomunis
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Menjaga keamanan dari provokasi yang dimanfaatkan kelompok antikomunis

B. Analisis Pemberitaan pada Majalah Gatra

1. Era Kepresidenan Abdurrahman Wahid

a. Edisi 8 April 2000

Usulan pencabutan TAP MPRS no 25 Tahun 1966 yang menuai kontroversi dimasyarakat juga juga tak luput dari Berita yang diterbitkan *Gatra*. Pada edisi 8 April 2000 pemberitaan tersebut ditempatkan *Gatra* pada rubrik Nasional. Hal tersebut

dilakukan *Gatra* karena fenomena tersebut telah menjadi perbincangan publik yang menuai masalah hingga mempengaruhi sistem pemerintahan yang terjadi saat itu.

Terdapat dua berita yang disampaikan *Gatra*. Pertama, “*Dagang Politik Palu Arit*” yang membahas usulan Gus Dur menuai kontroversi dimasyarakat dan berbagai pihak. Kedua, “*Asap Tanpa Api*” yang berisi tuduhan wakil ketua MPR atas keterlibatan Muchtar Pakpahan dalam pertemuan komunis internasional.

1) Dagang Politik Palu Arit

Majalah *Gatra* menuliskan judul “*Dagang Politik Palu Arit*” pada rubrik Nasional dalam tulisan tersebut mengisahkan bagaimana Gus Dur tetap bersikeras mengusulkan pencabutan Tap MPRS walaupun banyak mendapat penolakan dari berbagai pihak. Penolakan dilakukan dengan melakukan unjuk rasa di istana presiden oleh berbagai kelompok organisasi masyarakat.

Define problem. Teks berita digambarkan *Gatra* sebagai kemarahan publik dalam menyusun penolakan usulan pencabutan TAP MPRS No 25 Tahun 1966. *Gatra* menjelaskan secara detail bagaimana emosi berbagai pihak dalam merespon usulan tersebut. kecenderungan jumlah sumber yang dipaparkan *Gatra* lebih banyak mengarah pada pihak kontra. Antara lain Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, Ketua MPR Amien Rais, Kiai NU serta Gerakan Pembela Keselamatan Bangsa (GPK Bangsa) bersama ratusan aktivis lainnya. Sedangkan yang menyetujui hanya PKB dan PRD. Berikut detail pembahasan *Gatra* yang dituliskan pada paragraf pembuka berita.

“SEORANG pemuda demonstran membuat atraksi. Ia mengikatkan bendera merah bergambar palu-arit di

ujung sebilah bambu. Lantas, wuss.... Bendera lambang Partai Komunis Indonesia (PKI) itu dibakarnya. Kemudian, dengan emosi yang meluap, ia mengibas-ngibaskan bendera yang menyala-nyala itu ke arah Istana Merdeka, Jakarta Pusat, dalam aksi Senin siang pekan lalu”

Aksi yang dilakukan oleh pengunjuk rasa digambarkan secara detail oleh *Gatra*, dan hal tersebut menjelaskan secara spesifik bagaimana kemarahan massa dengan membakar simbol komunisme didepan istana presiden. Kekecewaan ditunjukkan massa melalui tindakan yang mengundang kegaduhan tersebut.

Diagnose causes. Pada berita tersebut *Gatra* menempatkan Gus Dur sebagai penyebab kerusuhan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Gus Dur yang berencana mencabut TAP MPRS No 25 Tahun 1966 dianggap tidak berwenang dalam melakukan hal tersebut. Pada pemberitaan tersebut Gus Dur dianggap sebagai pemimpin yang salah dalam merencanakan sebuah kebijakan dan tindakan tersebut dinilai membuang-buang energi dan tidak seharusnya dilakukan karena masih banyak yang mesti diperbaiki pada sistem pemerintahan Gus Dur. Berikut paragraf kedua dan kedelapan pada teks berita.

“Aksi ini menuntut pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tak memprakarsai pencabutan Ketetapan (Tap) MPRS Nomor 25 Tahun 1966, tentang Pembubaran PKI dan Pelarangan Penyebaran Ajaran Komunis.”

Gatra menegaskan bahwa aksi yang dilakukan oleh massa merupakan akibat dari pemerintahan Gus Dur yang akan mengusulkan pencabutan TAP MPRS no 25/1966. Selain itu juga ditambahkan argumen bahwa apa yang dilakukan Gus Dur bukanlah hal yang tepat. Ada masalah yang lebih penting yang harusnya menjadi prioritas Gus Dur saat itu. Hal tersebut

menunjukkan bahwa Gus Dur tidak memikirkan hal yang lebih penting dan berguna untuk masyarakat. Hal tersebut disampaikan *Gatra* pada paragraf berikut ini.

“Mencabut ketetapan itu bukanlah urusan presiden, melainkan MPR,” kata Hartono. Gus Dur, menurut Hartono, sebaiknya segera mengurus pemulihan ekonomi, supaya sektor riil segera bisa jalan.”

Penjelasan pada teks tersebut merupakan akibat dari apa yang telah dilakukan Gus Dur. Sehingga jelas bahwa Gus Dur digambarkan sebagai sumber permasalahan yang kontroversial dimasyarakat.

Make moral judgement. Penilaian yang diberikan *Gatra* mengenai fenomena tersebut adalah bagaimanapun PKI menjadi sejarah yang pahit di Indonesia. Sehingga bukan perkara mudah Gus Dur melakukan pencabutan peraturan tersebut. Walaupun alasan Gus Dur tegas yaitu hak asasi manusia nyatanya tidak dapat meluluhkan hati masyarakat yang masih merasakan sakit hati atas sejarah PKI yang telah dipropagandakan orde baru. Berikut paragraf yang menjelaskan penilaian *Gatra* terhadap kebijakan tersebut.

“Tragedi yang sangat traumatik baik bagi umat beragama maupun orang PKI itu, menurut Joko, bisa saja dimaafkan. “Tapi tidak bisa dilupakan, karena itu sudah menjadi sejarah Indonesia,” katanya.”

Paragraf tersebut mewakili penilaian yang diberikan *Gatra* bahwa tidak dapat dihapus begitu saja karena sudah dianggap bagian yang membuat masyarakat takut dan traumatic sehingga muncul sikap anti terhadap komunis.

Treatment recommendation. Tawaran solusi yang disampaikan *Gatra* berdasarkan kesimpulan seluruh teks adalah usulan Gus Dur tidak menjadi solusi yang menyelesaikan permasalahan namun argumentasi Gus Dur perlu dipertimbangkan. Argumentasi mengenai koreksi sejarah serta

hak asasi manusia merupakan sikap tegas dalam melindungi warga Negara sehingga hal tersebut patut untuk dipertimbangkan. Mengingat rekonsiliasi yang menjadi tujuan utama. berikut paragraf yang ditulis *Gatra*.

“Pertama hak hukum, dan kedua pandangan politik. “Kedua hal itu dibakukan dalam satu ketetapan, makanya harus dicabut,”kata Gus Dur usai salat Jumat di Masjid Al Munawaroh, Ciganjur, Jakarta Selatan, pekan lalu.”

“Anak bekas PKI, lanjut Gus Dur, nggak bisa sekolah, nggak bisa bekerja. “Nggak adil namanya,” ujar Gus Dur dengan nada tinggi. Ia lalu mengutip sebuah ayat Al-Quran: Inna akramakum 'indallahi atqokum (yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa). “Bukan orangtuanya PKI atau tidak,” ujar Gus Dur.”

Akibat tidak adanya rekonsiliasi banyak warga Negara Indonesia yang tidak memperoleh hak yang sama dalam hal salah satunya pendidikan dan pekerjaan sehingga hal tersebut akan menghambat perkembangan suatu bangsa dan Negara.

Tabel 3. 7 Frame Berita Gatra (Berita Pertama)

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian masalah)	Kemarahan public
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah dan sumber masalah)	Gus Dur dan rencana usulan pencabutan Tap MPRS no 25 tahun 1966
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Bagaimanapun PKI menjadi sejarah pahit di Indonesia
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Usulan Gus Dur tidak menjadi solusi yang menyelesaikan permasalahan namun argumentasi Gus Dur perlu dipertimbangkan

2) Asap Tanpa Api

Asap tanpa api berita yang ditempatkan *Gatra* pada rubrik nasional membahas mengenai protes Muchtar Pakpahan Ketua Umum SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia kepada wakil ketua MPR mengenai tuduhan terlibat dalam pertemuan komunis internasional yang dilaksanakan di Australia. Dalam pemberitaan tersebut, disebutkan juga ketua PRD yang tidak terima dan tidak dengan mudah hanya dilakukan klarifikasi oleh wakil ketua MPR.

Define problem. Penonjolan berita yang dituliskan *Gatra* mengenai fenomena tersebut lebih cenderung pada kekecewaan Muchtar Pakpahan yang disebutkan oleh wakil ketua MPR Husnie Thamrin terlibat dalam pertemuan Komunis Internasional. Kekecewaan tersebut dijelaskan bahwa Muchtar Pakpahan melakukan protes melalui surat yang dikirimnya. Selain itu tanggapan serupa juga diberikan oleh Budiman Sudjatmiko selaku ketua PRD. Berdasarkan pemilihan narasumber *Gatra* cenderung memilih pihak yang merasa dirugikan. Berikut teks yang dituliskan oleh *Gatra* mengenai penjelasan tersebut.

“CAP komunis bikin kesal Muchtar Pakpahan, Ketua Umum SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia). Maka, ia mengirim surat protes kepada Wakil Ketua MPR, H.M. Husnie Thamrin. “

“Kepada Gatra, Muchtar Pakpahan mengatakan tidak tahu-menahu soal pertemuan itu. “Diundang juga tidak,” katanya kepada Gatra, sambil menekankan bahwa dirinya tak percaya pada komunisme.”

“Beres? Belum tentu. Yang disebut hadir menolak. “Itu omong kosong dan fitnah,” kata Ketua Umum PRD, Budiman Sudjatmiko”

Berdasarkan kutipan narasumber yang dituliskan *Gatra* menunjukkan bahwa berita lebih mengarah pada kekecewaan

dan rasa tidak terima dari pihak yang merasa dirugikan atas penyebutan keterlibatan dengan komunisme.

Diagnose causes. Berdasarkan berita tersebut *Gatra* menempatkan Wakil Ketua MPR Husnie Thamrin sebagai penyebab masalah. Hal tersebut terjadi karena Husnie Thamrin menyebutkan bahwa Muchtar Pakpahan mengikuti pertemuan Komunis Internasional hingga muncul dipemberitaan. Namun, tuduhan tersebut tidak terbukti sehingga ketika Muchtar Pakpahan meminta klarifikasi dan mengirim surat tidak ada reaksi penolakan. Pernyataan tersebut disampaikan *Gatra* pada paragraf keempat.

"Husnie Thamrin sendiri langsung menanggapi protes Muchtar. Dalam surat balasannya, 22 Maret 2000, Wakil Ketua MPR dari Partai Persatuan Pembangunan itu minta maaf, sekaligus meralat pernyataannya. "Ketua SBSI tidak menghadirinya," tulisnya."

Berdasarkan pernyataan dan klarifikasi yang dilakukan oleh Husnie Thamrin merupakan bukti bahwa hal yang dituduhkan dan pemberitaan mengenai Muchtar Pakpahan tidak benar.

Moral judgement. Penilaian yang diberikan *Gatra* mengenai fenomena tersebut adalah generalisasi cap komunis terhadap organisasi-organisasi pembela buruh di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari pemberitaan *Gatra* yang tidak menampilkan sebab apa yang menjadi dasar wakil MPR Husnie Thamrin menyebutkan ketua SBSI tersebut. Sehingga muncul pernyataan "*Asap tanpa api*" yaitu istilah yang disampaikan bahwa tidak ada alasan kuat yang dapat menjelaskan namun muncul tuduhan. Pernyataan tersebut dituliskan *Gatra* pada paragraf terakhir.

"Kalau sekarang baru diramaikan, saya nggak tahu apa tujuannya," ujar Budiman. Mengherankan memang: ada asap, kok apinya tidak ada."

Tuduhan tanpa alasan yang tidak adanya dasar menimbulkan reaksi marah yang disampaikan Ketua PRD yang berada pada pihak Muchtar Pakpahan.

Treatment recommendation. Tawaran solusi yang disampaikan *Gatra* berdasarkan kesimpulan seluruh teks berita adalah melakukan klarifikasi terhadap tuduhan tersebut. Hal itu dilakukan *Gatra* dengan tidak menampilkan pernyataan lain dari pihak wakil MPR selain permintaan maaf. Sehingga tidak menimbulkan pertarungan lagi ketika berita ini terbit. Berikut pernyataan maaf dari pihak wakil MPR Husnie Thamrin.

“Wakil Ketua MPR dari Partai Persatuan Pembangunan itu minta maaf, sekaligus meralat pernyataannya. “Ketua SBSI tidak menghadirinya,” tulisnya. Yang disebutnya hadir adalah utusan Komite untuk Sosialisme Indonesia, PRD, FNPBI, Asosiasi Aceh-Australia, dan Pendukung Gerakan Aceh Merdeka. Ia merujuk pada pemberitaan sebuah majalah terbitan Jakarta.”

Teks tersebut merupakan satu-satunya pernyataan dan sumber yang disampaikan *Gatra* yang berasal dari pihak MPR.

Tabel 3. 8 Frame Berita Gatra (Berita Kedua)

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian masalah)	Kekecewaan Muchtar Pakpahan
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah dan sumber masalah)	Wakil ketua MPR Husnie Thamrin yang menyebut Muchtar Pakpahan mengikuti pertemuan Komunis internasional
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Generalisasi cap Komunis terhadap organisasi pembela buruh
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Klarifikasi

2. Era Kepresidenan Joko Widodo

a. Edisi 4 Oktober 2017

Edisi 4 Oktober 2017 *Gatra* mengangkat pemberitaan mengenai isu komunisme pada rubrik laporan khusus. Hal tersebut terjadi karena pada masa itu isu komunisme memang sedang menjadi perbincangan mengingat telah dilakukan nonton bareng film pengkhianatan G30S PKI oleh TNI disetiap daerah diseluruh Indonesia. TNI menginstruksikan demikian karena kekhawatiran yang muncul akibat dari seminar pelurusan sejarah 1965-1966 yang dilakukan forum 65. Dalam laporan khusus yang disampaikan *Gatra* lebih mengangkat pemberitaan mengenai upaya rekonsiliasi.

Terdapat dua berita yang disampaikan oleh *Gatra*. Pertama, *“Ujung Jalan Rekonsiliasi Isu PKI”*. Kedua, *“Peristiwa 1948: Belanda dari Depan, PKI Tusuk dari Belakang”*. Selanjutnya tiga hasil wawancara dari berbagai pihak yang disampaikan *Gatra* antara lain *“Kembalikan Kepada Rekonsiliasi Alami”* dengan narasumber As’ad Saidi wakil Ketua Umum PBNU 2010-2015 dan mantan Wakil Kepala Bin. Selanjutnya wawancara dengan Ilham Aidit (Putra DN Aidit) *“Negara Harus Minta Maaf”*. Terakhir *“Maaf Pada PKI, No! Pada Korban, Yes!”* yang dilakukan dengan Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo yang saat ini menjadi Gubernur Lemhanas.

1) Ujung Jalan Rekonsiliasi Isu PKI

Judul tersebut ditempatkan oleh *Gatra* pada rubrik laporan khusus. Judul tersebut secara umum menjelaskan bagaimana isu kebangkitan PKI selalu muncul setiap tahun diakhir bulan September serta penyelesaian mengenai klaim siapa yang benar dan siapa yang salah pada tragedi tersebut. Dalam teks tersebut *Gatra* juga memberikan ulasan mengenai sejarah PKI serta perkembangannya .

Define problem. Berita tersebut digambarkan oleh *Gatra* sebagai keinginan rekonsiliasi yang susah tercapai. Mengingat bahwa isu PKI selalu menjadi isu sensitif dan menghadirkan emosi bagi pihak antikomunis dan pihak-pihak yang menjadi korban. Setiap tahun dibulan September akhir nampaknya isu PKI selalu muncul seperti layaknya seremonial yang memang wajib ada disetiap tahunnya. Namun, munculnya berita PKI selalu berkuat pada isu bahwa PKI akan bangkit. Sehingga keinginan dari pihak keluarga mantan PKI yang mengharapkan rekonsiliasi selalu tersandung oleh penolakan dari pihak antikomunis. Pemerintahpun juga belum menemukan titik terang. Berikut teks yang dituliskan *Gatra*.

“Saban tahun, menjelang akhir September, isu kebangkitan PKI selalu ramai. Sejarah kelam yang tak pernah tuntas ini selalu menjadi komoditas politi dan memantik ketegangan horizontal. Mungkinkah rekonsiliasi terjadi?”

“Ujung-ujungnya, perdebatan tentang siapa yang salah dan benar soal 1965 kembali menguat. Luka lama sejarah kelam bangsa ini kembali menganga. Jejak panjang PKI dalam pemberontakan pun disebut-sebut.”

Keinginan adanya rekonsiliasi nampaknya memang akan susah karena klaim benar salah masih selalu menjadi perdebatan diantara berbagai pihak. Sehingga rekonsiliasi masih belum tercapai hingga saat ini.

Diagnose causes. Penyebab atau sumber masalah yang disampaikan *Gatra* adalah isu kebangkitan PKI yang selalu muncul setiap tahun. Di tahun 2017 isu kebangkitan PKI muncul karena adanya seminar pelurusan sejarah 1965-1966 oleh forum 65 di kantor YLBHI Menteng Jakarta. Seminar tersebut dibubarkan oleh polisi karena unjuk rasa dari pihak yang menentang seminar tersebut. *Gatra* juga menjelaskan bahwa sebenarnya selain karena seminar tersebut juga karena

isu PKI menjadi komoditas politik. Berikut paragraf yang ditulis *Gatra*.

“Isu tentang kebangkitan komunisme kembali menghangat menjelang peringatan Gerakan 30 september. Kali ini menyeruak setelah diramaikan oleh aksi massa dari berbagai organisasi anti-komunis yang menggeruduk dan mengepung kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Menteng, Jakarta Pusat, Ahad dua pekan lalu. Seminar YLBHI tentang pelurusan sejarah 1965-1966 ini dituding sebagai bagian dari kebangkitan komunisme di Indonesia. Akhirnya acara bubar. Lokasi porak poranda.”

“Ia menuturkan, berkembangnya isu kebangkitan PKI saat ini lantaran menjadi konspirasi politik menjelang pemilu 2019. “Jadi, kalau memang diduga ada kebangkitan komunisme atau KI, tangkapsaja dan adili. Karena peraturannya jelas, ada Tap MPR Nomor 25 MPRS/1966,” tutur ilham.”

“Menkopolhukam Wiranto pun menjelaskan, isu PKI yang diembuskan belakangan memang berkaitan dengan tensi poitik dan disangkutkan dengan keperluan komoditas politik.”

Isu kebangkitan PKI yang terjadi setiap tahun dianggap selalu sama yaitu komoditas politik. Mengenai seminar pelurusan sejarah menjadi momen yang tepat untuk membuat ramai dikalangan masyarakat.

Make moral judgement. Penilaian yang diberikan oleh *Gatra* pada fenomena tersebut adalah rekonsiliasi alami yang akan terjadi di Indonesia. Upaya rekonsiliasi yang diharapkan oleh keluarga mantan PKI yang selalu mendapatkan penolakan dari pihak antikomunis hanya akan menimbulkan permasalahan semakin panjang sehingga rekonsiliasi selalu dianggap tidak pernah tercapai. Namun, *Gatra* menilai sebenarnya sat ini sudah terjadi rekonsiliasi secara alami melalui proses. Berikut kutipannya.

“Meski demikian, upaya rekonsiliasi bergulir cepat, terutama dimotori anak-anak muda NU. Secara kultural, upaya ini dinilai berhasil dan disebut rekonsiliasi alami. Putra-putri tokoh yang dulu bersebrangan secara politik kemudian bergabung dalam organisasi bernama Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB). Diantaranya ada putra dan putri Jenderal A. Yani, Jenderal Sutoyo, Jenderal Supardjo, dan D.N. Aidit.”

Hubungan baik antara putra putri tokoh yang bersebrangan menjadi indikator bahwa rekonsiliasi sebenarnya sudah mulai terjadi secara alami.

Treatment recommendation. Penyelesaian yang ditawarkan Gatra terhadap isu kebangkitan PKI dan rekonsiliasi adalah, pemerintah harus mengakui kekeliruan dimasa lalu namun bukan berarti pemerintah harus meminta maaf. Karena permintaan maaf terhadap keluarga mantan PKI berarti yang bersalah adalah pemerintah dan PKI benar. Namun, mengakui kekeliruan sejarah sehingga akan melegakan semua pihak. Pernyataan tersebut dikutip Gatra sebagai kalimat penutup pemberitaan tersebut yang bersumber dari pernyataan Asvi Warman Adam yaitu sejarawan LIPI.

“Tetapi perlu juga diingat, sambung Asvi, pemerintah tidak perlu meminta maaf. “Pemerintah hanya perlu mengakui adanya kekeliruan di masa lalu, berlapang dada untuk mengaku salah. Dengan begitu, akan melegakan para korban sekaligus pelaku, dari pihak manapun,” kata Asvi kepada Dewi Fadhilah Soemanagara dari GATRA.”

Kutipan diatas menjadi acuan Gatra untuk menutup berita sebagai solusi permasalahan isu kebangkitan PKI yang selalu dilontarkan pihak antikomunis dan permintaan rekonsiliasi dari pihak keluarga mantan PKI.

Tabel 3. 9 Frame Berita Gatra (Berita Ketiga)

<i>Define Problem</i>	Rekonsiliasi yang susah
-----------------------	-------------------------

(Pendefinisian masalah)	tercapai
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah dan sumber masalah)	Isu kebangkitan PKI yang selalu muncul setiap tahun (momen pembubaran seminar pelurusan sejarah 1965-1966)
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Rekonsiliasi alami akan terjadi
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Pemerintah tidak perlu meminta maaf namun mengakui kekeliruan dimasa lalu

2) Peristiwa 1948: Belanda dari Depan, PKI Tusuk dari Belakang

Berita ini dituliskan *Gatra* pada rubrik laporan khusus yang membahas mengenai sejarah pemberontakan PKI dari tahun 1926 dan pemberontakan tahun 1948. Dalam pemberontakan tersebut dijelaskan bahwa TNI berhasil melumpuhkan pergerakan PKI. Berdasarkan keterangan Ilham Aidit (putra DN Aidit) tahun 1926 PKI melakukan pemberontakan kepada Belanda, namun versi Zacky Anwar Makarim berbeda yaitu tahun 1948 PKI memanfaatkan momentum sulit untuk keuntungan sendiri bukan membantu mengusir Belanda.

Define problem. Pemberitaan tersebut digambarkan *Gatra* sebagai perjuangan TNI dalam melumpuhkan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Hal tersebut terlihat pada paragraf pembuka berita yang menjelaskan bahwa dibalik peristiwa Madiun 1948 terdapat cerita sukses TNI. Sukses yang dimaksud oleh *Gatra* adalah bagaimana TNI dapat melumpuhkan pergerakan PKI yang memberontak di Madiun saat itu. Disini *Gatra* mengidikasikan bahwa dalam persoalan

ini PKI menjadi musuh yang harus dilawan oleh TNI. Berikut teks yang dituliskan *Gatra* pada paragraf pertama dan kedua.

“Catatan panas peristiwa Madiun 1948 memiliki dua sisi. Satu sisi sebagai sejarah kelam, sisi lain menjadi cerita sukses besar TNI, khususnya Kolonel Gatot Subroto.”

“Dalam 12 hari, pemberontakan PKI Madiun bisa ditumpas. Dengan pasukan gabungan TNI dari Divisi III Siliwangi, Divisi II pimpinan Gatot Soebroto, dan Divisi I yang dikomandoi Kolonel Soengkono, serta elemen polisi dari Mobil Brigade (kini Brigade Mobil/ Brimob), para simpatisan FDR-PKI dibuat tidak berdaya.”

Teks diatas menjelaskan bagaimana perjuangan TNI yang berhasil melumpuhkan PKI sehingga PKI yang ingin menguasai Madiun berhasil dibendung oleh kerja keras TNI saat itu.

Diagnose causes. Penyebab permasalahan dalam teks tersebut yang disebutkan *Gatra* adalah pemberontakan yang dilakukan PKI. Dalam penjelasan tersebut PKI diposisikan sebagai aktor dari pemberontakan tersebut. Karena pemberontakan tersebut menuai konflik berdarah yang artinya terdapat korban pembunuhan yang dilakukan PKI. Hal tersebut dijelaskan *Gatra* pada paragraf keempat.

“Terlebih, pembunuhan itu terjadi pada kelompok santri, juga pada kelompok yang dituduh sebagai PKI.” *“Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Anthony Reid. Dia mengatakan dalam Revolusi Nasional bahwa peristiwa Madiun tahun 1948 itu adalah suatu awal konflik berdarah kaum santri dengan kaum abangan,”* *katanya.”*

Pernyataan yang tersebut menjelaskan bahwa pemberontakan yang dilakukan PKI adalah penyerangan terhadap kelompok santri, kiai dan partai islam. Sehingga dalam posisi ini PKI dianggap bersalah atas pembunuhan tersebut.

Moral judgement. Penilaian yang diberikan Gatra pada permasalahan tersebut adalah, dari semua tujuan dan pemberontakan PKI, sebenarnya PKI tidak mendukung terbentuknya Republik Indonesia. *Gatra* menganggap bahwa PKI memiliki kepentingan lain. Walaupun disebutkan oleh Ilham Aidit bahwa PKI memberontak kepada Belanda namun hal tersebut terbantahkan oleh mantan wakil ketua umum PBNU As'ad Said Ali dan Zacky Anwar Makarim. Pernyataan mengenai penilaian Gatra terhadap PKI yang tidak mendukung terbentuknya Republik Indonesia disampaikan Gatra sebagai paragraf penutup. Hal tersebut menjadi kesimpulan dari peristiwa pemberontakan PKI. Berikut paragraf kesembilan dan paragraf terakhir yang menjelaskan pernyataan tersebut.

“Sementara itu, menurut mantan Wakil Ketua Umum PBNU, As'ad Said Ali, sejak awal kemerdekaan, PKI tidak mendukung Republik Indonesia. Buktinya, pada 1948 mereka mau membuat Republik Soviet Indonesia.”

“Dalam peristiwa 1948, Zacky Anwar Makarim menjelaskan, Indonesia tengah berjuang menghadapi serangan agresi militer Belanda. Sementara PKI di belakang, bukannya membantu agenda mengusir Belanda, justru memanfaatkan momentum sulit untuk mengambil keuntungan sendiri, dengan memberontak. Indonesia harus menghadapi dua lawan; Belanda di depan, PKI di belakang.”

Kedua pernyataan tersebut menjelaskan bahwa PKI dari awal memang tidak menginginkan terbentuknya Republik Indonesia.

Treatment recommendation. Berdasarkan kesimpulan seluruh teks berita yang dituliskan *Gatra*, solusi yang ditawarkan oleh *Gatra* adalah pemeriksaan ulang sejarah. Artinya walaupun semua mengarah pada kesalahan PKI sebaiknya tetap dilakukan pemeriksaan mengingat bahwa pada

tragedi berdarah tentu akan menilai kesalahan ada pada pembunuh yaitu PKI. Berikut tawaran solusi yang dikutip *Gatra* dari pernyataan Asvi Warman Adam.

“Jadi, tahun 1948 inilah dimulainya konflik berdarah. Namun, pada hemat Asvi, semua itu tetap harus diperiksa kembali satu per satu. Sehingga tidak menjadi berlebihan.”

Berdasarkan tawaran solusi yang disampaikan *Gatra*, pemeriksaan ulang perlu dilakukan agar pengakuan dari pihak-pihak tertentu tidak menjadi hal yang berlebihan. Berlebihan dalam arti tidak terlalu subjektif.

Tabel 3. 10 Frame Berita *Gatra* (Berita Keempat)

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian masalah)	Perjuangan TNI melumpuhkan pemberontakan yang dilakukan PKI
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah dan sumber masalah)	Pemberontakan PKI tahun 1926 dan 1948
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	PKI tidak mendukung terbentuknya Republik Indonesia
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Pemeriksaan ulang sejarah

b. Edisi 11 Oktober 2017

Masih dalam perkembangan isu yang sama, edisi 11 Oktober 2017 *Gatra* kembali mengangkat isu Komunisme. Pemberitaan tersebut masih memberitakan konteks yang sama yaitu mengenai pemutaran Film G30S PKI serta perbincangan kebangkitan PKI dikalangan masyarakat. Kali ini *Gatra* menampilkan berita tersebut pada laporan utama. Hal tersebut dilakukan karena dalam berita ini lebih ditekankan pada komitmen

masyarakat terhadap ideologi Negara yaitu Pancasila. Hal tersebut ditunjukkan *Gatra* pada cover depan dengan judul besar “*PANCASILA SAKTI, PKI SELESAI*”.

Dalam laporan utama terdapat dua berita disampaikan *Gatra*. Pertama, “Bola Panas Isu PKI”. Kedua hasil wawancara dengan Zacky Anwar Makarim yaitu Mantan Kepala Badan Intelijen ABRI dengan judul “*Pancasila Berakar, Komunisme Tidak*”.

1) **Bola Panas Isu PKI**

Berita yang dituliskan *Gatra* dengan judul *Bola Panas Isu PKI* ditempatkan pada rubrik laporan utama. Berita tersebut menjelaskan mengenai instruksi Panglima TNI untuk memutar kembali film Pengkhianatan G30S PKI. Pemutaran film Pengkhianatan G30S PKI dilakukan diberbagai daerah di Indonesia. Isu kebangkitan PKI disebut-sebut sebagai alasan mengapa film ini diputar kembali. Namun, dalam berita yang disampaikan *Gatra* lebih cenderung menampilkan bahwa PKI sangat sulit untuk bangkit lagi di Indonesia.

Define problem. Pemberitaan tersebut digambarkan *Gatra* sebagai antusiasme masyarakat menyambut instruksi TNI untuk nobar (nonton bareng) film Pengkhianatan G30S PKI. hal terbukti dari paragraf pembuka hingga paragraf kelima membahas berbagai pihak yang turut melakukan nobar diberbagai tempat. Pihak-pihak yang disebutkan antara lain PAN, PKS, PKB, Golkar, MUI Madiun, Pihak pesantren Tebu Ireng, hingga presiden Jokowi. *Gatra* juga menggambarkan antusiasme tersebut secara singkat pada lead pemberitaan tersebut. berikut kutipannya.

“*Nobar film PKI diikuti warga gang sempit sampai Presiden.*”

“Sekjen Golkar, Idrus Marham, menyebut dukungan Golkar atas ajakan nobar, dengan menunjuk tayangan film itu di TVOne, televisi milik Ketua Dewan Pembina Golkar, Aburizal Bakrie, Jumat malam, 29 September.”

Kutipan tersebut mewakili penjelasan pada paragraf pertama hingga kelima mengenai antusiasme masyarakat dalam nobar yang diselenggarakan TNI disetiap daerah. Selain itu disebutkan juga dukungan Golkar juga dilakukan dengan menunjuk TVOne untuk menayangkan film tersebut mengingat pemiliknya adalah Ketua Dewan Pembina Golkar, Aburizal Bakrie.

Diagnose causes. Sumber permasalahan yang disampaikan oleh *Gatra* pada pemberitaan tersebut mengarah pada opini sebagian pihak mengenai isu kebangkitan PKI di Indonesia. Hal tersebut disampaikan *Gatra* bahwa dibalik antusiasme nobar film Pengkhianatan G30S PKI sebagian besar masyarakat tidak setuju terhadap isu kebangkitan PKI. berdasarkan survei SMCR 86,8% tidak setuju adanya kebangkitan PKI sedangkan yang setuju hanya 12,6%. Berdasarkan hasil survei SMCR dapat disimpulkan bahwa ketakutan akan bangkitnya isu komunisme sehingga dilakukan pemutaran film hanyalah opini saja. Berikut kutipan yang menjelaskan pernyataan tersebut.

“Tingginya animo publik untuk menonton film Pengkhianatan G30S/PKI itu cerminan dari apa?Tingginya gelagat kebangkitan PKI? Seriusnya ancaman PKI?”

“Survei ini menemukan, 86,8% responden tidak setuju hanya 12,6%, yang dierkirakan 12 juta orang. Jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan yang tidak setuju”

Berdasarkan kutipan diatas, seharusnya isu kebangkitan PKI bukan menjadi alasan Panglima TNI untuk menginstruksikan menonton kembali film Pengkhianatan G30S

PKI karena yang terjadi dimasyarakat, masyarakat ternyata banyak yang tidak percaya tentang isu tersebut.

Make moral judgement. Penilaian yang diberikan *Gatra* pada fenomena tersebut adalah kepercayaan isu kebangkitan PKI di sebagian masyarakat merupakan hasil dari mobilisasi politik. Artinya hanya sebagian pihak tertentu yang percaya isu kebangkitan PKI. alasan mengapa mereka mempercayai hal tersebut karena pengaruh politik dan kecenderungan politik. Seperti yang dijelaskan *Gatra* berdasarkan hasil survei yang memercayai PKI akan bangkit sebagian besar berasal dari pendukung PKS, Gerindra, dan PAN. Pandangan dari suatu partai politik tentu saja mempengaruhi pengikutnya. Berikut kutipan yang disampaikan *Gatra*.

“Segmen yang setuju terhadap kebangkitan PKI, menurut SMCR, tersebar dihampir seluruh parpol. Proporsi lebih besar berasal dari pendukung PKS, Gerindra, dan PAN. Merujuk pada peta Pilpres 2014, mereka yang setuju PKI bangkit, kebanyakan dari pemilih Prabowo ketimbang Jokowi.”

“Ini menunjukkan bahwa opini kebangkitan PKI di masyarakat tidak terjadi secara alamiah, tapi hasil mobilisasi politik tertentu.”

“Kebangkitan PKI ini sebagai manipulasi elite.”

Berdasarkan kutipan diatas jelas bahwa kepercayaan mengenai kebangkitan isu PKI dinilai hanyalah proses mobilisasi politik.

Treatment recommendation. Tawaran solusi yang disampaikan *Gatra* terhadap fenomena tersebut adalah tetap komitmen terhadap Pancasila. Hal tersebut disampaikan *Gatra* melalui kutipan dari pernyataan DinSyamsuddin. Lima paragraf terakhir yang disampaikan *Gatra* memuat bagaimana ideologi Pancasila sebagai landasan ideologi Indonesia sudah termanipulasi dengan ideologi lain bahkan ketika komunisme

disebut-sebut bangkit.. Berikut kutipan yang menjelaskan mengenai hal tersebut.

“Selama bangsa ini berpegang pada Pancasila sebagai titik temu, kesepakatan, dan dasar ideologi bidang politik dan ekonomi, saya optimistis, isme-isme yang lain tidak mengganggu,” katanya.

“Pembangunan, Kata Din, harus benar-benar berkomitmen kepada pancasila .”

“Kita harus kembalikan system politik kepada sila keempat dan system ekonomi sila kelima,” kata Din. “Sistem ekonomi dan politik kita masih jauh panggang dari api, dari Pancasila.”

Berdasarkan kutipan diatas *Gatra* menegaskan bahwa solusi yang tepat ketika komunisme merebak adalah tetap komitmen terhadap pancasila. Mengingat bahwa komunisme selalu menyerang hal-hal yang berkaitan dengan keadilan dan kemiskinan maka Pancasila sebenarnya sudah mencakup itu.

Tabel 3. 11 Frame Berita Gatra (Berita Kelima)

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian masalah)	Antusiasme masyarakat noobar (nonton bareng) film Pengkhianatn G30S PKI
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah dan sumber masalah)	Opini Isu kebangkitan PKI di Indonesia
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Isu kebangkitan PKI hasil dari mobilisasi politik
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Komitmen pada pancasila

BAB IV

PEMBAHASAN

Tempo dan *Gatra* telah menampilkan beberapa pemberitaan mengenai PKI pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Isu PKI hampir setiap tahun selalu menghiasi media massa seolah menjadi pemberitaan yang tidak ada habisnya karena memiliki porsi emosional bagi pembaca sehingga selalu laku untuk diangkat media.

Pemilihan berita yang dianalisis mengenai isu PKI yang telah diterbitkan pada majalah *Tempo* dan *Gatra* telah berdasarkan fenomena yang telah terjadi di Indonesia dan mempengaruhi sistem pemerintahan mengingat penelitian ini merujuk pada isu PKI disetiap era kepresidenan. Fokus analisis dilakukan pada pemberitaan usulan pencabutan TAP MPRS no 25 Tahun 1966 pada era kepresidenan Gus Dur yang diterbitkan *Tempo* dan *Gatra* pada bulan April tahun 2000. Sedangkan pada era kepresidenan Jokowi adalah berita mengenai pemutaran ulang Film yang disebut-sebut sebagai pesan pemerintahan Orde Baru yaitu “*Pengkhianatan G30S PKI*” karya Arifin C Noor. Film tersebut diputar sebagai reaksi TNI AD terhadap hiruk pikuk diskusi pelurusan sejarah 1965-1966 oleh forum 65.

Tentunya *Tempo* dan *Gatra* memiliki framing yang berbeda dalam memberitakan isu-isu PKI tersebut, mengingat latar belakang dan ideologi media tersebut berbeda. Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya berikut kecenderungan *Tempo* dan *Gatra* dalam memberitakan isu tersebut.

A. Framing pada Majalah Tempo

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada majalah *Tempo* mengenai pemberitaan PKI era kepresidenan Gus Dur dan Jokowi dengan latar belakang kemunculan isu PKI yang berbeda terdapat empat penonjolan pemberitaan yang sama dari setiap era kepresidenan pada *Tempo*. Nampaknya *Tempo* konsisten dalam memandang isu PKI yang

terjadi setiap tahunnya yaitu selalu memberikan penonjolan berpihak pada keluarga korban PKI dan mantan anggota PKI yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Setidaknya terdapat empat bahasan pokok yang mewakili pandangan *Tempo* terhadap pemberitaan isu PKI. Pertama, mengenai pelarangan ideologi komunisme di Indonesia. Kedua, untuk apa isu Komunisme atau dalam konteks ini adalah PKI selalu dimunculkan di Indonesia. Ketiga, siapa yang membuat masyarakat selalu sensitif terhadap isu PKI. dan terakhir bagaimana perlunya Rekonsiliasi dan pandangan *Tempo* sendiri terhadap rekonsiliasi mengenai kasus tersebut. berikut pembahasannya.

1. Pelarangan Ideologi Komunisme Tidak Relevan dengan Zaman

Pelarangan mempelajari dan mencari tahu ideologi komunisme dipandang *Tempo* sebagai tindakan yang sangat tidak relevan dengan zaman. Berulangkali *Tempo* selalu menunjukkan fakta-fakta mengenai ideologi komunisme sudah tidak berkembang lagi karena sudah tidak laku lagi. Beberapa kali *Tempo* menegaskan bahwa PKI tidak mungkin bangkit lagi. Sehingga mempelajari ideologi tersebut sangat diperbolehkan mengingat perkembangan jaman dan dijadikan sebagai ilmu pengetahuan.

Sikap yang ditunjukkan *Tempo* terlihat dari dukungan *Tempo* terhadap usulan pencabutan TAP MPRS no 25 tahun 1966 pada pemberitaan isu PKI pada era kepresidenan Gus Dur. Sedangkan berita yang diangkat *Tempo* pada era kepresidenan Jokowi *Tempo* menunjukkan sikap yang tidak setuju jika pelurusan sejarah 1965-1966 dibubarkan dengan alasan adanya isu penyebaran ideologi komunisme pada peserta diskusi.

Berdasarkan berita yang diterbitkan *Tempo* pada era kepresidenan Gus Dur terdapat sikap yang sama ditunjukkan oleh *Tempo* yaitu pada berita “*Melarang Marxisme-Leninisme itu Buat Apa, Bung?*” argumen *Tempo* sangat jelas yaitu mengenai kebebasan dalam mengakses informasi. Sama halnya dengan berita “*Kue Pahit Untuk Jokowi*” yang

diterbitkan pada era kepresidenan Jokowi. Dalam berita tersebut penyebab dari kerusuhan yang terjadi karena pihak yang terprovokasi karena ketakutan bahwa ideologi komunis akan tersebar.

Konstruksi yang diciptakan *Tempo* menyampaikan makna kepada publik bahwa keadaan Indonesia yang sama sekali bukan berideologi komunis seharusnya tidak perlu dipermasalahakan dan tidak perlu ditakutkan. Seperti yang disampaikan oleh Bagja selaku Redaktur Pelaksana majalah *Tempo* yang menjelaskan *Tempo* didirikan untuk melawan sosialisme komunisme dan tidak ada perubahan sampai sekarang. Yang dilawan kebijakan sehingga bukan berarti menyetujui adanya PKI di Indonesia melainkan hanya kebijakan yang membatasi dalam mengakses ideologi tersebut sebagai sumber pengetahuan.⁹²

Realitas-realitas yang disampaikan *Tempo* mengenai ideologi komunisme tentu saja berdasarkan fakta yang sesuai kondisi dilapangan. Karena tugas media adalah menyusun sebuah realitas dan membentuk wacana yang bermakna.⁹³

Tempo ingin mengajak publik untuk melihat keadaan Indonesia saat ini, bagaimana ideologi komunisme sudah tidak mampu lagi mendapatkan dukungan. Sehingga melarangpun sepertinya memang sudah tidak ada gunanya.

2. Kemunculan Isu Komunisme Digunakan untuk Menyerang Presiden

Isu PKI yang selalu muncul disetiap tahun digambarkan *Tempo* sebagai tindakan untuk menyerang presiden disetiap periodenya. Masyarakat yang sangat sensitif terhadap isu PKI dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menuduh dan menyerang presiden yang tengah memimpin. *Tempo* konsisten dalam memberi penilaian tersebut.

⁹² Bagja, wawancara 22 Desember 2017

⁹³ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, (Penerbit Granit, Jakarta: 2004), hal. 11

Usulan presiden Gus Dur mengenai pencabutan TAP MPRS no 25 tahun 1966 yang mengundang kontroversi dimaknai sebagai tindakan yang tepat oleh *Tempo* mengingat tujuan dari usul tersebut sesuai dengan tujuan *Tempo*. *Tempo* berpijak pada demokrasi, hak asasi manusia dan pluralisme.⁹⁴ Sesuai dengan tujuan Gus Dur saat itu yaitu penyeteraan hak asasi pada mantan keluarga PKI dan masyarakat yang tertuduh sebagai anggota PKI. Namun, tindakan tersebut nyatanya menuai kontroversi dan malah menjatuhkan Gus Dur. Hal tersebut ditunjukkan oleh *Tempo* atas rencana Gus Dur yang memperoleh banyak penolakan dan seolah tidak tepat. Seperti yang disampaikan oleh Pramodya Ananta Toer mengenai penolakan permintaan maaf Gus Dur. Serta pihak-pihak lain yang meremehkan rencana Gus Dur. Sehingga yang terjadi dimasyarakat adalah tidak lagi mempercayai Gus Dur.

Sedangkan pada era kepresidenan Jokowi sangat jelas disebutkan oleh *Tempo* pada opini yang berjudul “*Hantu PKI Dan Politik Elektoral 2019*” tulisan tersebut merupakan hasil dari sikap redaksi *Tempo* yang menyatakan bahwa kemunculan isu PKI sebagai kepentingan politik menyambut pemilu 2019. Pemilihan kata “*Hantu*” sebenarnya lebih mengacu pada sebuah objek yang seringkali ditakuti oleh masyarakat, namun selayaknya hantu komunisme sebenarnya juga tidak berwujud. Mengingat beberapa kali *Tempo* sering menyebutkan bahwa PKI telah dihantukan oleh Orde Baru. Dalam penggunaan bahasa tentu saja akan berimplikasi terhadap bentuk konstruksi realitas serta makna yang ada didalamnya.⁹⁵ Melihat latar belakang *Tempo* yang menerapkan genre jurnalisme sastra dalam

⁹⁴ Bagja, wawancara 22 Desember 2017

⁹⁵ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, (Jakarta: Penerbit Granit, 2004), hal. 13

berbagai tulisannya maka tidak heran jika narasi-narasi yang disampaikan *Tempo* lebih puitis.⁹⁶

Disitu juga dijelaskan bahwa munculnya isu PKI untuk melorotkan pamor Jokowi, pola tersebut mirip pada tahun 2014 atas tuduhan Jokowi berasal dari keluarga PKI. Sehingga tujuannya untuk menyerang Jokowi dan mengalahkan pemilu 2019.

Bukan tanpa alasan *Tempo* melakukan justifikasi sedemikian rupa menurut Abdul Manan, wartawan senior *Tempo* tidak akan menulis berita jika tidak ada fakta yang mendukung dan tentunya melalui tahap konfirmasi dari sumber berita.⁹⁷ Berdasarkan penilaian *Tempo* mengenai isu PKI selalu muncul untuk menyerang presiden nampaknya memang terjadi di Indonesia berdasarkan paparan argumen yang disampaikan *Tempo*. Disini, *Tempo* memberikan opsi kepada pembaca bahwa faktanya isu PKI selalu diidentikkan untuk menyerang presiden yang tengah memimpin.

3. Orde Baru dan TNI AD Aktor yang Menyebabkan Masyarakat Takut dengan Isu PKI

Ketakutan masyarakat terhadap PKI sampai saat ini merupakan propaganda yang telah dilakukan oleh Orde Baru dan TNI AD. *Tempo* selalu menyebutkan hampir diseluruh berita mengenai isu PKI bahwa Orde Baru yang membuat masyarakat semakin takut dengan komunisme. Bahkan *Tempo* selalu menyebut PKI sengaja *dihantukan* yang dibuat oleh Orde Baru dengan tujuan menakuti masyarakat. Penyebutan bahwa Orde Baru dan TNI AD sebagai penyebab utama ditunjukkan *Tempo* pada hampir seluruh berita yang terbit di era kepresidenan Gus Dur maupun Jokowi. Sesuai dengan yang disampaikan Bagja bahwa Orde Baru adalah kekuasaan yang

⁹⁶ Andreas Harsono, *Jurnalisme Sastrawi (Antologi Liputan Mendalam dan Memikat)*, (Jakarta: Kepustakaan Gramedia Populer, 2008), hal. xii

⁹⁷ Abdul Manan, *Wartawan Tempo*, Jakarta 22 desember 2017

dijalankan dengan meneror dan menindas. Melanggar HAM dan melanggar demokrasi.⁹⁸

Berdasarkan berita yang telah diterbitkan pada era kepresidenan Gus Dur, “*Melarang Marxisme-Leninisme itu Buat Apa, Bung?*” disebutkan bahwa Orde Baru yang sengaja membuat PKI dan komunisme menjadi hal yang misterius. Selain itu berita dengan judul “*PKI, Hantu atau Dihantukan?*” yang membahas mengenai pro kontra usulan Gus Dur mencabut TAP MPRS no 25 Tahun 1966, Tempo menjelaskan bahwa sumber permasalahannya adalah Orde Baru yang mengkampanyekan antikomunis sehingga masyarakat menolak usulan Gus Dur.

Sedangkan pada era kepresidenan Jokowi berita “*Hantu PKI dan Politik Elektoral 2019*” merupakan sikap yang ditunjukkan Tempo bahwa dibalik penyerangan yang dilakukan pihak demonstran adalah purnawirawan jenderal. Selanjutnya berita yang berjudul, “*Perintah Panglima, Mau Apa?*” merupakan bukti bahwa TNI AD memiliki kekuasaan atas diputarnya kembali film *Pengkhianatan G30S PKI*. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali pada masyarakat agar yakin bahwa PKI seperti yang mereka propagandakan pada masa Orde Baru.

Jika menyebut Orde Baru dan TNI AD sebenarnya secara tidak langsung dosa besar ada pada Soeharto. Berdasarkan analisis Soebandrio dalam buku yang ditulis Asvi Warman Adam mengatakan bahwa ada beberapa varian kudeta merangkak yang sudah disusun oleh Soeharto. Pertama, menyingkirkan jenderal yang dianggap sebagai saingannya pada 1 Oktober 1965. Kedua, membubarkan PKI dimana partai tersebut mendapat banyak dukungan dan mendukung Soekarno. Ketiga, menangkap 15 menteri yang loyal kepada Presiden Soekarno.

⁹⁸ Bagja, Redaktur Pelaksana Tempo, Jakarta, 22 Desember 2017

Dan terakhir, merebut kekuasaan.⁹⁹ Dan yang paling membuat pengaruh sejarah adalah sumber media yang boleh terbit hanya Harian Yudha dan Harian Angkatan Bersenjata dibawah komando Soeharto.

4. Pelanggaran HAM dan Perlunya Rekonsiliasi untuk Pelurusan Sejarah

Fenomena yang telah terjadi di Indonesia mengenai isu PKI yang begitu sensitif dimasyarakat dinilai *Tempo* sebuah kasus pelanggaran hak asasi manusia. Maka perlu dilakukan rekonsiliasi dan pelurusan sejarah. Berdasarkan berita yang telah diangkat oleh *Tempo* hampir seluruhnya menonjolkan aspek pelanggaran HAM kepada keluarga mantan PKI maupun mantan anggota PKI.

Wacana yang dibangun oleh *Tempo* tentunya sesuai dengan ideologi yang dianut *Tempo*, meskipun pihak *Tempo* tidak mengatakan bahwa mereka mengklaim hal tersebut sebagai ideologi namun yang terjadi adalah muncul pada berita yang disampaikan. Ideologi menjadi faktor yang mempengaruhi isi media jika dihubungkan dengan media massa maka mengacu pada kecenderungan media dalam memproduksi informasi.¹⁰⁰ Sesuai yang disampaikan Bagja, PKI pada orde baru adalah pihak yang ditindas diadili tanpa alasan, disini *Tempo* membela PKI dalam hak hidup, hak kebebasan dan setara dengan yang lain. Karena PKI dan bukan PKI tidak cukup jelas pada massa Orde Baru. Yang ditindas oleh kesewenang-wenangan. Tapi tidak membela ideologi. *Tempo* mempertegas bahwa yang dilakukan dan kecenderungan dalam keberpihakan mengacu pada memperjuangkan hak universal.¹⁰¹

Berdasarkan berita yang diterbitkan *Tempo* pada era kepresidenan Gus Dur pada semua judul memberikan tawaran solusi untuk

⁹⁹ Asvi Warman Adam, *Membongkar Manipulasi Sejarah*, (Jakarta: Penerbit Kompas 2009), Hal.153

¹⁰⁰ Shoemaker dan Reese, *Mediating The Message: Theories Of Influence On Mass Media Content*, (New York: Longman Publisher, 1999), hal 229

¹⁰¹ Bagja, wawancara, Jakarta, 22 Desember 2017

mendukung rencana Gus Dur mencabut TAP MPRS no 25 Tahun 1966 dan tercapainya rekonsiliasi. Pada judul “*Melarang Marxisme-Leninisme itu Buat Apa, Bung?*” disebutkan dengan jelas bahwa *Tempo* menyebutkan agar TAP MPRS tersebut dicabut. Selanjutnya, “*PKI, Hantu atau Dihantukan?*” dalam paragraf terakhir *Tempo* menyebutkan bahwa tragedi G30S menciptakan luka yang tak tersembuhkan dan berbagai hujatan maka perlu dilakukan rekonsiliasi untuk masa depan yang lebih baik. Terakhir, “*Islam, Maaf dan PKI*” tulisan Ahmad Sahal yang menjelaskan sejarah masa lalu antara Islam dan PKI. Dalam tulisan tersebut terjadi pelanggaran HAM karena kebencian. Kondisi yang demikian telah dimanfaatkan Orde Baru sehingga terjadi ketidakadilan. Dari fenomena tersebut tawaran solusi yang disampaikan adalah saling memaafkan agar rekonsiliasi tercapai.

Sedangkan berita yang terbit pada era kepresidenan Jokowi sikap *Tempo* dalam memandang pembubaran diskusi 1965-1966 dan reaksi TNI AD yang memutar ulang film Pengkhianatan G30S PKI adalah tetap memihak pada pihak yang akan melakukan diskusi. Pada berita yang berjudul “*Perintah Panglima, Mau Apa?*” *Tempo* memberikan rekomendasi agar tetap dilaksanakan diskusi pelurusan sejarah 1965-1966.

Mengingat PKI sebagai dalang satu-satunya mengenai kasus G30S untuk era sekarang sangat diragukan kebenarannya. Oleh karena itu pelurusan sejarah sudah sepantasnya dilakukan. Mengingat selama 32 tahun Orde Baru sejarah tidak terbuka kepada publik.

B. Framing pada Majalah Gatra

Gatra cukup memiliki pandangan yang konsisten dalam memandang isu kebangkitan PKI. Hal tersebut tampak pada pemberitaan yang ditampilkan *Gatra* dari era kepresidenan Gus Dur dan Jokowi. Berdasarkan penonjolan isu berita *Gatra* cukup berimbang dalam memberikan porsi pada setiap pihak.

Setidaknya, terdapat empat garis besar dari pemberitaan yang ditampilkan *Gatra*. Pertama mengenai pembebasan ideologi komunisme yang perlu dipertimbangkan karena traumatic sejarah bagi beberapa pihak. Kedua, munculnya isu komunisme sebagai wujud bahwa pemerintahan sedang melemah. Ketiga, TNI AD sebagai pihak yang melawan PKI yang tengah memberontak. Terakhir, tawaran solusi mengenai rekonsiliasi yang menuai pro kontra sebaiknya dilakukan secara alami dan tentunya pemeriksaan ulang sejarah. Berikut pembahasannya.

1. Pembebasan Ideologi Komunisme Perlu Dipertimbangkan Karena Traumatik Sejarah dan Tidak Sesuai dengan Ideologi Bangsa

Meskipun kini PKI sudah tidak laku lagi di Indonesia, nyatanya ideologi komunisme masih menakutkan dan dianggap sebagai ancaman bagi sebagian pihak. *Gatra* dalam pemberitaan yang disampaikan nampaknya agak ragu-ragu menunjukkan sikap mendukung atau mengatakan tidak untuk rencana pencabutan TAP MPRS no 25 tahun 1966 pada era kepresidenan Gus Dur. Sedangkan berita yang diterbitkan pada era kepresidenan Jokowi menanggapi isu PKI yang merebak karena adanya seminar yang dilakukan forum 65 dan dibubarkan oleh pihak polisi atas desakan pendemo yang tidak setuju dengan adanya kegiatan tersebut hingga diputarnya film *Pengkhianatan G30S PKI* oleh TNI AD disampaikan *Gatra* bahwa ideologi komunisme tidak sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia. Berdasarkan hasil analisis pada berita yang diterbitkan, *Gatra* ingin menyampaikan bahwa pembebasan ideologi komunisme perlu dipertimbangkan karena faktor traumatik sejarah.

Dalam menampilkan berita, *Gatra* memilih untuk tidak cenderung terlalu berpihak kepada salah satu pihak hal tersebut terlihat dari penonjolan isu yang seolah tidak menyetujui usulan Gus Dur misalnya, namun tetap memberikan kesimpulan yang memberikan penilaian positif terhadap argumen Gus Dur. Hal tersebut merupakan salah satu strategi konstruksi realitas dalam sasaran analisis framing salah

satunya menemukan aturan dan norma. teknik tersebut digunakan untuk mengetahui perspektif serta pendekatan yang digunakan media dalam mengkonstruksi fenomena, sehingga akan membantu bagaimana pesan diorganisir dan dipahami.¹⁰² Dalam hal ini *Gatra* ingin memberikan pemahaman kepada publik agar lebih bijak dalam menanggapi isu PKI. Dengan membangun pesan yang tidak menyalahkan semua pihak dan tidak membenarkan pihak.

Pesan yang disampaikan *Gatra* mengenai pemberitaan usulan Gus Dur mencabut TAP MPRS no 25 Tahun 1966 pada berita “*Dagang Politik Palu Arit*” disampaikan bahwa PKI telah menjadi sejarah pahit di Indonesia. Terlepas dari argumentasi yang disampaikan oleh Gus Dur memang dibenarkan namun disini ada beberapa pihak yang merasakan pahitnya sejarah tersebut. Terbukti dari pemberitaan *Gatra* yang menyampaikan bagaimana kemarahan dan aksi anarkis yang dilakukan pihak kontra.

Sedangkan pada pemberitan yang muncul pada era kepresidenan Jokowi setidaknya terdapat dua berita yang menyatakan bahwa ideologi komunisme perlu dipertimbangkan. “*Peristiwa 1948: Belanda dari Depan, PKI Tusuk dari Belakang*” merupakan judul yang diangkat *Gatra* untuk disampaikan kepada publik bahwa PKI tidak mendukung terbentuknya NKRI. Namun walaupun demikian *Gatra* cukup bijak menanggapi fakta tersebut dengan mengatakan perlunya pemeriksaan sejarah. Berita selanjutnya “*Bola Panas Isu PKI*” yang menegaskan bahwa ideologi yang tepat adalah Pancasila.

Berdasarkan pemberitaan yang disampaikan *Gatra* menurut hemat saya, *Gatra* nampaknya masih ragu menentukan sikap dalam keberpihakan. Disatu sisi memang PKI sudah tidak akan bangkit namun, sejarah pahit itu masih membekas dan tidak terlupakan. Namun sebagaimana pers menurut Aristides Kattopo jurnalis senior

¹⁰² Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, (Jakarta: Penerbit Granit, 2004), hal. 21-23

dalam wawancara dalam buku *Politik Media mengemas Berita* menyampaikan bahwa pers harus menunjukkan keberpihakan. Keberpihakan yang dimaksud adalah bukan berpihak terhadap siapa melainkan pada keadilan seperti hak asasi manusia, demokrasi dan kepentingan umum dengan menjaga profesionalisme dan dan tetap menyajikan fakta-fakta sesuai kaidah jurnalistik.¹⁰³ Dalam konteks ini sebenarnya sudah jelas bagaimana posisi keluarga mantan PKI dan mantan anggota PKI.

2. Isu Komunisme Sebagai Alat Untuk dari Melemahkan Pemerintah dan Mobilisasi Politik

Niat baik Gus Dur untuk mencabut TAP MPRS no 25 Tahun 1966 menuai kontroversi. Penolakan dilakukan berbagai pihak masyarakat hingga pejabat pemerintahan. Upaya rekonsiliasi yang diusulkan Gus Dur dianggap sebagai tindakan yang tidak penting oleh tokoh-tokoh lain karena sistem perekonomian saat itu sedang carut marut sehingga tindakan yang tepat dilakukan Gus Dur adalah memperbaiki sistem perekonomian di Indonesia bukan malah mengusulkan yang tidak perlu.

Sebenarnya banyak faktor utama mengapa Gus Dur banyak mendapat respon tidak menyenangkan, karena pada masa Gus Dur memimpin merupakan masa transisi dari orde baru menuju reformasi. Sehingga tatanan-tatanan kebijakan pemerintahan banyak yang diubah oleh Gus Dur dan hal tersebut tidak lazim di masa orde baru sehingga apa yang dilakukan Gus Dur dinilai kontroversi.¹⁰⁴

Hal tersebut yang menimpa Gus Dur dan membuat namanya semakin tidak disenangi berbagai pihak. Hal tersebut disebutkan *Gatra* pada berita yang berjudul “*Dagang Politik Palu Arit*” berdasarkan penonjolan yang dilakukan *Gatra* alasan yang menjadikan kemarahan

¹⁰³ Bimo Nugroho dkk, *Politik Media Mengemas Berita*, (Yogyakarta: LKiS 1999), hal 209

¹⁰⁴ Wawancara, Asrori S Karni, Jakarta, 22 Desember 2017

publik adalah usulan Gus Dur dianggap tidak menjadi solusi yang dapat menyelesaikan masalah. Hal itulah yang menyebabkan posisi Gus Dur semakin melemah dipemerintahan. Selanjutnya “*Asap Tanpa Api*” yang menunjukkan persaingan politik pada partai politik saat itu yang diserang karena kecenderungan ideologi tertentu.

Pada era kepresidenan Jokowi isu PKI digunakan sebagai alat mobilisasi politik. Berdasarkan pemberitaan yang diterbitkan *Gatra* “*Bola Panas isu PKI*” berita tersebut membahas mengenai reaksi TNI AD atas munculnya isu penyebaran ideologi komunis oleh forum 65. Akibat dari isu tersebut TNI AD memberikan kejutan untuk masyarakat yaitu memutar ulang film Pengkhianatan G30S PKI. dari momen pemutaran film tersebut dimanfaatkan oleh berbagai partai politik melalui dukungan yang diberikan. Diantaranya PAN, PKS, PKB, Golkar. Dukungan yang mungkin paling mencolok adalah dari Golkar, yaitu dengan memberikan ruang untuk menyiarkan di stasiun TVOne, yang kita tahu Aburizal bakrie pemiliknya adalah Ketua Dewan Pembina Golkar.

Gatra ingin menyampaikan kepada publik bahwa isu kemunculan PKI hanyalah untuk kepentingan politik tertentu agar masyarakat tidak berlarut-larut dalam pemberitaan tersebut.

3. TNI AD Sebagai Pelindung Negara dari Bahaya Komunisme

Gatra tidak memberikan justifikasi siapa yang salah dan siapa yang dibenarkan dalam sejarah pahit PKI di Indonesia. Berita yang disampaikan *Gatra* mengidentifikasi bahwa TNI AD adalah pihak yang mampu melindungi kekacauan pada saat itu karena mampu melawan PKI. Secara tidak langsung *Gatra* menyebutkan bahwa PKI berada dipihak yang salah. Namun, *Gatra* tidak serta merta memberikan penilaian bahwa PKI yang paling disalahkan hal itu terbukti dari setiap rekomendasi penyelesaian yang disampaikan *Gatra* yaitu pemeriksaan ulang sejarah dan komitmen terhadap Pancasila.

Bukan tanpa alasan *Gatra* menampilkan berita dengan bersifat seolah abu-abu dan tidak memihak siapapun, hal ini berkaitan dengan ideologi dan latar belakang *Gatra*. Latar belakang pendiri *Gatra* sedikit banyak akan memberikan pengaruh dalam menampilkan berita. Hal ini semacam hegemoni yang didasarkan pada pengalaman sosial yang telah didominasi secara konstan, dimana dominasi tersebut yang menjadi dasar ideologi dan berhubungan dengan sosial mereka.¹⁰⁵ Maksudnya adalah ketika media tersebut akan mengambil suatu keputusan dalam penonjolan berita akan mempertimbangan siapa saja yang berada dibelakangnya, dalam hal ini adalah tokoh dibalik berdirinya media dan apa tujuannya mendirikan media. Dalam sejarah berdirinya *Gatra*, pendirinya dinilai cukup dekat dengan militer dalam hal ini adalah TNI AD yaitu Gatot Subroto salah satu tokoh yang memimpin pemberantasan PKI tahun 1948. Hal tersebut dibenarkan oleh Asrosi S Karni, redaktur pelaksana *Gatra* yang mengatakan akan mempengaruhi dan sedikit banyak akan memberikan warna namun keputusan mutlak tetap berada pada rapat dan perannya hanya bersifat tukar menukar informasi mengenai tragedi tersebut.¹⁰⁶

Berdasarkan berita yang diturunkan *Gatra* pada era kepresidenan Jokowi terdapat beberapa berita yang menyebutkan bahwa TNI AD sebagai pihak yang mampu melindungi Negara dan berhasil melawan PKI. “Peristiwa 1948: Belanda dari Depan, PKI Tusuk dari Belakang” judul tersebut menjelaskan bagaimana TNI pada saat itu melawan dua pihak sekaligus yaitu Belanda dan PKI. Namun, yang lebih ditonjolkan oleh *Gatra* adalah perlawanan yang dilakukan TNI AD terhadap PKI. TNI AD berhasil melumpuhkan PKI yang akan melakukan penyerangan di Madiun tahun 1948. Namun *Gatra* nampaknya agak sedikit memberikan porsi yang agak seimbang dengan menyebutkan bahwa kebenaran tersebut tetap harus diperiksa kebenarannya.

¹⁰⁵ Shoemaker dan Reese, *Mediating The Message : Theories Of Influence On Mass Media Content*, (New York Longman Publisher, 1996), hal 223

¹⁰⁶ Wawancara, Asrosi S Karni, Redaktur Pelaksana *Gatra*, 22 Desember 2017

Selanjutnya berita “*Bola Panas Isu PKI*” yang menonjolkan bagaimana tindakan TNI AD dengan kemunculan isu PKI. pada berita tersebut dijelaskan bahwa keputusan TNI AD memutar ulang film Pengkhianatan G30S PKI mendaat respon yang luar biasa dari berbagai lapisan masyarakat. Berdasarkan keberhasilan TNI AD mengumpulkan massa untuk melakukan nobar film Pengkhianatan G30S PKI merupakan upaya yang untuk mengingatkan kepada masyarakat bagaimana bahaya komunisme. Sehingga masyarakat sadar apa untuk saling menjaga ketentraman Negara.

Pembahasan mengenai *Gatra* yang tidak memberikan justifikasi salah benar secara tegas karena adanya pengaruh latar belakang dari pendirian media itu sendiri. Berita *Gatra* bisa jadi menjadi berita yang terlihat tidak memihak siapapun dalam isu kebangkitan PKI serta justifikasi siapa yang paling bersalah. Hal tersebut cenderung lebih aman dilakukan mengingat sensitifnya isu tersebut pada masyarakat Indonesia.

4. Rekonsiliasi Alami dan Pemeriksaan Ulang Sejarah

Gatra nampaknya lebih mengajukan penyelesaian secara damai kepada masyarakat agar tidak menuai keresahan dikedua belahpihak mengingat rekonsiliasi yang dipandang *Gatra* cukup sulit untuk tercapai. Tawaran yang cenderung aman yaitu rekonsiliasi alami. Rekonsiliasi alami nampaknya akan sangat melegakan bagi pihak yang menganggap PKI sebagai pihak yang salah dalam sejarah pahit itu namun, akan sangat melelahkan bagi pihak keluarga mantan PKI dan mantan anggota PKI yang harus menunggu. Sebagai penyeimbang *Gatra* memberikan opsi bahwa tetap harus dilakukan pemeriksaan ulang sejarah. Hal itu perlu dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang dilebih-lebihkan.

Dalam hal ini *Gatra* ingin memposisikan sebagai media yang memberikan solusi dan memberikan pengaruh kepada publik mengenai permasalahan PKI yang tak pernah mencapai ujung. Disini *Gatra*

membentuk frame bagaimana menciptakan kepercayaan yang menjadi landasan dasar wartawan dalam memproduksi teks tertentu. Kepercayaan dan penilaian tersebut melekat secara sosial sebagai sikap kesadaran sosial.¹⁰⁷ Kesadaran sosial disampaikan *Gatra* dengan menunjukkan bahwa upaya rekonsiliasi yang tak pernah mencapai kesepakatan tidak seharusnya dipaksakan. Dan yang paling tepat adalah menyadari atas kesalahan masing-masing.

Berdasarkan berita yang diterbitkan *Gatra* yaitu “*Ujung Jalan Rekonsiliasi Isu PKI*” berita tersebut membahas mengenai kecilnya kemungkinan akan tercapainya rekonsiliasi di Indonesia soal sejarah 1965. Untuk itu *Gatra* memberikan tawaran mengenai rekonsiliasi alami yang artinya keikhlasan dari kedua belah pihak untuk saling memaafkan dan mengakui kesalahan, bukan menjustifikasi salah satu pihak yang dianggap salah harus meminta maaf kepada yang benar. Namun, pemeriksaan ulang sejarah tetap harus dilakukan mengingat kebenaran sejarah 1965 selalu menjadi perdebatan pada masyarakat, persoalan tersebut juga dibahas *Gatra* pada berita yang berjudul “*Peristiwa 1948: Belanda dari Depan, PKI Tusuk dari Belakang*” .

Solusi yang ditawarkan *Gatra* yang tidak memihak tersebut diungkapkan oleh Aditya wartawan *Gatra* bahwa, isu PKI sebenarnya tidak ada yang baru intinya adalah sama masalah HAM, kebiadaban sejarah yang di klaim dari pihak antikomunis serta sejarah yang penuh kontroversi. Dari hal tersebut *Gatra* tidak ingin larut dalam isu tersebut yaitu dengan cara menyajikan berita secara seimbang dan tidak berpihak.¹⁰⁸ Dari hal itulah *Gatra* selalu enggan untuk mendukung salah satu pihak.

C. Perbandingan Framing Tempo dan *Gatra*

Isu kebangkitan PKI menunjukkan peristiwa yang serupa. Serupa yang dimaksud adalah fakta dari cerita siala dan bagaimana PKI serta

¹⁰⁷Bimo Nugroho dkk, *Politik Media Mengemas Berita*, (Yogyakarta: LKiS 1999), hal 25

¹⁰⁸ Wawancara, Aditya Kirana, wartawan *Gatra*, Jakarta, 22 desember 2017

korban dan pelaku seharusnya sama namun hal tersebut bisa menjadi berbeda ketika media itu mengangkatnya. Fakta yang serupa akan berbeda ketika diekspos oleh media.¹⁰⁹ Perbedaan dalam memandang fakta mengenai PKI berbeda karena perbedaan sudut pandang wartawan dan penonjolan yang dilakukan wartawan berdasarkan apa yang diliput dan mana yang tidak diliput. Hal tersebut yang menjadikan fakta akan disajikan dalam bentuk berbeda ketika diterima masyarakat.

Berdasarkan pembahasan frame *Tempo* dan *Gatra* dalam pemberitaan isu PKI era kepresidenan Gus Dur dan era kepresidenan Jokowi akan memunculkan pemaknaan yang berbeda dari setiap fakta pada fenomena tersebut. berikut ringkasan perbedaan dari kedua media:

Tabel 4. 1 Perbedaan Frame Tempo dengan Gatra

Elemen	Tempo	Gatra
Define Problem	Ideologi komunisme tidak sesuai dengan jaman	Komunisme menjadi traumatik sejarah
Diagnose Cause	Orde Baru dan TNI AD	Sejarah PKI
Moral Judgement	a. Isu PKI sebagai alat untuk menyerang presiden b. Pelanggaran HAM	a. Isu PKI melemahkan presiden b. Alat mobilisasi politik
Treatment Recommendation	a. Rekonsiliasi b. Pelurusan sejarah	a. Rekonsiliasi alami b. Pemeriksaan ulang sejarah

Pemberitaan PKI merupakan peristiwa yang sama dan realitas yang terjadi juga sama. Namun, fakta yang ada akan berbeda ketika media memberitakannya. Kecenderungan media dan ideologi media yang mempengaruhi wartawan dalam memandang fakta tersebut. ada bagian-bagian tertentu yang ditonjolkan dan ada bagian tertentu yang dihilangkan. Sehingga frame sangat menentukan bentuk fakta yang diterima publik.¹¹⁰

Define problem. *Tempo* melihat bahwa komunisme sebagai ideologi yang dianggap sudah tidak selayaknya diperdebatkan karena

¹⁰⁹ Bimo Nugroho dkk, Politik Media Mengemas Berita, (Yogyakarta: LKiS 1999), hal 200

¹¹⁰ Bimo Nugroho dkk, Politik Media Mengemas Berita, (Yogyakarta: LKiS 1999), hal 201

beberapa fakta yang telah dipaparkan sebelumnya. *Tempo* konsisten dalam memandang isu PKI yang dianggap sensitif oleh masyarakat. Ini bukan berarti *Tempo* membela keberadaan PKI, namun *Tempo* menempatkan PKI khususnya keluarga mantan PKI dan mantan anggota PKI yang ditindas hak asasi manusianya. Sehingga yang dilakukan *Tempo* selalu mengkonstruksikan PKI bukan lagi ancaman bagi bangsa melainkan korban yang harus dibantu mendapatkan hak. Implikasinya terhadap pemberitaan *Tempo* adalah memilih frame bahwa melarang ideologi komunisme bukan tindakan yang perlu dilakukan.

Melihat latar belakang *Tempo* yang didirikan oleh Goenawan Momahamad dan kawan-kawan yang notabennya adalah aktivis dimasa itu tentunya sangat paham bagaimana PKI berkembang di Indonesia. Pemikiran-pemikiran Goenawan Mohamad yang begitu mendukung kebebasan dituangkan pada bukunya yang berjudul "*Marxisme Seni Pembebasan*" dalam buku tersebut membahas bagaimana pemikiran Goenawan Mohamad mengenai sejarah manifestasi kebudayaan pada saat itu menolak intervensi disandingkan dengan persamaan filosofi marxisme yang juga menginginkan kebebasan manusia atas sistem kapitalis.¹¹¹ Dasar ideologi yang demikianlah mengapa *Tempo* bersikap dan mendukung pembebasan ideologi komunisme di Indonesia sebagai ilmu pengetahuan. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bagja redaktur pelaksana *Tempo* yang menyatakan bahwa kebebasan merupakan faktor dari demokrasi dan tugas media adalah sebagai guide terhadap publik, yaitu menunjukkan kebenaran.¹¹²

Berbeda dengan *Tempo*, frame yang ditonjolkan *Gatra* lebih mengarah pada bagaimana sejarah PKI menjadi sebuah trauma mendalam masyarakat Indonesia. Penggambaran demikian merupakan cara *Gatra* untuk tidak memihak keduanya. Fakta-fakta yang dipilih untuk

¹¹¹ Goenawan Mohamad, *marxisme Seni Pembebasan*, (Jakarta: TEMPO dan Grafiti Pers 2011)

¹¹² Bagja, Wawancara, Jakarta 22 Desember 2018

disampaikan kepada publik ingin menunjukkan bahwa *Gatra* tidak ingin memihak kepada pihak-pihak tertentu. Cara tersebut merupakan cara yang cukup aman diterima oleh publik mengingat bahwa isu ini masih saja sensitif dan menuai pro kontra. Menggambarkan isu PKI sebagai korban ataupun biang kerok bukan pilihan yang tepat dan akan membuat persoalan tidak kunjung selesai sehingga cara yang seperti itulah dipilih *Gatra*.¹¹³

Jika analogi tersebut disandingkan dengan ideologi *Gatra* maka, hal ini memang sesuai dengan yang mereka inginkan yaitu menjadi media yang kritis namun tidak mengiris, tajam tapi tidak memihak artinya tetap peka terhadap suatu fenomena dan mengambil keputusan secara tepat agar tidak merugikan pihak tertentu.¹¹⁴ Selain itu melihat latar belakang masa lalu pendirian *Gatra* merupakan akibat dari pembubaran *Tempo* yang dianggap mengganggu stabilitas ketahanan nasional oleh Orde Baru. Dan pendiri yang masuk kedalam tubuh *Gatra* merupakan mantan anggota *Tempo*.¹¹⁵ Sehingga implikasi terhadap pemberitaan yang dilakukan *Gatra* adalah menghindari cara-cara yang menyulut permasalahan dan bertindak secara berimbang.¹¹⁶

Diagnose cause. Orde Baru dan TNI AD disebut *Tempo* sebagai pihak yang memberi pengaruh kepada masyarakat untuk tetap merasa takut terhadap komunisme. *Tempo* menyebutkan berbagai fakta dalam setiap berita mulai dari era kepresidenan Gus Dur dan era kepresidenan Jokowi bahwa Orde Baru yang telah mengawetkan hantu PKI. Orde Baru diposisikan *Tempo* sebagai rezim yang selalu ingin meneguhkan kekuasaannya dan TNI AD sebagai pihak yang menjalankan strategi Orde Baru. Secara tegas *Tempo* memosisikan Orde Baru sebagai pihak yang semestinya disalahkan karena telah memberikan doktrin yang begitu kuat

¹¹³ Wawancara, Asrori S Karni, Jakarta 22 Desember 2017

¹¹⁴ *ibid*

¹¹⁵ Janet Steele, *Wars Within*, (Jakarta Dian Rakyat 2007), hal.215-237

¹¹⁶ Wawancara, Asrori S Karni, Jakarta 22 Desember 2017

kepada masyarakat Indonesia mengenai PKI melalui propaganda dan berbagai ancaman.

Berdirinya *Tempo* memang pada saat Orde Baru berkuasa, disebutkan bahwa Orde Baru memberi kontrol terhadap apapun yang dilakukan masyarakat Indonesia khususnya dalam hal kebebasan berekspresi. Pada saat itu keadaan belum cukup kondusif bagi pemerintah untuk menerima kritik, peringatan sering diterima oleh wartawan sehingga wartawan sendiri yang harus mengontrol diri mereka sendiri.¹¹⁷ Sehingga ketika Orde Baru berakhir tentunya memberikan angin segar kepada kebebasan media termasuk *Tempo*. Sehingga fakta-fakta tersebut seringkali diungkapkan oleh *Tempo* untuk menambah informasi kepada pembaca mengenai arogansi Orde Baru saat itu hingga berpengaruh pada pemberitaan PKI yang dikonstruksikan oleh *Tempo*. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bagja bahwa Orde Baru merupakan kekuasaan yang dijalankan dengan penuh penindasan, mengenai hubungan dengan PKI pada saat itu statusnya yang belum jelas namun teta saja ditindas dan selalu diuber-uber.¹¹⁸

Berbeda dengan *Tempo*, yang lebih ditonjolkan *Gatra* dari berbagai pemberitaan yang ditulis *Gatra* karena sejarah PKI itu sendiri. Artinya bagaimana sejarah PKI yang memberontak hingga akhirnya menimbulkan trauma bagi masyarakat hingga sentimen mengenai isu komunisme itu terjadi di Indonesia. Pemaparan fakta yang disampaikan *Gatra* bersifat lebih diterima dari semua pihak. Seperti menyebutkan sejarah pemberontakan PKI di Madiun hingga terdapat korban pembunuhan nyatanya memang fakta yang terjadi. *Gatra* tidak ingin serta merta memberikan argumennya sendiri melainkan pemaparan fakta. Pemilihan fakta juga tidak serta merta ditulis dengan justifikasi dan terkesan posisi *Gatra* sangat abu-abu dalam mengkonstruksi isu PKI.

¹¹⁷ Janet Steele, *Wars Within*, (Jakarta : Dian Rakyat 2007), hal .49

¹¹⁸ Wawancara, Bagja, Jakarta, 22 Desember 2017

Sikap *Gatra* yang demikian memang disadari oleh Asrori redaktur *Gatra* bahwa sesuai dengan ideologi yang ingin mereka sampaikan kepada publik bahwa berita harus seimbang.¹¹⁹ Dan memang diakui oleh Aditya wartawan *Gatra* bahwa berita yang ditulis oleh *Gatra* tidak terlalu berani seperti *Tempo* yang memperlihatkan keberpihakannya dalam mengambil sikap.¹²⁰ Namun Asrori memberikan argumen mengenai perbedaan antara *Tempo* dan *Gatra* dalam menentukan sikap karena berdasarkan sejarah kedua media tersebut terbentuk karena mantan anggota *Tempo* yang keluar dan membentuk *Gatra* ingin menjalankan fungsi pers yang sesungguhnya mengedukasi dan bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi.¹²¹ Berdasarkan argument tersebut jelas bahwa *Gatra* ingin bersikap lebih seimbang walaupun pada dasarnya pers tetap harus berpihak dengan alasan hak asasi dan demokrasi.

Moral judgement. Kemunculan isu PKI dinilai sebagai indikasi fenomena tertentu. Selain sebagai masalah politik ada hal lain yang juga disoroti oleh media. *Tempo* menyebutkan bahwa isu PKI untuk menyerang presiden dan pelanggaran HAM. Dalam hal penyerangan presiden karena menyambut pemilu 2019 dan saling berebut kekuasaan, sama halnya ada era keresidenan Gus Dur yang menyerang usulan Gus Dur sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap presiden yang menjabat. Posisi pemerintah selalu salah jika dihadapkan pada persoalan PKI. Abdul Manan wartawan senior *Tempo* menjelaskan bahwa sikap pemerintah yang terkesan ambigu terhadap komunisme merupakan hal dilematik karena isu tersebut tidak populer untuk pemerintah alasannya karena bersebrangan dengan tentara serta kelompok islam, namun disatu sisi berhadapan dengan hak asasi manusia.¹²² Sikap seperti inilah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menyerang presiden atas nama isu PKI.

¹¹⁹ Wawancara, Asrori S Karni, Jakarta, 22 Desember 2017

¹²⁰ Wawancara, Aditya, Jakarta, 22 Desember 2017

¹²¹ Wawancara, Asrori S Karni, Jakarta, 22 Desember 2017

¹²² Wawancara, Abdul Manan, Jakarta, 22 Desember 2017

Mengenai pelanggaran hak asasi manusia, *Tempo* memang menilai bahwa penindasan terhadap PKI yang dilakukan Orde Baru demi kekuasaan politik telah menyalahi aturan dan pelanggaran HAM. Sehingga *Tempo* selalu ingin memberitahu kepada publik bahwa fenomena yang telah terjadi adalah pelanggaran HAM. Hal tersebut ditunjukkan oleh *Tempo* dengan memberikan fakta mengenai keterlibatan diluar PKI khususnya TNI AD dalam pemberitaan yang dituliskan. Salah satunya mengenai film “*Pengkhianatan G30S PKI*” yang disebutkan sebagai manipulasi sejarah dan pesan Orde Baru. Walaupun tujuan *Tempo* adalah menunjukkan kepada publik mengenai mana yang benar nyatanya *Tempo* menerima kritik keras dari pembaca.¹²³ Namun *Tempo* ingin menegaskan bahwa tindakan tersebut telah melanggar hak asasi manusia, mengingat *Tempo* berdiri atas dasar demokrasi, hak asasi dan demokrasi.¹²⁴

Sementara *Gatra* menilai pemberitaan PKI sebagai upaya melemahkan presiden serta mobilisasi politik. Hampir sama dengan *Tempo*, *Gatra* juga menyebutkan bahwa isu PKI dinilai untuk melemahkan presiden yang tengah memimpin dengan menyampaikan protes masyarakat mengenai usulan Gus Dur yang dianggap tidak penting karena pada saat itu Gus Dur selalu memberikan kejutan, yang dimaksud kejutan adalah kebijakan Gus Dur dinilai fenomenal ndan tak umum. Sehingga usulan pencabutan TAP MPRS cukup disoroti karena publik buka suara bahwa keadaan ekonomi kurang baik dan mestinya Gus Dur melakukan tindakan yang perlu dilakukan.¹²⁵ Karena hal tersebut Gus Dur pun dilemahkan oleh berbagai partai politik bahkan dari pihak NU sendiri.

Selanjutnya mengenai mobilisasi politik, dimana *Gatra* memberikan frame bahwa dibalik pemutaran film yang dilakukan TNI AD

¹²³ Wawancara, bagja, Jakarta, 22 Desember 2017

¹²⁴ *ibid*

¹²⁵ Wawancara, Asrosi S Karni, Jakarta, 22 Desember 2017

pada era kepresidenan Jokowi mendapat dukungan dari berbagai partai politik bahkan ada partai politik yang menguasai salah satu media yaitu Golkar memberikan ruang untuk menayangkan pada stasiun TVOne. Dalam hal ini Gatra tidak memberikan penilaian yang buruk terhadap tindakan Partai Politik dan pihak TNI AD. Fakta yang dipaparkan *Gatra* lebih mengarah pada keseimbangan berita dengan menunjukkan pihak-pihak narasumber yang ditampilkan untuk mendukung aksi tersebut. namun memang benar adanya bahwa terdapat berbagai partai politik yang sengaja memanfaatkan situasi tersebut.

Treatment recommendation. Solusi mengenai isu PKI yang tak kunjung selesai membuat PKI semakin menjadi problem yang selalu muncul setiap tahun, adanya desakan dari keluarga korban hingga pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan situasi tersebut. *Tempo* memberikan tawaran solusi bahwa harus dilakukan rekonsiliasi dan pelurusan sejarah. Sesuai dengan dasar berdirinya *Tempo* yang membela kaum tertindas dan hak asasi manusia, dimana *Tempo* sejak awal telah memosisikan PKI sebagai korban atas ketidakadilan dari rezim Orde Baru hingga saat ini perlu dibela. Upaya rekonsiliasi harus dilakukan oleh Negara. Hal ini selalu disebutkan *Tempo* sebagai penutup berita yang disampaikan kepada publik.

Selanjutnya perlunya pelurusan sejarah mengenai peristiwa 65 menjadi argumen yang juga selalu disampaikan *Tempo*. *Tempo* memang sangat menunjukkan sensitifitas terhadap rezim Orde Baru mengingat bahwa sejarah yang berkembang adalah bersumber dari Orde Baru demi melanggengkan kekuasaan. Pelurusan sejarah yang disarankan oleh *Tempo* adalah dengan mendukung diskusi-diskusi yang memberikan perspektif baru serta meyakini bahwa apa yang telah dipopagandakan Orde Baru tidak benar. Disini *Tempo* juga menekankan bahwa kejadian masalah lalu PKI harus segera diselesaikan karena hukum juga memiliki sisi

kemanusiaan bukan malah menyalahi hak asasi manusia.¹²⁶ Selain itu pengalaman yang telah dilalui *Tempo* pada awal pendiriannya bahwa *Tempo* berkembang pada rezim Orde Baru dan berbagai fenomena yang telah terjadi atas pembredelan membuat *Tempo* tidak menaruh kepercayaan kepada Orde Baru. Selain itu *Tempo* seolah tidak memiliki independensi dimasa itu.¹²⁷

Disaat *Tempo* berada pada pihak yang menempatkan PKI sebagai korban berbeda dengan *Gatra* yang menyebutkan bahwa yang seharusnya dilakukan adalah rekonsiliasi alami dan pemeriksaan ulang sejarah. Rekonsiliasi alami yang dimaksud adalah dengan kerelaan dari setiap pihak bukan memaksa Negara meminta maaf kepada PKI. disini *Gatra* menyampaikan bahwa tidak bersikap membela salah satu pihak. Tetapi hanya ingin memaparkan sesuai perspektif yang dianggap perlu disampaikan pada publik. Seperti yang disampaikan oleh Asrosi redaktur *Gatra* bahwa menempatkan PKI sebagai korban akan menimbulkan kemarahan bagi kaum islam dan mengatakan PKI sebagai pihak yang harus disalahkan juga kurang tepat.¹²⁸ Sehingga *Gatra* memilih untuk menawarkan solusi yang sekiranya bisa diterima oleh semua pihak.

Pemeriksaan ulang sejarah diilih oleh *Gatra* untuk memeriksa bagaimana sejarah telah disampaikan kepada publik. Pemilihan kata “periksa” bukan berarti menyalahkan sejarah yang telah ada tapi mengkonfirmasi ulang. Mengingat sejarah yang tengah berkembang pada masyarakat Indonesia sebagian besar adalah sejarah yang dibentuk dan dikonstruksi oleh Orde Baru. Tidak mungkin secara tegas *Gatra* akan menyalahkan Orde Baru karena latar belakang pendiriannya dekat dengan Orde Baru yaitu Bob Hasan yang memiliki hubungan baik dengan Soeharto.¹²⁹ Dan dekat dengan Jendral Gatot Soebroto yang memimpin

¹²⁶ Wawancara, Bagja, 22 desember 2017

¹²⁷ Janet Steele, Wars Within, (Jakarta : Dian Rakyat 2007), hal .49

¹²⁸ Wawancara, Asrori S Karni, Jakarta, 22 Desember 2017

¹²⁹ Janet Steele, Wars Within, (Jakarta : Dian Rakyat 2007), hal .49

penumpasan PKI.¹³⁰ disini *Gatra* cukup berhati-hati dan sebisa mungkin memberikan solusi berimbang.

D. Argumen Konstruksi Realitas yang Dibangun Tempo dan Gatra

Perbandingan frame antara *Tempo* dengan *Gatra* disebabkan oleh berbagai faktor latar belakang serta ideologi media yang telah disinggung pada poin sebelumnya. Namun dalam beberapa hal terdapat kemiripan tetapi berbeda dalam pemaparan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel perbandingan pada poin sebelumnya. Pada poin sebelumnya dijelaskan bahwa latar belakang media begitu kuat mempengaruhi sikap suatu media dalam memandang sebuah fenomena.

Perbedaan pemaparan berita yang dilakukan antara *Tempo* dengan *Gatra* merupakan hasil konstruksi dari masing-masing media. Sesuai dengan paradigma penelitian yang mendasari penelitian ini yaitu konstruktivisme dan berkaitan dengan konsep hierarchy of influence yang dikemukakan oleh Shoemaker dan Reese akan memberi argumen yang dapat menjawab mengapa *Tempo* dan *Gatra* memberikan konstruksi yang berbeda dalam memaparkan berita PKI.

Tempo mengkonstruksi berita PKI sebagai sebuah pelanggaran HAM yang dilakukan Orde Baru sehingga sikap yang ditunjukkan *Tempo* adalah berpihak pada mantan keluarga PKI dan mantan anggota PKI sehingga *Tempo* selalu mendukung upaya rekonsiliasi dan mendesak pemerintah untuk melakukan pelurusan sejarah. Implikasi dari hal tersebut terlihat dari kalimat-kalimat yang dipilih *Tempo* untuk menegaskan bahwa PKI sebagai korban dan beberapa pihak sengaja memanfaatkan berita tersebut untuk kepentingan kelompok. Dalam paradigma konstruktivisme yang mendasari konsep hierarchi of influence menempatkan fakta adalah sesuatu yang bersifat subjektif, ganda bahkan plural.¹³¹ Dari konsep tersebut *Tempo* tidak mengacu bahwa kebenaran peristiwa G30S 1965

¹³⁰ Wawancara Asrori S Karni, Jakarta, 22 Desember 2017

¹³¹ oleh N Krisdinanto, KOMUNIKATIF Jurnal Ilmiah Komunikasi /Volume 3 /Nomor 01 Juli 2014

seperti yang telah dipropagandakan oleh rezim Orde Baru melainkan ada fakta-fakta lain yang perlu diungkap. Tentu saja dalam hal ini faktor-faktor yang mempengaruhi isi berita dan cukup terlihat pada konstruksi yang dilakukan *Tempo* adalah faktor individual, rutinitas media, organisasi, ekstramedia dan ideologi.

Dimulai dari level individu, *Tempo* telah memberikan kualifikasi khusus siapa yang dapat bergabung dengan *Tempo*, dijelaskan pada buku *Wars Within* bahwa wartawan yang bekerja pada majalah *Tempo* adalah mereka yang belum pernah memiliki pengalaman bekerja pada media lain, sehingga pengetahuan yang akan dibangun oleh organisasi mengenai bagaimana prinsip lebih mudah menyatukan visi dan misi dari *Tempo*. Hal ini semacam hegemoni yang ditanamkan bagaimana seorang wartawan akan bekerja dan sesuai dengan jurnalistik versi *Tempo*. Sesuai dengan paradigma konstruktivisme posisi wartawan adalah sebagai agen konstruksi dan mendefinisikan suatu fenomena yang telah ditentukan sisi mana yang akan lebih ditonjolkan kepada publik, dalam berita PKI *Tempo* menonjolkan sisi bahwa PKI adalah korban yang harus dibantu untuk memperoleh haknya. Sesuai dengan rutinitas *Tempo* yang selalu mengadakan rapat untuk menentukan angle berita dan tentunya keputusan tersebut sesuai dengan ideologi yang dibangun *Tempo*. Nampaknya faktor ekstramedia kurang begitu mempengaruhi berita yang dihasilkan *Tempo* melihat Ideologi dan rutinitas serta organisasi media lebih berpengaruh membentuk jiwa wartawan *Tempo* yang sesuai dengan jurnalistik versi *Tempo*.

Disini posisi *Tempo* sebagai media dan agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas, dan memberikan pandangan sehingga menimbulkan keberpihakan dan bias kepada publik. Sehingga berita PKI yang disampaikan *Tempo* adalah berita hasil dari konstruksi yang melibatkan pandangan dan ideologi wartawan serta media. Penggunaan kalimat yang cenderung tegas mengenai isu PKI yang digunakan sebagai alat untuk menyerang presiden seringkali digunakan *Tempo* sebagai wujud

konstruksi *Tempo* yang tidak menyetujui fakta yang telah dibangun Orde Baru bahwa PKI adalah dalang satu-satunya dan selalu sebagai pihak yang paling disalahkan.

Berbeda dengan *Gatra* yang lebih sering mengkonstruksikan PKI sebagai sesuatu yang memang sensitif bagi masyarakat sehingga membuat *Gatra* lebih berhati-hati dalam menuliskan berita tersebut. Pandangan *Gatra* mengenai berita PKI adalah peristiwa yang menyebabkan traumatik pada masyarakat yang begitu kontroversial jika tidak melegakan dari sebagian pihak dalam memberikan argumen. Sehingga yang dilakukan *Gatra* adalah dengan tidak mendukung rekonsiliasi dan juga tidak melarang rekonsiliasi, posisi *Gatra* berada ditengah-tengah permasalahan yaitu hanya memaparkan fakta. Sama halnya dengan *Tempo*, sikap *Gatra* juga dipengaruhi oleh faktor individu, rutinitas media, organisasi, ekstramedia dan ideologi media.

Wartawan *Gatra* sebagai agen pencari informasi dan mendeskripsikan realitas lebih banyak dipengaruhi oleh rutinitas media. Hal tersebut disamaikan oleh Aditya, wartawan *Gatra* bahwa proses pencarian informasi berfokus pada angel yang telah ditentukan dan disepakati oleh forum. Hal itu juga dikonfirmasi oleh Asrori Redaktur *Gatra* yang membenarkan bahwa seluruh pemilihan angel merupakan keputusan bersama dan hal tersebut harus dijalankan oleh seluruh wartawan. Kebijakan tersebut juga dipengaruhi oleh organisasi media dimana keputusan tetap berada pada posisi tertinggi berada pada editor yaitu redaktur pelaksana *Gatra*. Mengenai ketidakberpihakan *Gatra* dalam memframing pemberitaan PKI juga dipengaruhi oleh faktor ekstra media dalam hal ini adalah beberapa pihak diluar media yang mempengaruhi keberlangsungan media tersebut. Artinya suatu media tidak akan mengambil sudut pandang berita yang dapat menjatuhkan pemasok modal. Hal ini mengingatkan pada sejarah *Gatra* yang begitu dekat dengan rezim Orde Baru. Tentu saja *Gatra* menempatkan posisi Angkatan Darat sebagai pihak yang menjaga keamanan Indonesia bukan sebagai pendukung Orde

Baru yang melanggar hak para mantan keluarga PKI dan mantan anggota PKI. Jika diperhatikan pengaruh yang paling tampak pada *Gatra* berasal dari ekstramedia sehingga mempengaruhi ideologi dan tujuan keberlanjutan *Gatra*.

Gatra sebagai media diposisikan sebagai agen yang mengkonstruksikan fakta dan menyajikan fakta dengan hati-hati, karena tujuan *Gatra* adalah sebagai media yang dapat memberikan kontrol dan edukasi kepada publik. Sehingga berita yang dihasilkan *Gatra* merupakan konstruksi yang telah dikemas dengan senetral mungkin agar dapat diterima publik dan menenangkan bagi semua pihak. Oleh sebab itu sikap yang ditunjukkan *Gatra* dalam memandang isu PKI selalu memberi opsi rekonsiliasi alami artinya dengan tidak memaksa salah satu pihak namun melalui kesadaran bersama.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa pemilihan bahasa yang tentu juga memiliki konotasi berbeda walaupun terlintas hampir sama memiliki kecenderungan yang berbeda. Seperti pernyataan “*pelurusan sejarah*” yang disebut-sebut *Tempo*, mengindikasikan bahwa selama ini sejarah yang ada di Indonesia salah atau dibelokkan oleh kepentingan tertentu. Sedangkan *Gatra* memilih menggunakan bahasa “*pemeriksaan ulang sejarah*” dalam hal ini *Gatra* masih menganggap sejarah Indonesia harus dikonfirmasi ulang namun tidak berarti sejarah yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat merupakan sejarah yang salah. Hal tersebut merupakan konstruksi yang dibangun media karena faktor-faktor yang telah dijelaskan melalui konsep hierarchy of influence dari Shoemaker and Reese.

Selain unsur bahasa pada konsep hierarchy of influence, latar belakang media dan sistem yang diterapkan juga memiliki pengaruh besar terhadap pemberitaan yang dilakukan. Seperti halnya *Tempo* yang sejak dahulu menerapkan gaya penulisan yang mendalam dengan genre jurnalisme sastra membuat pemilihan bahasa serta kalimat yang dinarasikan juga berbeda dengan media lain. Meskipun *Gatra* hampir

menyerupai *Tempo* namun untuk persoalan narasi nampaknya cukup berbeda. Gonawan Mohamad telah memiliki pengaruh besar dalam perkembangan *Tempo* ketika berbicara gaya bahasa *Tempo* tentu akan berbicara mengenai Gonawan Mohamad dan gaya penulisaanya yang penuh dengan esai dan opini yang didukung dengan fakta bahkan peliputan. Terpecahnya tubuh *Tempo* saat pembredelan dan membentuk *Gatra* tentunya ada sedikit budaya yang dibawa namun tidak sekeras yang ada pada *Tempo* karena mereka sudah berbeda ideologi sehingga gaya *Gatra* lebih tidak berpihak dan *Tempo* terkesan lebih satire.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang telah dilakukan dengan metode analisis framing Entman pada majalah *Tempo* dan *Gatra* mendapat beberapa kesimpulan dalam pemberitaan PKI era kepresidenan Abdurrahman Wahid dan Joko Widodo. Bagaimana PKI dikonstruksikan oleh kedua media tersebut. berikut penjelasannya.

Terdapat beberapa aspek yang ditonjolkan *Tempo* mengenai pemberitaan PKI era kepresidenan Gus Dur dan era kepresidenan Jokowi. Penonjolan berita yang disampaikan *Tempo* cenderung karena dasar ideologi *Tempo* yang memihak pada pelanggaran hak asasi manusia, pengalaman sejarah awal berdiri *Tempo*, hingga para pendiri *Tempo* Goenawan Mohamad dan kawan-kawan. Sejarah telah membawa *Tempo* memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap rezim Orde baru sehingga dalam hal ini *Tempo* memilih dan mengambil sikap untuk memosisikan PKI sebagai korban yang harus mendapatkan haknya. Terdapat empat penonjolan yang telah peneliti rangkum diantaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, Pelarangan ideologi komunisme tidak relevan dengan zaman. Maksudnya adalah dengan melihat keadaan Indonesia yang sama sekali bukan berideologi komunis maka sudah tidak selayaknya melarang penyebaran ideologi tersebut. Fakta-fakta telah dipaparkan *Tempo* untuk tidak takut terhadap ideologi tersebut. Hal tersebut dikonstruksi *Tempo* untuk menciptakan makna bahwa tidak ada gunanya melarang ideologi komunisme.

Kedua, kemunculan isu komunisme digunakan untuk menyerang presiden, Isu PKI yang selalu muncul disetiap tahun digambarkan *Tempo* sebagai tindakan untuk menyerang presiden disetiap periodenya.

Masyarakat yang sangat sensitif terhadap isu PKI dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menuduh dan menyerang presiden yang tengah memimpin.

Ketiga, Orde Baru dan TNI AD aktor yang menyebabkan masyarakat takut dengan isu PKI, Ketakutan masyarakat terhadap PKI sampai saat ini merupakan propaganda yang telah dilakukan oleh Orde Baru dan TNI AD. *Tempo* selalu menyebutkan hampir diseluruh berita mengenai isu PKI bahwa Orde Baru yang membuat masyarakat semakin takut dengan komunisme.

Keempat, pelanggaran ham dan perlunya rekonsiliasi untuk pelurusan sejarah. Wacana yang dibangun oleh *Tempo* tentunya sesuai dengan ideologi yang dianut *Tempo*, meskipun pihak *Tempo* tidak mengatakan bahwa mereka mengklaim hal tersebut sebagai ideologi namun yang terjadi adalah muncul pada berita yang disampaikan.

Sama halnya dengan *Tempo*, pemberitaan *Gatra* juga dipengaruhi oleh latar belakang berdirinya *Gatra* serta ideologi yang mempengaruhi. Mengingat latar belakang *Gatra* merupakan media yang didirikan untuk mengganti *Tempo* yang tengah dibredel oleh Rezim Orde Baru serta anggota yang bergabung di tubuh *Gatra* berasal dari mantan anggota *Tempo* sehingga seringkali *Gatra* dianggap dekat dengan Orde Baru. Sehingga hal tersebut berpengaruh juga terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh *Gatra* terhadap isu PKI di era kepresidenan Gus Dur dan era kepresidenan Jokowi. Berikut penonjolan yang ditemukan oleh peneliti pada teks berita yang dituliskan *Gatra*.

Pertama, Pembebasan ideologi komunisme perlu dipertimbangkan karena traumatik sejarah dan tidak sesuai dengan ideologi bangsa, maksudnya adalah Berdasarkan pemberitaan Berdasarkan hasil analisis pada berita yang diterbitkan, *Gatra* ingin menyampaikan bahwa pembebasan ideologi komunisme perlu dipertimbangkan karena faktor traumatik sejarah.

Kedua, isu komunisme sebagai alat untuk dari melemahkan pemerintah dan mobilisasi politik. Artinya kemunculan isu PKI adalah

proses yang dimanfaatkan oleh berbagai pihak sehingga *Gatra* ingin menyampaikan kepada publik bahwa isu kemunculan PKI hanyalah untuk kepentingan politik tertentu agar masyarakat tidak berlarut-larut dalam pemberitaan tersebut.

Ketiga, TNI AD sebagai pelindung negara dari bahaya komunisme disini *Gatra* tidak menyampaikan bahwa TNI AD sebagai pihak yang bersalah. Pembahasan mengenai *Gatra* yang tidak memberikan justifikasi salah benar secara tegas karena adanya pengaruh latar belakang dari pendirian media itu sendiri. Berita *Gatra* bisa jadi menjadi berita yang terlihat tidak memihak siapapun dalam isu kebangkitan PKI serta justifikasi siapa yang paling bersalah. Hal tersebut cenderung lebih aman dilakukan mengingat sensitifnya isu tersebut pada masyarakat Indonesia.

Keempat, Rekonsiliasi alami dan pemeriksaan ulang sejarah artinya *Gatra* nampaknya lebih mengajukan penyelesaian secara damai kepada masyarakat agar tidak menuai keresahan dikedua belahpikah mengingat rekonsiliasi yang dipandang *Gatra* cukup sulit untuk tercapai. Tawaran yang cenderung aman yaitu rekonsiliasi alami. Rekonsiliasi alami nampaknya akan sangat melegakan bagi pihak yang menganggap PKI sebagai pihak yang salah dalam sejarah pahit itu namun, akan sangat melelahkan bagi pihak keluarga mantan PKI dan mantan anggota PKI yang harus menunggu. Sebagai penyeimbang *Gatra* memberikan opsi bahwa tetap harus dilakukan pemeriksaan ulang sejarah. Hal itu perlu dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang dilebih-lebihkan.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian yang telah dialami dalam mengerjakan penelitian analisis framing pada dua media *Tempo* dan *Gatra* mengenai pemberitaan PKI pada era kepresidenan Abdurrahman Wahid dan era kepresidenan Joko Widodo terdapat beberapa aspek antara lain sebagai berikut:

Pertama, pengambilan data dilakukan secara menyeluruh pada kedua media. Maksudnya dalam pencarian data dilakukan pengumpulan edisi setiap majalah dan dilakukan pembacaan secara menyeluruh tanpa memilih isu secara spesifik dan ini dilakukan diberbagai perpustakaan yang masih mengarsipkan majalah cetak *Tempo* dan *Gatra*. Hal ini dilakukan karena peneliti belum memahami isu yang dianggap paling penting disetiap periode kepresidenan Gus Dur dan Jokowi. Akibatnya membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk melakukan tahap ini.

Kedua, metode penelitian yang dilakukan dengan analisis teks serta wawancara dirasa kurang maksimal karena kesalahan tahapan teknis. Seharusnya dilakukan analisis secara menyeluruh terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara agar pertanyaan yang dilakukan lebih spesifik terhadap isu yang telah dianalisis. Tahapan yang tepat menurut pengalaman yang dilakukan peneliti adalah, pertama pembacaan isu, kedua pemilihan isu, ketiga analisis, keempat wawancara untuk mengkonfirmasi terhadap frame yang telah dilakukan.

Ketiga, pendalaman sejarah yang sangat dangkal membuat peneliti merasa kesulitan untuk menghubungkan sebab akibat mengapa media melakukan sikap berbeda dalam isu tersebut. Mengingat objek penelitian ini dibutuhkan pengetahuan sejarah yang dalam mengenai politik dan perkembangan pers di Indonesia.

Keempat, eksplorasi teori sama halnya dengan sejarah, dalam hal ini peneliti merasa pemahaman mengenai teori konstruksi, ideologi dan framing masih kurang sehingga dalam menghubungkan antara temuan analisis serta hasil wawancara belum dibahas secara dalam keterkaitan antara temuan penelitian dan teori.

Kelima, referensi dan data dalam hal ini pencarian mengenai sejarah media khususnya *Gatra* cukup sulit karena tidak adanya buku yang membahas secara spesifik. Sehingga akan tidak seimbang jika menyandingkan dengan *Tempo* karena sumber buku yang digunakan sebagai referensi *Gatra* salah satunya berasal dari buku yang membahas

secara spesifik majalah *Tempo*. Sedangkan temuan pada wawancara juga tidak terlalu mendalam, dan sudah dilakukan wawancara ulang namun sebagian pertanyaan belum dijawab dan dikonfirmasi.

C. Saran

Saran mengenai penelitian yang dilakukan pada kedua majalah mingguan *Tempo* dan *Gatra* sebagai media yang dibaca oleh berbagai kalangan dan memiliki peran penting pada publik dalam mempengaruhi keputusan dalam menilai persoalan yang tengah terjadi mencakup hal-hal berikut:

Pilihan yang dilakukan *Tempo* untuk berpihak kepada korban PKI seharusnya lebih berimbang walaupun memang dasar yang dilakukan *Tempo* sesuai dengan alasan keberpihakan pers dibenarkan atas dasar hak asasi manusia dan demokrasi namun nampaknya *Tempo* terlalu memberikan stigma yang begitu negatif terhadap Orde Baru sehingga memunculkan kebencian baru ditengah-tengah pembaca.

Selanjutnya masih mengenai *Tempo*, pemilihan narasumber di beberapa penulisan belum cukup mewakili berbagai pihak. Sehingga membuat pembaca memandang perspektif hanya dari salah satu pihak. Pemaparan fakta mengenai PKI cenderung dari sisi ketidakadilan yang dialami PKI sehingga kurang mendalam bagian mengapa pihak antikomunis yang merasa dirugikan masih merasa PKI sebagai pihak yang disalahkan. Seolah terkesan bahwa pihak antikomunis sebagai penyerang karena kurang dijelaskan alasan mendasar mereka dibalik propaganda Orde Baru.

Selanjutnya *Gatra* cenderung sangat abu-abu dan memilih posisi aman dimata publik. Niat baik *Gatra* untuk menampilkan pemberitaan yang berimbang seharusnya tetap harus diberikan keputusan harus kemana publik menilai bukan memberikan pilihan. Selain itu mengenai keterbukaan sejarah *Gatra* dirasa masih sangat kurang. Mengingat tidak adanya sumber referensi yang dirasa cukup kuat demi penelitian-penelitian

selanjutnya. Seharusnya *Gatra* lebih memperdulikan hal tersebut mengingat pentingnya sejarah bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdurachman, Sukri. 2003. *Krisis Masa Kinian dan Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Andy, Tim Penulis Kick. 2011. *Kumpulan Kisah Inspiratif 2*. Yogyakarta: Bentang.
- Adam, Asvi Warman. 2009. *Membongkar Manipulasi Sejarah*, Jakarta: Penerbit Kompas
- Budiawan. 2004. *Mematahkan Pewarisan Ingatan (Wacana Anti Komunis dan politik rekonsiliasi pasca soeharto)*. Jakarta: ELSAM.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Raja Grafindo.
- Bungin, Burhan. 2007. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, Burhan. 2008. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Creswell, John W. 1994. *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*. Sage publication.
- Eryanto. 2002. *Analisis Framing :Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: Lkis.
- Eriyanto. 2009.
- Eriyanto. 2012.
- Fiske, John. 1990. *Cultural and Communication: Sebuah Pengantar Paling Komperhensif*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta : Granit.
- Harsono, Andreas dkk. (Eds.). 2008. *Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan Memikat*. Jakarta: Kepustakaan Gramedia Populer.
- Kurnia, Septiawan Santana. 2002. *Jurnalisme Sastra*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Littlejohn, Stephen W. 2001. *Theories Of Human Communication, edisi 7*. USA : Wadsworth Publishing.

- Mohamad, Goenawan. 2011. *Marxisme Seni Pembebasan*. Jakarta: TEMPO dan Grafiti Pers.
- Moscow, Vincent. 1996. *The Political Economy of Communication*. London, Sage Production.
- Nugroho, Bimo dkk. 1999. *Politik Media Mengemas Berita*. Yogyakarta: LKiS.
- Sudibyo, Agus. 2001. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKiS.
- Shoemaker dan Reese. 1996. *Mediating The Message: Theories Of Influence On Mass Media Content*. New York: Longman Publisher.
- Sobur, Alex. 2002. *Analisa Teks Media : Suatu Pengantar untuk Analisa Wacana, Analisa Semiotik dan Analisa Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sobur, Alex. 2006.
- Steele, Janet. 2007. *Wars Within*. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat.
- Zen, Fathurin. 2004. *NU Politik: Analisis Wacana Media*. Yogyakarta: LKiS.

Jurnal

- Andi Suwarta, 2000. *Mengkritisi Peristiwa G30S 1965: Dominasi Wacana sejarah Orde Baru Dalam Sorotan*, Jurnal Historia: jurnal Pendidikan Sejarah, No.1
- Baabe. Aspen Raemanodkk. 2013. *“Keterlibatan Partai Komunis Indonesia (PKI) Dalam Pemerintahan Hasil Pemilu Pertama 1955-1959”* Jurnal Social Science Vol , No.3. Universitas Negeri Manado.
- Dede Supriyatno dan Adolfo Eko Setyanto, Jurnal Universitas Sebelas Maret. *“Representasi Citra militer Dalam Pemberitaan Majalah Tempo (Analisis Wacana Citra Militer Pada Pemberitaan Majalah Tempo Liputan Khusus Pengakuan Algojo 1965 Edisi 1-7 Oktober 2012)”* Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Jurnal International Memory studies dari ETD UGM, etd.repository.ugm.ac.id diakses pada 15 Mei 2017.
- N Krisdinanto, KOMUNIKATIF Jurnal Ilmiah Komunikasi /Volume 3 /Nomor 01 Juli 2014
- Setyanto, Adolfo Ekodan Dede Supriyatno. Jurnal Universitas Sebelas Maret. *“Representasi Citra militer Dalam Pemberitaan Majalah Tempo (Analisis*

Wacana Citra Militer Pada Pemberitaan Majalah Tempo Liputan Khusus Pengakuan Algojo 1965 Edisi 1-7 Oktober 2012).” Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Artikel

Bambang Pasarkan Buku Jokowi Undercover Lewat Facebook, <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/01/03/063832213/bambang-pasarkan-buku-jokowi-undercover-lewat-akun-facebook> (diakses pada 25 April 2017)

Ging Ginanjar, Mengapa ada kecurigaan dan ketakutan akan bangkitnya PKI?, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160510_indonesia_histeria_anti_komunis. (diakses pada 16 Maret 2017)

Mahpuddin. 2009. *Ideologi Media Massa dan Pengembangan Civil*. Jurnal *Academica Untad*. Vol 1, No 2. <http://download.portalgaruda.org/article.php> 191. (Akses pada 1 Juni 2017. Pukul 15.30 WIB).

Nurul Khomariah, Roekhan, dkk, Penggunaan Unsur Fiksi Dalam Buku *Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan mendalam dan Memikat*, jurnal-online.um.ac.id (Diakses 28 Mei 2018)

Pandangan Islam Tentang Marxisme-Leninisme, “<http://www.nu.or.id/post/read/58136/pandangan-islam-tentang-marxisme-leninisme>” (Diakses pada 15 Maret 2017)

Shanaz Asnawi Yusuf, *Konstruksi Konflik dalam Jurnalisme Sastrawi*, portalgaruda.org (Diakses, 28 Mei 2018)

Wawancara

Aditya Kirana. *Wartawan Gatra*, Jakarta. 22 Desember 2017

Abdul Manan. *Wartawan Tempo*. Jakarta. 22 Desember 2017

Asrori S Karni. *Redaktur Pelaksana Gatra*. Jakarta. 22 Desember 2017.

Bagja Hidayat. *Redaktur Pelaksana Tempo*. Jakarta. 22 Desember 2017¹

¹

LAMPIRAN

Bagja Hidayat, Redaktur Pelaksana Tempo

Bagaimana sejarah Tempo?

Wars within lengkap dibuku tersebut. Tempo berpijak pada membela yang lemah, demokrasi, pluralism. Berpihak pada yang lemah, minoritas. Hukum ada sisi kemanusiaan.

Bagaimana memandang isu PKI?

PKI pada orde baru dia yang ditindas diadili tanpa alasan, membela pki dalam hak hidup hak kebebasan dan setara dengan yang lain. Karena pki dan bukan Pki tidak clear di jaman orde baru. Yang ditindas oleh kesewenang-wenangan. Tapi tidak membela ideology. Tempo memperjuangkan hak universal.

Apakah ada protes dari pembaca?

Banyak mendapat kritik, kenapa tempo bela pki.

Apa sebenarnya yang diinginkan Tempo?

Tempo didirikan untuk melawan sosialisme komunisme dan tidak ada perubahan sampai sekarang. Yang dilawan kebijakan. Kebebasan berpendapat faktor untuk kita untuk berdemokrasi. Semua ideology tujuannya untuk mensejahterahkan, kalau ada penindasan kita lawan. Maka implikasinya pki tidak boleh dauber-uber.

Lalu, Apa yang dilakukan Tempo kepada masyarakat dalam hal ini?

Tanggung jawab media mana yang berpihak kepada demokrasi mana yang tidak. Memberi guidance kepada public mana yang menuju kebenaran mana yang tidak benar.

Siapa yang harus bertanggung jawab?

Orde baru adalah kekuasaan yang dijalankan dengan meneror dan menindas. Melanggar ham melanggar demokrasi.

Apa sebenarnya ideologi yang dibangun Tempo?

Tidak berpijak pada ideologi. Kalo berpijak pada ideology itu namanya partisan.

Abdul Manan (Wartawan Majalah Tempo)

Bagaimana menentukan angel berita PKI?

waktu itu memang rame-rame isu komunisme, setelah symposium. Ditanggapi dengan symposium tandingan oleh kelompok islam yang didukung oleh veteran-veteran tentara. Kita memutuskan menulis apa yang dilakukan pemerintah dengan adanya dua pihak ini. Disatu sisi pemerintah melalui Menkopolkam mendorong memfasilitasi walaupun penyelenggara Lemhanas tapi disisi yang lain dikalangan pemerintah punya sikap sendiri dalam menangani simpoisum tersebut. ada sikap ganda, sebenarnya pemerintah itu seperti apa soal menangani isu komunisme ini. Karena itu sisi politik kita mencari sikap pemerintah sendiri seperti apa. Waktu itu bagaimana istan merespon itu. Akhirnya wawancara beberapa orang dekat presiden, orang yang punya akses ke presiden yang akhirnya kita tahu bahwa sikap pemerintah ambigu dan tidak jelas soal komunisme. Dilematis, disatusisi isu komunisme sangat tidak populer bagi pemerintah karena membuatnya besebrangan dengan tentara dan kelompok islam, tapi kalau pemerintah bersikap tidak mendukung pemerintah akan dipersoalkan oleh kelompok-kelompok tersebut.yang menjadi sasaran isu komunisme presiden sendiri, orangtuanya dituduh sebagai kelompok PKI. jadi , ada kegamangan presiden dalam menanggapi makanya sikapnya tidak jelas.

Apakah dalam mencari data, narasumber cukup sulit dan berbeda?

waktu mencari sumber di istana, sebagian besar tidak ingin disebut namanya. Hanya memberi background saja, kenapa pemerintah agak sedikit ragu-ragu karena dilematis. Berhadapan dengan kelompok HAM. Tapi itu tugas pemerintah memberikan komitmen dalam penyelesaian persoalan tersebut. penentang nya cukup kuat tentara dan masyarakat. Karena sensitive jarang ada yang mau memberikan pernyataan, terbuka dalam menjelaskan itu sehingga berusaha mencari sumber-sumber lain.

Apa spek yang dipertimbangkan dalam pemilihan narasumber?

kategori sumber ada tiga. Sumber A1 pelaku langsung, A2 orang yang melihat, A3 Ahli atau pengamat. Jika ingin mengetahui sumber dari presiden wawancara dengan presiden atau setidaknya orang-orang terdekatnya.

orang-orang dekat presiden salah satunya Johan Budi, pernah jadi wartawan Tempo juga, pernah menulis isu komunisme ditahun 2000. Kira-kira bagaimana?

sumber-sumber komunisme yang banyak malah bukan dari Johan, yang banyak dari staff khusus. Karena tidak mau disebut namanya maka harus on the record,

harus ada pertanyaan resminya setelah itu saya tanyakan ke Johan, agak normatif karena jawaban dari Jubir.

Bagaimana kemunculan berita-berita PKI?

biasanya ada konteksnya, faktor trigunal itu menjadi pemicunya. Maka tidak harus momentum tertentu misalnya 30 September, kalau diluar itu ada momentum jadi tergantung apakah ada alasanmenulis. misalnya isu perkembangan ditengah-tengah masyarakat, kalau ada rebut-ribut. Dan Tempo selama ada fakta kita tampilkan. Kita berbeda dengan media lain seperti Kompas pasti hati-hati. Kalau isu itu menarik untuk diketahui publik kita tulis. biasanya karena bulan September oktober me milih focus peran intelejen. Kebetulan waktu itu ada rilis dokumen. Dokumen itu juga kita akses kita mencari online, ada wawancara-wawancara, sejarawan yang mengalami peristiwa 65, wawancara online dengan intelejen luar juga tapi prosesnya lama.

Perrtimbangan memasukkan isu PKI masuk ke Laporan utama atau nasional apa saja?

Temanya sangat kuat dan sedang hangat dan menjadi pembicaraan umum dijadikan pertimbangan masuk laporan utama, karena laporan utama bahannya juga juga cukup menarik. Standar Tempo laporan utama ada cerita dibalik cerita. Kalau nasional, pembagian berdasarkan tema.

Bagaimana reaksi narasumber ketika wawancara mengenai isu PKI seperti apa?

Memang kalau pemerintah lebih berhati-hati, karena sensitive dan terlibat langsung. TNI lebih jelas. Biasanya menghindari untuk berbicara. Teutama kalau orang PDI kerana dianggap sarang komunis.

Bagaimana menanggapi isu komunisme ?

Sebagai sebuah ideologi, komunisme itu ideologi yang cukup tua mempengaruhi sejarah. Ideologi yang cukup dominan di Indonesia, ideologi yang pernah dimanfaatkan politik. Karena itu ideologi, bagian dari wilayah kebebasan. Tidak boleh berbeda ideologi lalu dibunuh. Memiliki ideologi komunisme sama dengan liberal apa bedanya. Bahwa ada kaitan ideologi komunisme dikatakan tidak beragama menurut saya sebagian adalah hasil propaganda. Bahwa komunisme selalu dianggap dikaitkan dengan atheis. Kenyataanya PKI banyak yang islam juga Cuma punya ideologi komunis. Dalam posisi sejarah dia berada diposisi yang kalah. Menurut saya kekhawatiran itu sangat berlebihan, bahkan dengan situasi sekarang komunisme secara ideologi tidak bisa memberikan contoh yang baik untuk menjadikan sebuah Negara yang maju. Misalnya Rusia yang menjadi

rujukan diperintah secara otoriter secara ekonomi juga tidak cukup bagus. Kalau China sebagai Negara komunisme tapi secara ideologi tidak menerapkan ekonomi kapitalis. Secara ideologi komunisme tidak memberi jawaban memuaskan, karena model pertentangan kelasnya yang sangat ekstrim tidak sesuai dengan keadaan yang penuh kompetisi dalam komunisme kompetisi ditiadakan karena semua dikendalikan Negara. Tidak mungkin dilakukan di era modern. China secara politik mungkin melakukan tapi secara ekonomi tidak. Tidak cukup menajikan untuk ditiru.

Asrori S Karni, Redaktur Gatra

Bagaimana manajemen redaksi Gatra?

Dari sisi proses pengambilan keputusan melalui rapat redaksi mungkin sama dengan tempo ya. Mungkin berbeda dengan online dan Koran, wartawan dilapangan secara bottom up data dinaikkan. Kalo di gatra ada proses bottom up itu wartawan kelapangan informasi dari lapangan tidak langsung dinaikkan, tapi dibawa ke rapat redaksi dan ditulis ke majalah. Dibawa ke rapat redaksi diperdebatkan kelayakannya. Kalau dianggap layak, dibuat desain peliputannya. Angel nya ditetapkan, narasumbernya ditetapkan. Baru para wartawan ke lapangan lagi untuk cari berita . proses itu lumrah saja karena majalah kan terbit mingguan. Tentu harus berbeda dengan harian apalagi sekarang ada online. Jadi dirapat itu dikaji angel yang belum dialami media lain. Punya angel beda apa? Kalau tidak punya angel beda kalau sama saja dengan media lain kita gak menulis. Kalau sudah terbuka, angelnya sudah tidak ada lagi sudah klimaks semua orang sudah tahu kita tidak menulis lagi biasanya. Sepertinya sama, semua media ingin menampilkan yang berbeda dengan media lain. Ya angelnya beda, judulnya isinya juga. Makanya ada rapat redaksi. Dirapat redaksi juga didiskusikan angelnya apa, narasumbernya siapa. Baru diangkat. Rubrikasi utamanya politik ekonomi hukum. Ya jadi laporan utama itu seringkali politik ekonomi hukum itu hampir setiap edisi ada diluar itu seringkali isu isu internasional. Isu internasional itu dampak ekonomi, Donald trump untuk Indonesia. Bisa juga dinamika politik, dinamika ekonomi bisa jadi cover story biasanya kalo ada relevansi dengan isu politik. Yang sering selain amerika timur tengah. Ikatan dngan Indonesia kan kuat ya. Seperti kemarin langkah turki yang mengisolasi Qatar itu pernah jadi cover story. Isu-isu lain yang jadicover itu isu keagamaan. Agama di Indonesia ini sering menyedot perhatian luas. Misalnya terorisme. Terorisme kana da muatan keagamanya, dibalik operasi terror itu ada sentiment agama spirit keagamaan, atas nama jihadlah, atas nama melawan kezaliman [...] itu sering juga, atau isu keagamaan yang menyedot perhatian luas ahmadiyah, sunny siyah ketika ada kasus di sampan, meskipun itu skalanya local tapi kan dimensinya lebih luas bahkan . biasanya di periode tertentu cover story tidak terduga. Karena filosofi kita ingin menyajikan sesuatu yang berbeda. Pernah waktu inul daratista fenomenal cover story inul juga pernah fenomena , ariel peterpan juga ketika fenomenal aa gym. Pokoknya segala hal yang menjadi perhatian public luas kita biasanya menjelaskan fenomena. Ini fenomena apa sosok itu mencuat apa implikasi kemunculan sosok itu dari berbagai aspek dari ekonomi apa, ekonomi kreatif gitu ya . munculnya fenomena digital dari aspek ekonomi kreatif , bahkan jadi edisi khusus kita. Itu kira-kira secara umum tentang konten gatra.

Bagaimana menentukan rubrikasi?

Laporan utama itu nama yang di cover tentu itu yang nilai beritanya paling kuat. Yang pokok itu dinilai yang paling penting untuk dinilai penting bagi public, yang kedua dalam pers produksi berita itu juga ekonomi maka yang punya nilai jual faktor nilai jual juga menjadi pertimbangan kita. Tapi tidak berarti kita jualan itu mengabaikan semua hal jualan sensasi nggak juga. Ada cover cover yang bermuatan kejutan ya itu strategi menarik perhatian tapi tidak sampai antara isi dan judul tidak nyambung. Gak level itu. Karena kita abaca majalah, majalah itu harganya juga mahal ya yang beli orang-orang mapan secara ekonomi yang seperti itu tentu orang-orang yang terpelajar, orang yang berwawasan luas pengambil keputusan elite lit penyelenggara Negara maupun pengusaha tentu kita bisa menyajikan yang ecek-ecek. Mereka standarnya tinggi juga. Makanya kita bisa hanya mengeksploitasi judul. Yang pertama penting bagi public, kedua nilai jual, tapi kalau ini tidak menjual tapi penting diketahui public, berguna bagi public, perlu dipakai untuk . misalnya yesusallem kita ambil angel yang erbeda missal dari seperti kebengalan trump, cermin dari spirit kolonialisme Israel ya itu kita singgung didalam tapi kita ambil angel beda mengambil hipotesis sebagai langkah trump untuk menghidupkan industry pasar militer dia jadi dia sengaja mengambil langkah provokatif, gejolak disuatu kawasan itu penting bagi amerika untuk menghidupkan industry militernya. Dia kan militernya berproduksi terus gak dijual kan bisa macet, dia punya tenaga banyak, proses produksi butuh biaya banyak. Jadi trump kita curigai untuk membisniskan perang. Timur tengah, apalagi isis mulai surut, suriah mulai redup sebelumnya gejolak Qatar nah ujungnya beli senjata di amerika juga amerika selalu mengambil keuntungan dibalik krisis politik keamanan karena kan amerika kondisi ekonomi sedang tidak baik dan melakukan sesuatu agar ekonominya baik, lapangan pekerjaan meningkat pengangguran menurun sejak awal kan kebijakan trump itu American first. bagaimana mengedepankan kepentingan amerika 15.30. kita sengaja mendesain angel agar public dapat informasi lain cara pandang lain sehingga bisa memperluas perspektif public atas suatu masalah. Fungsi pers kan untuk edukasi public tidak semata-mata karena emosional. Proporsional jelas apa benefit untuk Indonesia kalo itu isu global. Kriteria layak gatra fakta angel lain. Semua berita yang lolos kita anggap layak untuk di gtra. Dari yang layak kita peringkat. Mana yang paling tinggi.

Bagaimana momen PKI bisa dimunculkan dan siapa sumbernya?

Pki ini kan. Wawancara anwar makarim, kepala lemhanas . ini isu yang tidak sepenuhnya baru tapi pada momen tertentu suka muncul karena kita memakai logika begini kalau menulis . isu pki akan kita tulis ketika ada dinamika

baru. Kenapa di era Jokowi banyak itu berdasarkan momen peristiwa dan penting di follow up. Era Gus Dur banyak karena berbagai isu itu mengemuka itu bukan satu-satunya yang mendominasi policy Gus Dur itu menempatkan dari transisi orde baru ke reformasi. Banyak sekali hal yang harus direformasi. Isu hubungan antar agama, konghuchu. Transisi orde baru, presiden fenomenal tidak seperti sebelumnya, menabrak banyak pakem wajar kalo dia jadi pusat perhatian. Tapi kalo anda menyimpulkan Gatra larut dalam sentiment isu PKI pada era Jokowi itu salah. Soalnya Gatra seringkali mengangkat cover story Jokowi itu positif. Dan lebih duluan Gatra, Tempo seolah-olah lincah the only one. Tapi kan Gatra duluan ya kita biasa saja. Lebih karena ada event aja.

Bagaimana Gatra memposisikan diri?

Gini, filosofi Gatra ini tajam tapi tidak memihak, kritis tapi tidak mengiris kita balance, Gatra tidak mau tendensius menjaga kritis tapi tidak memaksakan frame, ada tendensi pembunuhan karakter itu kita hindari. Saya kira itu sejalan dengan pers untuk menyajikan secara proporsional, semua wadah diwadahi secara proporsional dan memberikan kepada public untuk catatan masing-masing apalagi pembaca majalah kan well educated. Orientasinya tidak memperkeruh suasana ada follow up untuk menyelesaikan masalah termasuk isu PKI. Ya orientasinya bagaimana masing-masing pihak merasa tidak puas dengan pengelolaan isu ini argumentasinya bisa didengarkan untuk. Tentu penyelesaiannya dengan cara proporsional. Penyelesaian yang dipersepsi hanya sepihak hanya membuat penyelesaian isu tidak selesai-selesai. Ini isu yang begitu kompleks menempatkan PKI sebagai biang kerok itu gak proporsional. Atau menempatkan PKI korban itu juga tidak proporsional. Nanti ada suara2 yang gak fear. Dalam pengalaman kami PKI adalah. Ketika PKI meminta untuk permohonan maaf juga kita sajikan permohonan maaf yang peristiwa mana mungkin pasca 65 misalnya 32.04 ketidakpuasan itu justru malah menimbulkan problem baru

Bagaimana ideologi dan tujuan Gatra?

Ideologi pencerdasan public. Isu valid tergaransi. Ya fungsi pers, salah satunya control sosial, tentu informasi, edukasi ada hiburan. Jadi Gatra itu hadir dalam filosofi pers sebagian dari hak asasi akan informasi ya Gatra hadir untuk penguatan eksistensi pers dan dalam konteks demokrasi. Eksistensi pers situ agar demokrasi terkawal dengan baik sebaliknya Negara yang demokrasinya tidak normal juga persnya tidak normal. Persnya hanya memberitakan yang diinginkan penguasa gitu. Ya ada fungsi control itu yang diperankan Gatra. Apalagi setelah reformasi hampir gak ada media yang gak kritis.

Apakah itu penyebab Gatra selalu lolos dan tidak dibredel di era Orde Baru?

Bukan lolos, gatra itu berdiri setelah tempo dibredel dan personilnya ingin mendirikan media baru jadi gatra didirikan mantan personil tempo yang memerankan fungsi media. Jadi bukan kalo yang lain dibredel gatra selamat sendirian nggak, ya gatra menampilkan diri sehingga kebutuhan akan informasi tersedia edukasi tersedia kemudian control public juga jalan.

Apakah tokoh dan orang-orang terdekat mempengaruhi pemberitaan Gatra?

Rasa-rasanya kita-kita aja yang memutuskan angelnya kemana arahnya kemana . pada skala tertentu pendiri memberikan warna, pendiri gatra dekat dengan militer gatot subroto sebenarnya tukar informasi saja. Gatott subroto yang memimpin pemberantasan pki tahun 48 . apa yang dia lakukan, dia hanya sekedar menyampaikan. Dulu begini jadi kalo pki diposisikan korban pada saat itu kata siapa gitu.

Aditya Kirana Wartwan Gatra

Bagaimana angel berita PKI?

Kita ngambil angelnya PKI selesai, kita ngga ngomongin pergunjungan dibelakang harusnya. Tetapi mau tidak mau harus disorot sedikit saja. Saya tau Mas Asrori maunya dalam tulisan tersebut adalah biarkan saja mereka berdua berkelahi. Ada gengnya LBH, Din Syamsudin biarkan saja berantemin saja disitu. Jadi bukan masalah menang kalah tapi bagaimana PKI itu sudah tidak ada lagi soal tapi ya komunismenya ya belum

Bagaimana proses produksi dan pergeseran framing?

Tiga, pertama rapat redaksi hari rabu diusulkan, masuk lintas departemen itu seperti rapat paripurnanya, penulisnya ngasih penugasan kasih ke kita liputan, bikin liputan. Ngga boleh framing berbeda, sudah ditentukan saat rapat angelnya seperti apa. Pemelihan narasumber ditentukan pas rapat sampai reportenya.

Memilih untuk berpihak kemana dalam permasalahan yang begitu sensitif?

Sebenarnya masalah keberpihakan, bukan urusan saya sebagai reporter itu urusan penulis. Cuma kita tugasnya adalah mencari bahan yang sedalam-dalamnya ntah itu mojokin siapa kita tidak peduli itu urusannya mas asrori untuk menyeimbangkan itu.

Apa reaksi dari narasumber ketika diwawancara mengenai PKI?

Untuk narasumber semangatnya berbeda. Apalagi kelompok Din agak sedikit kenceng ngomongnya. Kalau kelompok LBH, keluarga korban PKI ya begitu-begitu saja menyikapinya santai.

Bagaimana Gatra memposisikan diri?

Gatra mencoba memposisikan diri bahwa PKI itu Final, musuh bersama Cuma persoalannya hantu PKI itu ideologinya bukan partainya.

Apa yang seharusnya bisa dilakukan dalam menangani masalah tersebut?

Yang disesali itu kan karena kita tidak bisa kompak, mengkonsolidasi. Namun permasalahannya kan kelompok yang satu belum bisa menerima kenyataannya bahwa mereka dijadikan musuh selama bertahun-tahun dan kelompok satunya mereka tidak percaya bahwa komunis itu selesai. Kita mencoba untuk menyelesaikan itu reotnya kecurigaan itu selalu ada.

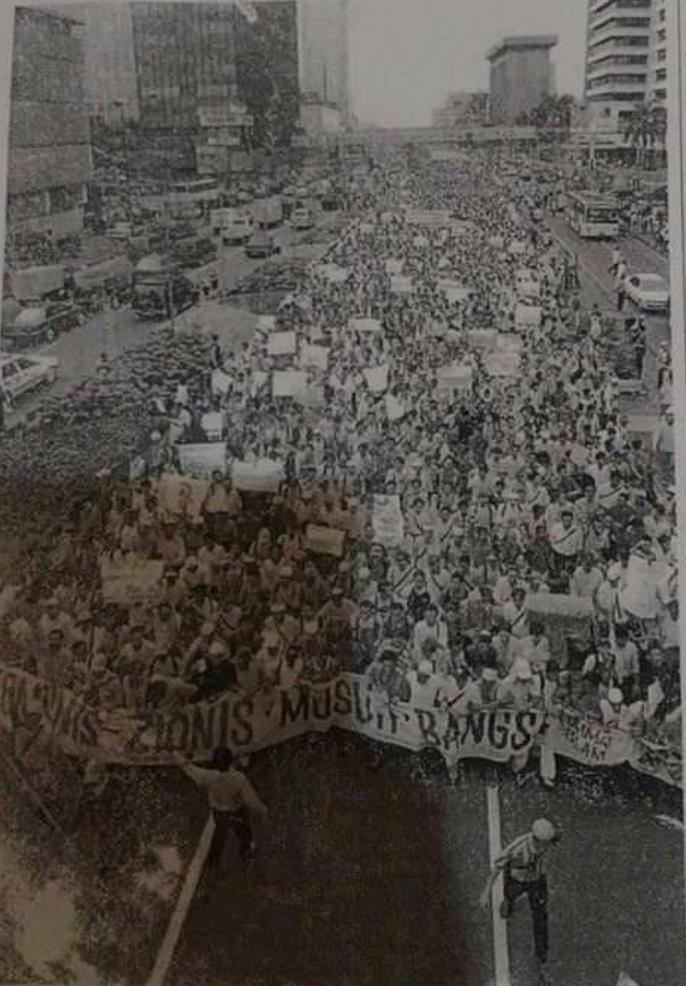
Sebenarnya ini membuka luka lama, memang harus diselesaikan. Tapi setiap kali penulisan hanya seperti mengulang karena tidak ada kebaruan. Kecuali menulis tentang ideologinya itu soal lain lagi. Sebagaimanapun PRD membawa ideologi komunisme dan nyerempet-nyerempet tidak akan laku juga. Seradikal-radikalnya papernas nggak masuk juga di pemilu. Yang bermasalah bukan gerakan partainya tapi gerakan senyap dan politik.

Teks Berita Tempo dan Gatra

NASIONAL

PKI, Hantu atau Dihantukan?

Usul Presiden untuk mencabut ketetapan MPRS tentang komunisme memicu pro dan kontra.



Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah terhitung ada selama lebih dari dua dekade. Namun, telah berganti wajah. Dari monok, semesta, sosialis, kapitalisme. Namun, PKI dan kaumnya belum berhenti jadi hantu, atau hantu yang menakutkan.

Dalam dua pekan terakhir, dengan marak sambutan-menyambutan untuk usul Presiden Abdurrachman Wahid mencabut Ketetapan MPRS Nomor 15/1966 tentang larangan berkegiatan partai politik dan secara radikal mengaitok warganya, MPRS menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Langkah tegas itu juga melarang setiap kegiatan yang menyebarkan ajaran komunisme, dan leninisme.

Atmosfer penolakan dilontarkan oleh jajak pendapat yang menunjukkan mayoritas rakyat masih alergi terhadap komunisme. Dalam jajak pendapat pekan silam, misalnya, 70 persen masih menolak PKI. Sebelumnya, pada Desember 1999, dengan metode sama, kami ambil responden di 23 kota melalui jajak pendapat TEMPO mengenai penolakan yang tak berbeda jauh.

Puluhan tahun, semasa tula h sistematis komunisme meyakini nyekian sebagai wabah yang harus dibasmi. Kampanye itu dilhami pembantaian terlelap 1965—orang-orang PKI dan anak komunisme sebagai simpatisan PKI—di seluruh da awal Orde Baru. Juga pemaat tempat puluhan ribu orang dipa pengadilan. "Tanpa proses dijebloskan ke Buru dan ditubuh rena dituduh terlibat PKI," kata Pramoedy Ananta Toer.

Hingga berpuluh tahun komunisme orang PKI dan anak komunisme sasaran diskriminasi. Bahkan, ada tetangga yang berani menyalah Abdullah Aidit ketika ayahnya PKI itu meninggal. "Ayah tidak hu soal gerakan PKI. Tapi dia anggap bersimpati kepada komunisme dengan mengurus jenazahnya," ujar Bron Aidit, adik kandung D.N. Aidit, wawancara dengan TEMPO.

Bersama "fundamentalisme" caman komunisme bahkan leka sebagai alat untuk menentang keadilan bagi petani yang buruh bagi buruh yang dibayar mude kembangannya, kampanye anti-PKI memang telah dipakai rezim Orde Baru.

Protes anti-PKI oleh Front Umah Indonesia di Jakarta. Keseluruhan

...pakaian kekeasaannya yang korup...
 ...sistematika depolitisasi basis-hubungan...
 ...kebebasan berekspresi...
 ...Abdurrahman mencoba memba...
 ...Da menyatakan tersentuh mende...
 ...sristian keluarga tokoh-tokoh PKI...
 ..."Mereka tidak bisa diperlaku...
 ...at orang yang tidak punya hak sa...
 ..." katanya, akhir Maret silam. Le...
 ...pencabutan ketetapan MPRS yang...
 ...nya itu punya alasan lain. Memu...
 ...TEMPO di lingkungan kepresi...
 ...pencabutan itu dimaksudkan untuk...
 ...si sejarah. "Dengan keterbukaan...
 ...si besar, orang tak ragu...
 ...ungkap apa yang sebe...
 ...jadi kala itu," ujarnya.
 ...di kalangan seja...
 ...semang tak banyak se...
 ...yang berani mengung...
 ...dari misteri 30 Sep...
 ...Meski benar merupa...
 ...Anwar yang mengenik...
 ...1960-an, masih men...
 ...khotan besar peran PKI...
 ...santiantan terhadap se...
 ...sederal dan dalam kude...
 ...oktober yang gagal itu...
 ...aksi mata atau bukti...
 ...kan bahwa aparat (ten...
 ...sih dalam gerakan itu...
 ...hanya menjadi tambal...
 ...Budiman Sudjat...
 ...Umum Partai Rak...
 ...katik.
 ... yang juga sempat dipenjara...
 ...katanya dituding menyerupai PKI...
 ...angan mendukung usul Presiden...
 ..."Pencabutan itu sejalan de...
 ...sanan demokrasi," katanya. Dengan...
 ...beda, dukungan juga datang dari...
 ...Abdul Djamil, yang menilai ko...
 ...bukan lagi sebagai ancaman. "Sa...
 ...an ini komunisme sudah tak laku...
 ...Keta Umum Partai Kebangkit...
 ...u.
 ... tak sedikit pula yang tak meng...
 ...nisme sudah mati. Sri Soeman...
 ... hukum tata negara, masih melihat...
 ...baiknya komunisme di Indone...
 ... masyarakat di mana tingkat ke...
 ... sangat tinggi, paham komunisme...
 ...siheri pengaruh," katanya. Ken...
 ...ketetapan MPRS tersebut tidak...
 ...ngan nilai-nilai demokrasi, Soe...
 ...mangkan komitmen komunisme...
 ...kristokrasi itu sendiri. "Kalau me...
 ... (PKI) justru akan menghilang...
 ...sokrasi itu sendiri," ujarnya. Se...
 ...na Soemantri, "Apakah komunis...
 ...kologis tidak bertentangan de...
 ...asala?"
 ...itu aspek yang akan dicapai Presi...
 ...Abdurrahman dari pencabutan itu ada-

lah rekonsiliasi nasional. Tragedi 30 Septem-
 ber, bagaimanapun, memang telah membe-
 lah negeri ini dalam "perang saudara". Bah-
 kan, lebih jauh, Presiden Abdurrahman me-
 nyatakan maaf atas "peristiwa berdarah
 yang banyak menelan korban jiwa" itu.
 Ketua PB Nahdlatul Ulama K.H. Hasyim
 Muzadi menyambut baik langkah rekonsi-
 liasi itu, tapi dengan catatan. "Rekonsiliasi
 itu hendaknya dibangun sebagai upaya un-
 tuk menatap masa depan, bukan jembatan
 untuk membangkitkan pertikaian kembali,"
 katanya. Namun, soal pencabutan ketetapan
 MPRS ini, dia tak setuju. "Kita harus melin-

rahman karena apakannya justru dicibirkan
 oleh tokoh seperti Pramodya Ananta Toes.
 "Gampang amat minta maaf," kata Pramoe-
 dy, "Untuk basa-basi, itu baik saja, tapi se-
 lanjutnya apa? Saya tidak percaya sama Gus
 Dur." Pramodya menuntut hukum dan ke-
 adilan ditegakkan. Dari lebih dari itu, "Biar
 DPR dan MPR yang mengatakan soal itu,
 Gus Dur itu mewakili siapa?"

Goenawan Mohamad menyayangkan sikap
 Pramodya. Menurut salah satu sastra-
 wan Manifest Kebudayaan itu—dulu pernah
 menjadi sasaran penganyangan oleh tokoh
 Lembaga Kebudayaan Rakyat seperti Pram-
 oedya—Presiden Abdurrah-
 man telah menunjukkan niat
 baik, bahkan meminta maaf.
 Tidak mudah melakukan hal itu,
 kata Goenawan, karena selama
 ini dianggap tabu. Meski setuju
 proses hukum harus ditempuh,
 Goenawan juga melihat ada
 kendala cukup besar untuk
 merealisasinya. "Hal itu su-
 dah terjadi lebih dari 30 tahun
 dan pelaku pembantaian tidak
 jelas karena merupakan gerakan
 massal," katanya.

Sikap Pram tampaknya juga
 akan memperkecil peluang
 MPR untuk memperdebatkan
 pencabutan tadi. Sejahter ini, ba-
 ru Matori Abdul Djamil yang
 mendukung usul Presiden Ab-
 durrahman. Itu pun belum res-
 mi suara Fraksi PKB, Fraksi Golkar dan
 PAN, seperti disuarakan oleh Akbar Tan-
 djung dan Amien Rais, tampak enggan
 mendukungnya.

Pencabutan larangan mempelajari marxis-
 me diperkirakan lebih mudah diperjuangkan.
 Buku-buku Pramodya—yang dulu selalu
 dicap berbau marxisme—sekarang sudah
 bebas beredar. Bahkan, buku Karl Marx be-
 lakangan bermunculan dalam bahasa Indo-
 nesia. Marxisme tidak selalu identik dengan
 komunisme. Bapak bangsa seperti Moham-
 mad Hatta, yang juga seorang muslim yang
 taat, suatu ketika bahkan pernah menyata-
 kan diri, "Saya seorang marxis."

Namun, menyatakan PKI dan komunisme
 tak lagi merupakan organisasi serta ideologi
 terlarang tampaknya masih sulit diper-
 juangkan.

Peristiwa 30 September dan kejadian-ke-
 jadian yang menyertainya adalah tragedi be-
 sar bagi seluruh bangsa ini—tak hanya bagi
 para korban pembantaian dan penghujatan.
 Cepat atau lambat, suka atau tidak, bangsa
 Indonesia harus menengok luka mendalam
 yang tak tersembuhkan itu. Demi masa de-
 pan yang lebih baik.

Johan Budi S.P., Iwan Setiawan, Purwadi D. Prihadi-
 dan, Hani Padjati, dan Zulf Hakim (Dorabr-)



Tersangka PKI dieksekusi di Madiun, 1948. Dibunuh atau membunuh

dungi masyarakat miskin agar tidak terbawa
 oleh ajaran komunisme," katanya.

Yusuf Hasyim, tokoh NU lain dan partan
 Abdurrahman Wahid, berpendapat bahwa
 "kita tak perlu terus-menerus curiga dan ber-
 tindak diskriminatif." Namun, dia mengata-
 kan bahwa NU hanya bisa mendukung pen-
 cabutan ketetapan itu melalui puktamar ka-
 rena dulu NU termasuk yang keras men-
 dukung ketetapan tadi. Dia juga mengatakan
 bahwa "warga NU tak perlu minta maaf."

Apa yang dilakukan PKI di masa silam,
 menurut Yusuf Hasyim, sangat bertentangan
 dengan demokrasi dan hak asasi manusia.
 Dalam sebuah peristiwa pada awal 1965, mi-
 salnya, "Tujuh truk yang mengangkut rom-
 bongan pemuda Ansoor dihadang dan dibun-
 tai oleh Pemuda Rakyat (anak organisasi
 PKI)." Tidak hanya itu, "PKI juga membant-
 ai para ulama dan guru sekolah di berbagai
 daerah yang mereka kuasai saat itu," kata-
 nya. Pada gilirannya, Ansoor adalah salah satu
 tolang punggung pembasmian PKI. "Dalam
 konflik dengan PKI, orang NU termasuk GP
 Ansoor tidak punya pilihan, dibunuh atau
 membunuh," katanya. Jadi, NU tak perlu
 minta maaf.

Tak mudah membangun rekonsiliasi. Dan
 soal bertambah rumit bagi Presiden Abdur-

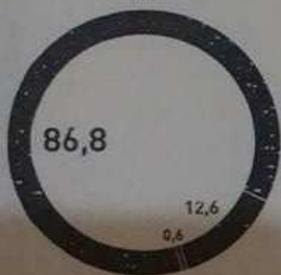
bukan dunia nyata." Sesuatu yang diadakan untuk tujuan tertentu. "Bisa politik atau ekonomi. Oleh siapa? Banyak. Ada yang anti-Jokowi, ada yang ingin berkuasa dalam Pemilu 2019, ada politisi bank, ada pengusaha hitam, ada radikal agama, macam-macam," katanya.

"Ini memang elitik. Mobilisasi elite untuk kepentingan kekuasaan dan ekalasi kekuatan menuju Pemilu 2019," ujar Syamsuddin. "Sangat disayangkan, kepentingan yang bermain ini meng-



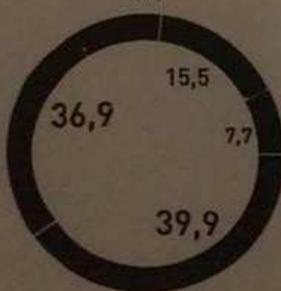
Nonton bareng film Pengkhianatan G30 S/PKI di Pesantren Tebu Ireng, Jombang

SEKARANG SEDANG TERJADI KEBANGKITAN PKI ? (%)



■ TIDAK SETUJU ■ SETUJU ■ TIDAK JAWAB

JIKA "SETUJU", APAKAH KEBANGKITAN PKI SUDAH MENJADI ANCAMAN ? (%)



■ SUDAH ■ SEDIKIT SUDAH ■ BELUM ■ TIDAK JAWAB

angkat isu PKI, sesuatu yang sangat sensitif, khususnya di kalangan umat Islam." Bagi Syamsuddin, itu berpotensi memecah belah bangsa bila tidak ada upaya penyelesaian secara cerdas dan secara damai.

Ketua MPR, Zulkifli Hasan, memaklumi bila ada yang menangkap gelagat kebangkitan PKI dari gerakan yang memanfaatkan kebebasan ekspresi era Reformasi. "Ini mungkin yang ditangkap sebagai sinyal-sinyal kebangkitan," katanya dalam Sarasehan Pergerakan Indonesia Maju (PIM), di Jakarta, Jumat pekan lalu.

"Saya melihat, kita waspada iya, tantangan kita kemudian adalah melaksanakan Pancasila dan empat konsensus lainnya," Zulkifli menambahkan. "Dengan pengalaman buruk tahun 1948 dan 1965, bangsa Indonesia sudah mengambil kesimpulan final, bahwa paham PKI tidak boleh ada di bumi pertiwi."

Peneliti LIPI, Siti Zahro, bertanya-tanya, mengapa komunisme sebagai paham mendadak digandrungi? Ada apa dengan Pancasila? Apa yang salah dengan Pancasila? "Adakah kecenderungan pengkhianatan terhadap negara?" kata Zahro.

"Saya melihat adanya kekecewaan yang belakangan semakin akumulatif. Praktik demokrasi menghasilkan fragmentasi politik dan sosial. Setiap pilkada dan pemilu kita saling berhadapan," kata peneliti politik lokal ini. "Apa yang salah? Negeri ini diurus dengan cara yang salah dan enggak serius."

Ketua PIM, Din Syamsuddin, melihat, kita alpa terhadap Pancasila. "Pancasila termanipulasi," katanya. Pancasila dirusak dengan membiarkan ideologi lain. "Terinasuk ketika wacana komunisme merebak, sebagian membuka jalan, akhirnya dendam sejarah mengemuka. Terjadilah aksi reaksi yang tidak perlu," guru besar politik Islam ini menambahkan.

Isme dan ideologi buatan manusia, kata Din, tidak mudah mati. Dia terwarisi dan menjelma dalam metamorfosis. Ada sebutan KGB (Komunis Gaya Baru), misal. "Selama bangsa ini berpegang teguh pada Pancasila sebagai titik temu, kesepakatan, dan dasar ideologi dalam bidang politik dan ekonomi, saya optimistis, isme-isme yang lain tidak mengganggu," katanya.

Pembangunan, kata Din, harus benar-benar berkomitmen kepada Pancasila, tidak hanya dalam kata-kata "Aku Pancasila, Kami Pancasila", tapi hampa. "Ini yang berbahaya dari bangsa ini," katanya.

"Kita harus kembalikan sistem politik kepada sila keempat dan sistem ekonomi pada sila kelima," kata Din. "Sistem ekonomi dan politik kita masih jauh panggang dari api, dari Pancasila."

Menurut Din, saatnya anak-anak bangsa bersatu. "Anak-anak eles PKI itu juga saudara kita, banyak juga muslim yang taat," katanya. Mereka harus diperlakukan sebagai WNI dengan berkeadilan. "Dengan catatan, tidak ada dusta di antara kita," kata Din. ■

ASRORI S. KARSI DAN ADITYA KIRANA